



TAHUN 2022



PROFIL GENDER DAN ANAK

**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURBALINGGA**



[Dinsosdaldukkb3a.pbg](https://www.instagram.com/Dinsosdaldukkb3a.pbg)



Dinsosdaldukkb3a@purbalinggakab.go.id

KATA PENGANTAR

Data pilah gender menjadi elemen penting bagi terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) yang dapat membantu para pengambil kebijakan untuk memberi gambaran secara perspektif mengenai peran, situasi dan kondisi perempuan dan laki – laki di Kabupaten Purbalingga.

Penyusunan data gender sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program/kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan Pembangunan yang Responsif Gender.

Tersusunnya buku Profil Gender Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 berkat dukungan dari semua OPD yang telah memberikan kontribusi data dan merupakan wujud dari kerjasama yang baik antara OPD di Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan juga lembaga – lembaga vertikal lainnya yang ada di Purbalingga.

Untuk itu dengan segala hormat dan kerendahan hati kami sampaikan rasa terima kasih atas kerjasamanya kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyusunan buku ini.

Kami menyadari buku ini belum sempurna, oleh karena itu kami membutuhkan saran dari berbagai pihak demi sempurnanya penyusunan buku ini. Dan Semoga dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat Purbalingga.

Purbalingga, September 2022

KEPALA DINSOSDALDUKKBP3A
KABUPATEN PURBALINGGA



ENI SOSIATMAN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP 19651220 198603 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Sasaran.....	6
1.4 Metode Penulisan dan Sumber Data.....	6
1.5 Teknik Analisis Data.....	6
1.6 Input	7
1.7 Output	7
1.8 Hasil yang Diinginkan.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA	9
2.1 Kondisi Geografis.....	9
2.2 Visi Misi Kabupaten Purbalingga.....	10
2.3 Kondisi Pembangunan Manusia dan Gender di Kabupaten Purbalingga	13
2.3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Purbalingga.....	13
a. Usia Harapan Hidup.....	15
b. Angka Harapan Lama Sekolah	16
c. Angka Rata – Rata Lama Sekolah	17
d. Pengeluaran Per Kapita	19
2.3.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Purbalingga	20
2.3.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Purbalingga	21

BAB III DATA GENDER DAN ANAK BIDANG KEPENDUDUKAN

DAN SIPIL.....	23
3.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk	23
3.2 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	26
3.3 Rasio Ketergantungan Penduduk	27
3.4 Struktur Penduduk Usia Anak	30
3.5 Kepemilikan Akta Kelahiran	32
3.6 Kepemilikan Kartu Identitas Anak	33

BAB IV DATA GENDER DAN ANAK BIDANG KESEHATAN 35

4.1 Data Kesehatan Ibu.....	36
4.1.1 Gambaran Kondisi Kehamilan	36
4.1.2 Angka Kematian Ibu	38
4.1.3 Pelayanan Kesehatan Ibu.....	39
a. Pelayanan Antenatal	39
b. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dengan Kompetensi Kebidanan	41
c. Pelayanan Ibu Nifas	43
d. Ibu Nifas Mendapat Vitamin A.....	44
e. Penanganan Komplikasi Kebidanan	46
4.2 Data Kesehatan Anak	47
4.2.1 Gambaran Kesehatan Anak	47
a. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	48
b. Pemberian ASI Eksklusif.....	49
c. Status Gizi Balita	50
4.2.2 Pelayanan Kesehatan Anak	52
a. Penanganan Komplikasi Neonatal	52
b. Pelayanan Imunisasi	52
4.2.3 Angka Kematian Pada Anak.....	54
a. Angka Kematian Neonatal.....	55
b. Angka Kematian Bayi (AKB)	58
c. Angka Kematian Anak Balita	60

4.3 Persentasi Penduduk dengan Keluhan Kesehatan Dalam Satu Bulan Terakhir	62
4.4 Tenaga Kesehatan	63
BAB V KONDISI KELUARGA DAN KELUARGA BERENCANA.....	66
5.1 Kondisi Keluarga	67
5.1.1 Jumlah Keluarga	67
5.1.2 Jumlah Anggota Keluarga	68
5.1.3 Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan	70
5.2 Keluarga Berencana.....	73
BAB VI LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN	
ALTERNATIF	76
6.1 Pengasuhan Alternatif	76
6.2 Perkawinan Anak	79
6.3 Lembaga Pengasuhan Berkelanjutan	86
BAB VII PENDIDIKAN.....	90
7.1 Partisipasi Sekolah	92
7.2 Partisipasi Sekolah Berdasarkan Kelompok Umur	96
7.3 Partisipasi dalam Kejar Paket.....	97
BAB VIII KETENAGAKERJAAN	99
8.1 Penduduk Usia Kerja dan Jenis Kegiatan.....	99
8.2 Status Pekerjaan	102
8.3 Lapangan Usaha Utama.....	103
8.4 Pasar Tenaga Kerja.....	104
8.5 AKAN, AKAD dan Pengangguran Terbuka.....	105
BAB IX POLITIK DAN SEKTOR PUBLIK.....	111
9.1 Politik dan Legislatif.....	111
9.2 Pemerintahan Kabupaten	114
9.3 Pemerintahan Desa.....	118
9.4 Kepolisian	120

9.5 Yudikatif	121
 BAB X KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN PERLINDUNGAN	
KHUSUS ANAK	124
10.1 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	127
10.2 Perlindungan Khusus Anak	139
 BAB XI KESIMPULAN	
DAFTAR PUSTAKA	147

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
3.1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	23
3.2 Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	25
3.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	27
3.4 Penduduk Menurut Usia Angkatan Kerja di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	29
3.5 Jumlah Penduduk Usia Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	31
3.6 Kepemilikan Akta Kelahiran pada Usia Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2021	33
3.7 Kepemilikan Kartu Identitas Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2021	34
4.1 Kondisi Ibu Hamil di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	38
4.2 Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu di Kabupaten dalam Empat Tahun Terakhir	39
4.3 Kunjungan Ibu Hamil Kabupaten Purbalingga Dalam Empat Tahun Terakhir	40
4.4 Persalinan Ditolong oleh Nakes di Kabupaten Purbalingga Dalam Empat Tahun Terakhir	42
4.5 Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten Purbalingga Dalam Empat Tahun Terakhir	44
4.6 Pemberian Vitamin A Pada Ibu Nifas di Kabupaten Purbalingga Dalam Empat Tahun Terakhir	45
4.7 Jumlah dan Persentase Penanganan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Purbalingga Dalam Empat Tahun Terakhir.	46

4.8	Persentase Bayi BBLR di Kabupaten Purbalingga Dalam Empat Tahun Terakhir	48
4.9	Cakupan Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi Usia <6 Bulan Di Kabupaten Purbalingga Dalam Empat Tahun Terakhir.....	50
4.10	Perkiraan Penanganan Komplikasi Neonatal Di Kabupaten Purbalingga Dalam Empat Tahun Terakhir.....	52
4.11	Cakupan Imunisasi di Kabupaten Purbalingga Dalam Empat Tahun Terakhir	53
4.12	Kasus Kematian Bayi dan Angka Kematian Bayi Kabupaten Purbalingga dalam Empat Tahun Terakhir.....	56
4.13	Kasus Kematian Anak Balita dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Purbalingga dalam Empat Tahun Terakhir	59
4.14	Jumlah Kasus Kematian Anak Balita dan Angka Kematian Anak Balita di Kabupaten Purbalingga Dalam Empat Tahun Terakhir	61
4.15	Persentase Pendudukan Dengan Keluhan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Dalam Empat Tahun Terakhir	63
4.16	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	64
5.1	Keluarga dan Kepala Keluarga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	68
5.2	Jumlah Jiwa dalam Keluarga di Kabupaten Purbalingga tahun 2021	69
5.3	Jumlah Jiwa usia sekolah wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	69
5.4	Kondisi Kepala Keluarga Menurut Status Pendidikan dan Pekerjaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	71
5.5	Tahapan Keluarga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021...	72
5.6	Jenis Alat Kontrasepsi yang Digunakan Peserta KB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	74
6.1	Data PAUD tahun 2021 Kabupaten Purbalingga.....	78

6.2	Data Murid TK dan RA Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 ..	78
6.3	Data Guru TK dan RA Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 ...	79
6.4	Data Jumlah Usia Calon Pengantin Kurang Dari 21 Tahun Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.....	83
6.5	Jumlah Kelompok Pembinaan Keluarga di Kabupaten Purbalingga 2021	86
6.6	Data LKSA di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	88
7.1	APM, APK dan APS di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 ..	95
7.2	Persentase Penduduk Usia 10 tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	96
7.3	Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	97
7.4	Partisipasi Peserta dan Tutor dalam Kejar Paket A, B dan C di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.....	98
8.1	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	101
8.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Dalam Empat Tahun Terakhir	101
8.3	Persentase Penduduk Umur 15 tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	103
8.4	Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Usaha Utama Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.....	104
8.5	Jumlah Pencari Kerja, Permintaan Tenaga Kerja dan Pemenuhan Tenaga Kerja Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	105
8.6	Kondisi Ketenagakerjaan dilihat Dari AKAN, AKAD dan Pengangguran Terbuka di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	105

8.7	Aktivitas di Bidang Pertanian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	106
8.8	Aktivitas di Bidang Perikanan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	107
8.9	Kegiatan di Bidang Perkoperasian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	109
8.10	Kegiatan Usaha Desa Wisata, Warung Makan, Perhotelan, Tempat Hiburan Malam dan Obyek Wisata di kabupaten Purbalingga Tahun 2021.....	110
9.1	Jumlah Anggota DPRD di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	111
9.2	Jumlah Anggota DPRD Menurut Komisi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.....	112
9.3	Umur Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 ...	113
9.4	Jumlah Calon Anggota Legislatif dan Pemilih di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.....	114
9.5	Jabatan dan Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Golongan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	115
9.6	Jumlah PNS dan CPNS Daerah Otonomi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	116
9.7	Banyaknya PNS dan CPNS di Luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.....	117
9.8	Kondisi Kepemerintahan di Desa/Kelurahan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	119
9.9	Pejabat dan Pegawai di Kepolisian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	120
9.10	Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Tahun 2021	121
9.11	Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Purbalingga Tahun 2021...	122

9.12 Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Agama di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	122
10.1 Tenaga Terlatih untuk Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	126
10.2 Jenis Kasus yang Ditangani Tim Harapan dalam Empat Tahun Terakhir	129
10.3 Kategori Usia Pelaku Kasus yang ditangani Tim Harapan 2021	130
10.4 Kategori Usia Korban Kasus yang ditangani Tim Harapan 2021	131
10.5 Jenis Kekerasan dengan Korban Dewasa yang Ditangani Tim Harapan Tahun 2021	132
10.6 Jenis Kekerasan yang dialami Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	133
10.7 Tempat Kejadian Kekerasan dengan Korban Dewasa yang Ditangani Tim Harapan Tahun 2021	134
10.8 Tempat Kejadian Kekerasan dengan Korban Anak yang Ditangani Tim Harapan Tahun 2021	135
10.9 Umur Korban Kekerasan yang Kasusnya Ditangani Tim Harapan Tahun 2021	136
10.10 Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban Dewasa yang Ditangani Tim Harapan Tahun 2021	138
10.11 Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban Anak yang Ditangani Tim Harapan Tahun 2021	139
10.12 Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditangani Oleh Tim harapan dalam Empat Tahun Terakhir	141
10.13 Jumlah Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021	142
10.14 Jumlah Anak yang menjadi Korban Kekerasan Fisik dan Psikis yang ditangani PPT Harapan dalam Empat Tahun Terakhir	142

10.15 Jumlah Anak yang Menyandang Cacat di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	143
--	-----

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Halaman
2.1 Perbandingan IPM Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dalam Empat Tahun Terakhir	14
2.2 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah dalam Empat Tahun Terakhir	16
2.3 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah dalam Empat Tahun Terakhir	17
2.4 Perbandingan Angka Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah dalam Empat Tahun Terakhir	18
2.5 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah dalam Empat Tahun Terakhir	20
2.6 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah dalam Empat Tahun Terakhir	21
2.7 Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah dalam Empat Tahun Terakhir	22
3.1 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Purbalingga Per Kecamatan Tahun 2021	25
3.2 Penduduk Menurut Usia Angkatan Kerja di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	30
3.3 Struktur Penduduk Usia Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	31
4.1 Angka Kematian Ibu di Kabupaten dalam Empat Tahun Terakhir	39

4.2	Cakupan Kunjungan K4 Ibu Hamil Empat Tahun Terakhir	41
4.3	Cakupan Persalinan dibantu Oleh Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Purbalingga Dalam Empat Tahun Terakhir	43
4.4	Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten Purbalingga Dalam Empat Tahun Terakhir.....	44
4.5	Pelayanan Ibu Nifas Mendapat Vitamin A di Kabupaten Purbalingga Dalam Empat Tahun Terakhir	45
4.6	Cakupan Penanganan Komplikasi Kehamilan di Kabupaten Purbalingga dalam Empat Tahun Terakhir.....	47
4.7	Angkat Kematian Neonatal Kabupaten Purbalingga Dalam Empat Tahun Terakhir.....	57
4.8	Persebaran Kasus Kematian Neonatal di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	57
4.9	Angka Kematian Bayi Kabupaten Purbalingga dalam Empat Tahun terakhir.	59
4.10	Persebaran Kasus Kematian Bayi per Wilayah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	60
4.11	Angka Kematian Anak balita Kabupaten Purbalingga dalam Empat Tahun terakhir.	61
4.12	Persebaran Kasus Kematian Anak Balita Per Wilayah Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.....	62
4.13	Persentase Penduduk Dengan Keluhan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga dalam Empat Tahun Terakhir.....	63
4.14	Grafik Perbandingan Tenaga Kesehatan Per Jenis Tenaga Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	64
5.1	Jumlah Anak Usia Sekolah Wajib Belajar 9 tahun yang Bersekolah dan Tidak Bersekolah.....	70
5.2	Jumlah Laki – Laki dan Perempuan Anak Usia Sekolah Wajib Belajar 9 tahun yang Bersekolah dan Tidak Bersekolah.	70
5.3	Gambar Tahapan Keluarga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	73

5.4	Jenis Alat Kontrasepsi yang Digunakan Peserta KB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	75
5.5	Kepesertaan KB Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021	75
10.1	Grafik Jumlah Kasus, Korban dan Pelaku Kekerasan Perempuan dan Anak yang ditangani PPT Harapan Empat Tahun Terakhir	128
10.2	Jenis Kasus yang ditangani oleh Tim Harapan Dalam Empat Tahun Terakhir	129
10.3	Perbandingan Umur Korban Kekerasan yang ditangani oleh Tim Harapan Tiga Tahun Terakhir	137
10.4	Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditangani Tim Harapan Dalam Empat Tahun Terakhir	141

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu gender dalam kelompok masyarakat merupakan permasalahan perbedaan peran dan fungsi social antara laki – laki dan perempuan yang terbentuk karena suatu kebiasaan, budaya dan adat istiadat. Hal ini menimbulkan kesenjangan atau *diskriminasi* gender yang pada prakteknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan, social, masyarakat, budaya, maupun negara. Untuk itu perlu kesetaraan gender guna mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Bentuk upaya Pemerintah untuk mencapai kesetaraan gender yaitu dengan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pengarusutamaan **Gender** atau disingkat **PUG** adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Sejalanannya perkembangan waktu adapun kesetaraan dan keadilan yang dimaksud dalam tujuan Pengarusutamaan Gender

(PUG) yaitu kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI) dimana inklusi sosial merupakan perbedaan yang terjadi di masyarakat atas dasar ketidakmampuan (kemiskinan dan disabilitas), usia, lokasi, kasta/etnis dan juga bahasa. Dalam hal ini termasuk kesetaraan dan keadilan untuk anak yang merupakan generasi penerus bangsa sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

Meningkatnya kesetaraan gender pada saat ini sangat berperan penting dalam pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera. Indikator keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah diantaranya yaitu Indeks Kualitas Hidup dan Indeks pembangunan Manusia (IPM). Adapun komponen dari Indeks Kualitas Hidup terdiri dari komponen 1) Angka rata – rata harapan hidup anak setelah 1 tahun, 2) Angka kematian bayi, 3) Angka Melek Huruf dan 4) Tingkat standar hidup. Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari komponen 1) Angka Harapan Hidup bayi lahir, 2) Angka Rata Rata Lama Sekolah, dan 3) Angka Pendapatan per kapita.

Sebagai komitmen Pemerintah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender maka ditetapkan Inpres No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional. Kemudian diatur dalam Permendagri no 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Daerah yang diperbarui dengan Permendagri no 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman PUG di daerah. Dalam pelaksanaan

PUG ada 7 pra syarat yang harus di penuhi yaitu komitmen, kebijakan dan program, kelembagaan PUG, sumber daya, data terpilah, analisa dan partisipasi masyarakat.

Untuk menjamin dan mewujudkan hak – hak anak maka telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah berubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang tersebut merupakan bentuk dari hasil ratifikasi *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. Konvensi ini merupakan instrumen Internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. *CRC* terdiri dari 54 pasal yang hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia khususnya bagi anak-anak yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (KPPPAI dan BPS, 2015).

Mendasari prasyarat yang harus dipenuhi sebagaimana tersebut dalam penyusunan kebijakan yang responsif gender salah

satunya adalah tersedianya data pilah gender, yaitu data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin yang mencakup semua bidang pembangunan. Tersusunnya data pilah gender dan anak mempunyai tujuan untuk mengetahui sejauh mana kesenjangan gender dan permasalahan hak anak, sehingga dapat menyusun kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.

Data memiliki fungsi yang sangat penting bagi kelancaran kinerja suatu instansi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta. Instansi Pemerintah membutuhkan penyusunan data yang baik agar dapat membantu para pemimpin/pengambil kebijakan dalam menyusun rencana kegiatan dan mengambil keputusan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Untuk itulah, sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga berusaha mengumpulkan dan menyatukan data pilah gender dan anak tahun 2021 yang telah ada menjadi sebuah buku “Profil Gender dan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2021”.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 adalah untuk menyajikan data terpilah sehingga dapat memberikan informasi yang lebih jelas tentang kondisi perempuan dibanding laki-laki terkait masalah kependudukan,

karakteristik rumah tangga, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, ketenagakerjaan, sektor publik, kekerasan terhadap perempuan, sosial ekonomi lainnya, dan kesulitan fungsional penyandang disabilitas. Selain itu Profil Gender dan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 diharapkan mampu memberikan informasi gambaran kondisi permasalahan anak dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Purbalingga. Melalui data pilah gender ini akan dapat dilihat ada tidaknya kesenjangan/gap gender yang mungkin terjadi di suatu bidang. Informasi kesenjangan gender ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga (khususnya organisasi-organisasi perangkat daerah yang terkait) dalam membuat kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi dan permasalahan riil yang ada.

Dibuatnya Profil Gender dan Anak tahun 2021 ini sekaligus diharapkan akan lebih memasyarakatkan konsep gender baik di kalangan para pembuat kebijakan publik beserta para pelaksananya maupun di kalangan masyarakat pada umumnya. Selain itu diharapkan pula anak akan mendapat perhatian lebih lagi baik dari semua kalangan, dimana sesuai amanat dalam UU Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 (ps20) bahwa yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan perlindungan anak yaitu Negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat dan orang tua.

1.3 Sasaran

Penggalian data gender dan anak yang menyangkut semua isu dalam bidang kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, pertanian, politik, sosial budaya, hukum dan data kelembagaan yang meliputi kelembagaan PUG di wilayah Kabupaten Purbalingga.

1.4 Metode Penulisan dan Sumber Data

Penulisan Profil Gender dan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 ini disajikan secara deskriptif yang diperkuat dengan tabel dan gambar. Sumber data yang digunakan adalah: (1) data dari masing-masing organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang sesuai dengan format data pilah gender Provinsi yang dihimpun Dinas oleh Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA (DINSOSDALDUKKBP3A), (2) data sekunder yang terdapat dalam buku “Purbalingga dalam Angka 2021” (BPS Kabupaten Purbalingga, 2021) (3) “Profil Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021” (Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, 2020) dan “Profil Kependudukan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 (Dinas Kependudukan dan catatan Sipil).

1.5 Teknik Analisis Data

Data dari tiap-tiap bidang selanjutnya ditampilkan dalam bentuk tabel berperspektif gender, yakni dengan menampilkan data laki-laki dan perempuan dalam bentuk frekuensi dan persentase.

Dengan demikian, dapat dilihat perbedaan kondisi laki-laki dan perempuan pada bidang-bidang tersebut. Selain itu juga beberapa data ditampilkan dalam bentuk pilah kelompok umur dan kelompok wilayah.

1.6 Input

- a. Merupakan kelanjutan dari buku data terpilah gender dan data anak dari tahun sebelumnya.
- b. Ketersediaan data terpilah gender menjadi suatu kebutuhan semua pihak pemangku kepentingan

1.7 Output

- a. Mengidentifikasi perbedaan kondisi perempuan dan laki - laki termasuk anak dalam dimensi tempat dan waktu.
- b. Mengidentifikasikan masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan perempuan, laki – laki dan anak - anak dan responsif terhadap masalah kebutuhan perempuan dan laki – laki dan anak – anak.
- c. Buku Profil Gender dan Anak Tahun 2021.

1.8 Hasil yang Diinginkan

- a. Buku Profil Gender dan Anak Tahun 2021.
- b. Data gender dan data anak untuk memberikan acuan bagi pemerintah dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.
- c. Adanya kerjasama dengan lembaga sektoral dalam penyelenggaraan data gender dan data anak

- d. Base data gender dan data anak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

2.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Purbalingga adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Purbalingga. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pemalang di sebelah utara, Kabupaten Banjarnegara di sebelah timur dan selatan, serta Kabupaten Banyumas di sebelah barat. Purbalingga berada di cekungan yang diapit beberapa rangkaian pegunungan. Di sebelah utara merupakan rangkaian pegunungan (Gunung Slamet dan Dataran Tinggi Dieng). Bagian selatan merupakan Depresi Serayu, yang dialiri dua sungai besar Kali Serayu dan anak sungainya, Kali Pekacangan. Ibukota Kabupaten Purbalingga berada di bagian barat wilayah kabupaten, sekitar 21 km sebelah timur Purwokerto.

Luas wilayah Kabupaten Purbalingga adalah 77.764,122 ha atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah (3.254.000 ha). Sebagian besar wilayahnya adalah berupa sawah (27,27 persen), perkampungan (21,18 persen), tegalan (21,42 persen) serta hutan (14,57 persen). Sebagian lainnya digunakan untuk kebun campur (6,53 persen), perkebunan (1,05 persen), perikanan (0,28 persen) dan lain-lain (4,47 persen) (BPS Kabupaten Purbalingga, 2017).

Kabupaten Purbalingga terdiri atas 18 kecamatan, yang dibagi lagi atas 224 desa dan 15 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Purbalingga. Dari 18 kecamatan, yang terluas adalah Kecamatan Rembang yakni 9.159 ha, Karangreja (7.449 ha) dan Karangmoncol (6.027 ha). Adapun kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Purbalingga, Padamara dan Kalimanah yakni 1.472 ha, 1.727 ha dan 2.251 ha (BPS Kabupaten Purbalingga, 2017).

2.2 Visi Misi Kabupaten Purbalingga

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 merupakan Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan Kepala Daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap III RPJPD Kabupaten Purbalingga. Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 adalah “PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”.

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan

Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun kebutuhan yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga

mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah disusun pula Misi Purbalingga yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Misi sebagai gambaran visi yang ingin dicapai dalam RPJMD 2021-2026 dirumuskan dalam tujuh poin sebagai berikut:

1. Misi 1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.
2. Misi 2 : Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.
3. Misi 3 : Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan Dan Papan Secara Layak.
4. Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
5. Misi ke-5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada

kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.

6. Misi ke-6 : Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Misi ke-7 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

(http://sipd.bangda.kemendagri.go.id/dokumen/uploads/visimisi_22_9_2016.pdf)

2.3 Kondisi Pembangunan Manusia dan Gender Di Kabupaten

Purbalingga

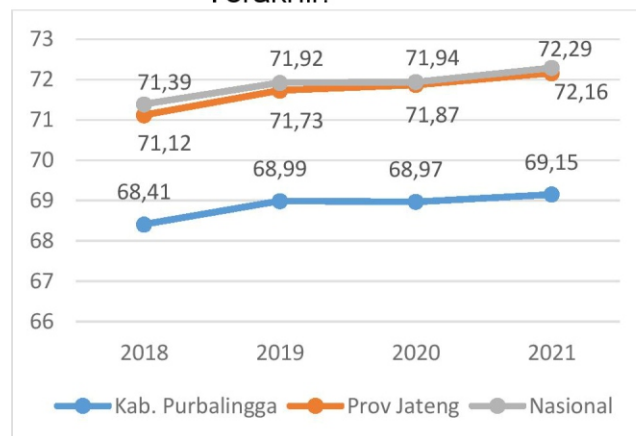
2.3.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Purbalingga

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih menjadi salah satu indikator untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan di Daerah. Selain itu IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM dapat diukur dari pembangunan di 3 (tiga) sektor yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang merupakan komponen dasar kualitas hidup manusia. Ketiga sektor tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur tingkatan kesehatan,

digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur tingkatan pendidikan/pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur tingkatan hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM Kabupaten Purbalingga dengan menggunakan metode baru 4 tahun terakhir cenderung stabil belum ada peningkatan yang signifikan. Tahun 2018 IPM Kabupaten Purbalingga 68,41 tahun 2019 IPM ada sedikit kenaikan yaitu 68,99, di tahun 2020 IPM sebesar 68,97 dan tahun 2021 kembali naik diangka 69,15. Dan selama 4 tahun terakhir IPM Kabupaten Purbalingga masih di bawah IPM Provinsi maupun IPM nasional.

Gambar 2.1 Perbandingan IPM Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dalam Empat Tahun Terakhir.

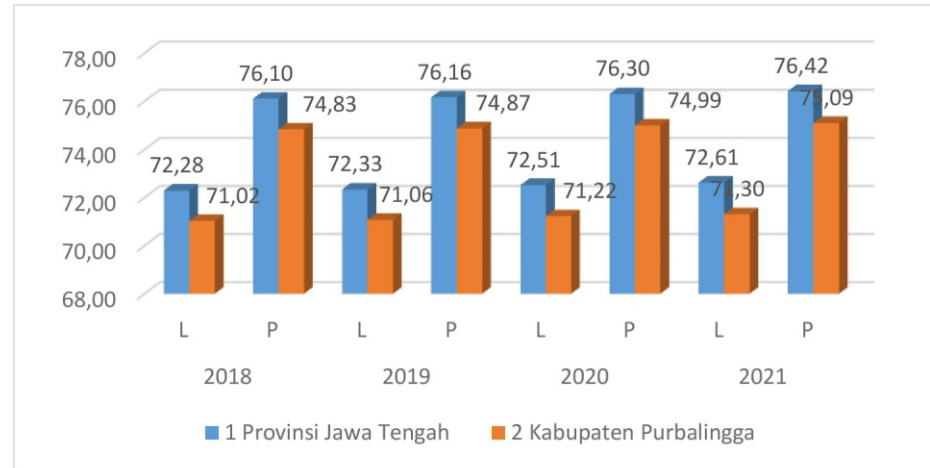


Sumber : Data BPS 2021

a. Usia Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Ukuran yang umum digunakan adalah Umur Harapan Hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan UHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir. UHH Kabupaten Purbalingga 4 tahun terakhir mengalami kenaikan akan tetapi masih di bawah UHH Provinsi Jawa Tengah. Di Kabupaten Purbalingga dalam 4 tahun terakhir UHH perempuan masih di atas UHH Laki – Laki. Trend UHH perempuan lebih tinggi dibanding laki – laki tidak hanya di Kabupaten Purbalingga akan tetapi juga menjadi trend nasional. Pada tahun 2018 UHH laki - laki sebesar 71,02 dan Perempuan 74,83 di tahun 2019 UHH laki – laki 71,06 dan perempuan 74,87 di tahun 2020 UHH laki – laki 71,22 dan perempuan 74,99 dan untuk tahun 2021 UHH laki – laki 71,30 dan perempuan 75,09.

Gambar 2.2 Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah dalam Empat Tahun Terakhir.



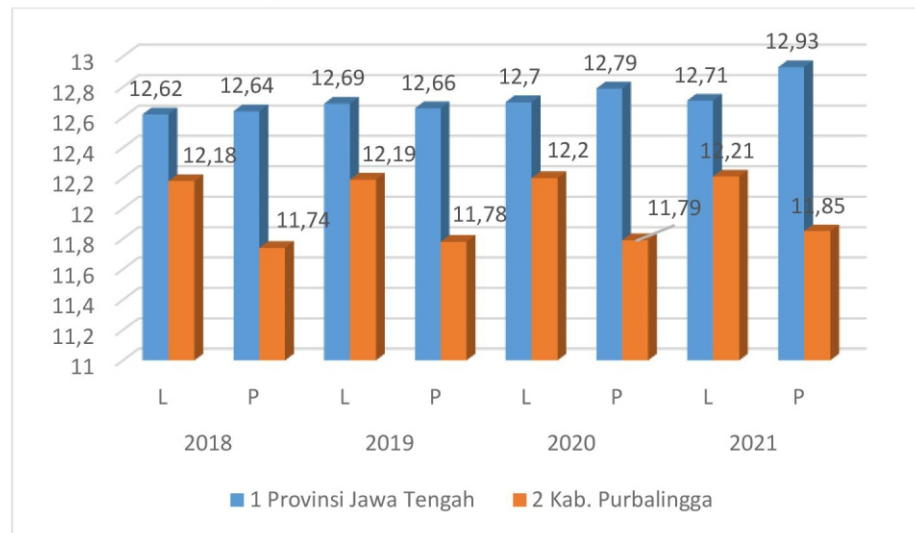
Sumber : Data BPS 2021.

b. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Capaian HLS di Kabupaten Purbalingga dalam 4 (empat) tahun terakhir mengalami kenaikan baik laki – laki maupun perempuan, dan HLS laki – laki masih di atas HLS perempuan. Capaian Angka HLS untuk laki – laki di Kabupaten Purbalingga dalam 4 tahun terakhir cenderung stabil karena hanya mengalami sedikit kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 yaitu 12,18, ditahun 2019 naik menjadi 12,19, ditahun 2020

menjadi 12,20 dan tahun 2021 menjadi 12,21. Sementara untuk angka HLS perempuan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 adalah 11,74, pada tahun 2019 naik menjadi 11,78, tahun 2020 menjadi 11,79 dan tahun 2021 menjadi 11,85. Untuk HLS Kabupaten Purbalingga masih di bawah HLS Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.3 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah dalam Empat Tahun Terakhir.



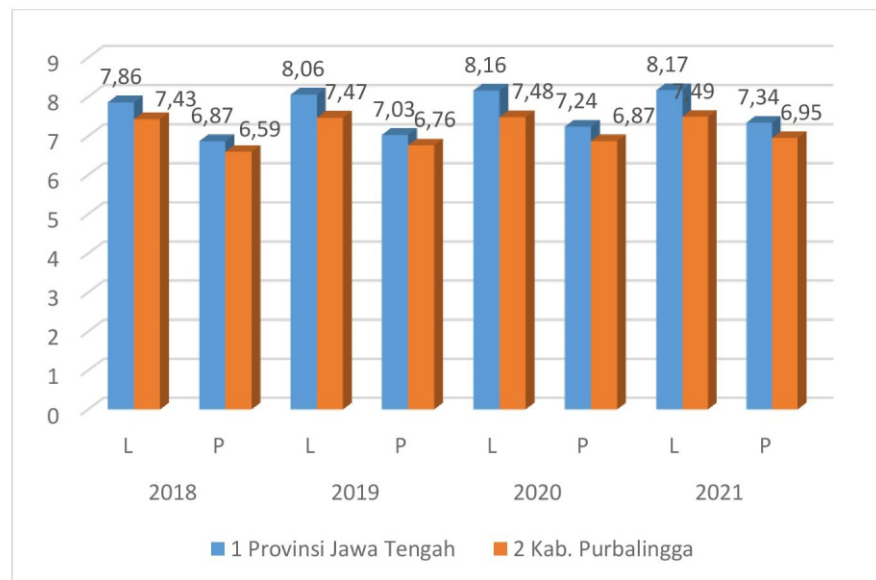
Sumber : Data BPS 2021.

c. Angka Rata – Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka Rata-rata Lama Sekolah bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal. Capaian Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten

Purbalingga dalam 4 tahun terakhir mengalami peningkatan baik dari RLS laki – laki maupun RLS perempuan. Pada tahun 2018 Angka RLS di Kabupaten Purbalingga untuk laki – laki 7,43 dan perempuan 6,59, pada tahun 2019 Angka RLS laki – laki 7,47 dan Angka LS 6,76, pada tahun 2020 Angka RLS laki – laki 7,48 dan perempuan 6,87, dan untuk tahun 2021 Angka RSL laki – laki 7,49 dan perempuan 6,95 . Walaupun mengalami kenaikan dalam empat tahun terakhir akan tetapi angka RLS Kabupaten Purbalingga masih di bawah Angka RLS Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.4 Perbandingan Angka Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah dalam Empat Tahun Terakhir.

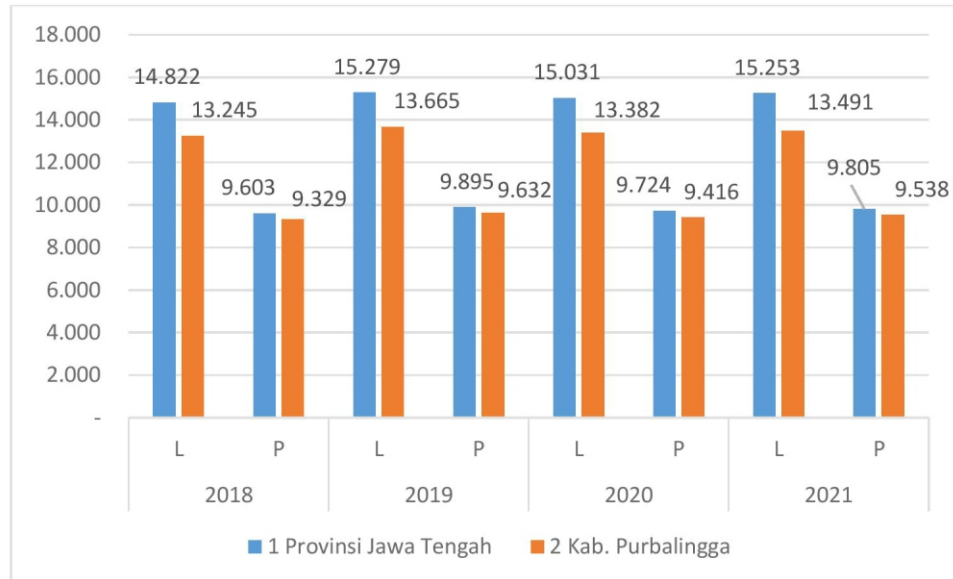


Sumber : Data BPS 2021.

d. Pengeluaran Per Kapita.

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi baik makanan maupun non makanan semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran Perkapita Kabupaten Purbalingga untuk 4 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai tahun 2021 mengalami sedikit naik turun. Pengeluaran perkapita Kabupaten Purbalingga tahun 2018 untuk laki – laki sebesar Rp 13.245.000,- dan perempuan Rp 9.329.000,- , tahun 2019 pengeluaran perkapita laki – laki sebesar Rp 13.665.000,- dan perempuan Rp 9.632.000,-, tahun 2020 pengeluaran perkapita laki – laki Rp 13.382.000,- dan perempuan Rp 9.416.000,- dan tahun 2021 pengeluaran perkapita laki – laki di Kabupaten Purbalingga sebesar Rp 13.491.000,- dan pengeluaran perkapita perempuan sebesar Rp 9.538.000,-. Untuk pengeluaran perkapita laki – laki di Kabupaten Purbalingga dalam empat tahun terakhir masih jauh dibawah angka pengeluaran perkapita laki – laki Provinsi Jawa Tengah sementara untuk pengeluaran perkapita perempuan walaupun masih dibawah angka Provinsi Jawa Tengah akan tetapi angkanya tersebut masihimbang.

Gambar 2.5 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah dalam Empat Tahun Terakhir dalam Ribuan.



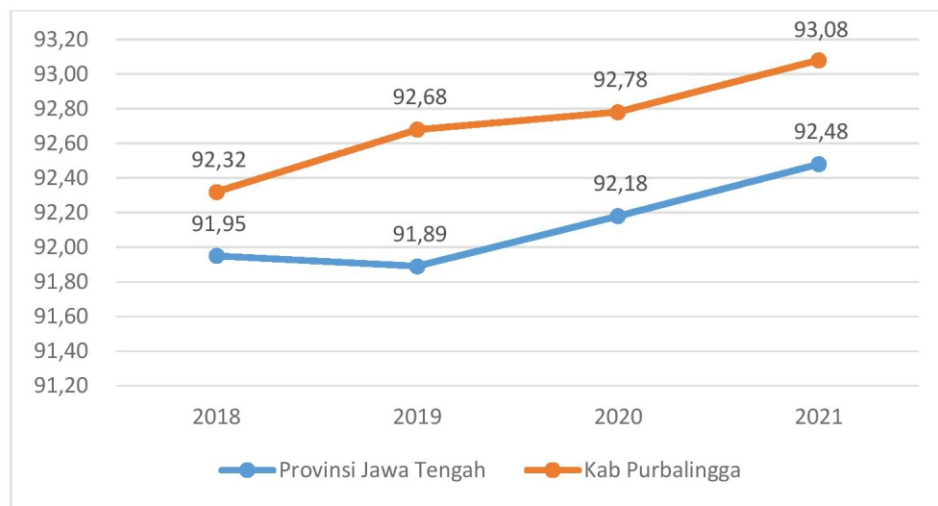
Sumber : BPS 2021

2.3.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Purbalingga

Kesenjangan gender secara statistik ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dari perspektif gender. Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender di Purbalingga mengalami tren naik selama tiga tahun terakhir. Untuk tahun 2018 IPG Kabupaten Purbalingga 92,32 tahun 2019 menjadi 92,68, tahun 2020 sebesar 92,78 dan tahun 2021 kembali naik

menjadi 93,08. Selain tren kenaikan selama empat tahun terakhir IPG Kabupaten Purbalingga selama empat tahun terakhir juga selalu di atas IPG Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2.6 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah dalam Empat Tahun Terakhir.



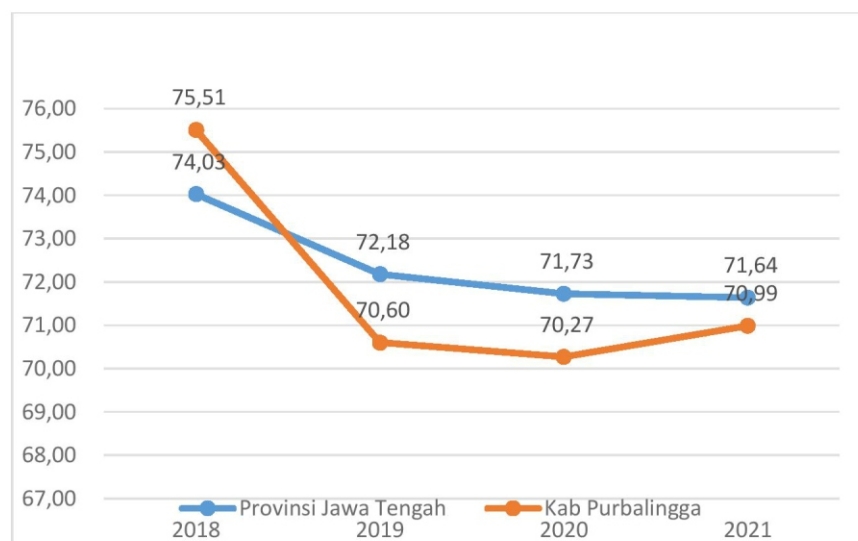
Sumber : BPS 2021

2.3.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Purbalingga

Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta presentase

laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan. Capaian IDG di Kabupaten Purbalingga tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan setelah dalam tiga tahun mengalami trend penurunan yaitu dari 75,51 di tahun 2018 menjadi 70,60 di tahun 2019 kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan lagi menjadi 70,27 dan di tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 70,99. Di tahun 2018 IDG Kabupaten Purbalingga di atas IDG Provinsi Jawa Tengah akan tetapi seiring penurunan IDG di tahun 2019 dan tahun 2020 maka IDG Kabupaten Purbalingga di bawah IDG Provinsi Jawa Tengah. Penurunan ini dimungkinkan turunnya Tingkat Partisipasi di Parlemen yang semula sejumlah 31,11 persen menjadi 22,22 persen.

Gambar 2.7 Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah dalam Empat Tahun Terakhir.



Sumber: BPS 2021

BAB III

DATA GENDER DAN ANAK BIDANG KEPENDUDUKAN DAN SIPIL

3.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Hasil proyeksi penduduk Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa jumlah penduduk Purbalingga tahun 2021 adalah sebanyak 1.021.920 jiwa dengan komposisi jenis kelamin yakni 518.293 jiwa penduduk laki-laki dan 503.627 jiwa penduduk perempuan (DISPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga; per 31 Desember 2021). Dengan demikian persentase penduduk laki laki lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk Perempuan yakni 50,72 persen sedangkan persentase penduduk perempuan 49,28 persen. Apabila diukur dengan rasio jenis kelamin, besarnya adalah 1,03. Rasio tertinggi adalah di Kecamatan Karangjambu (1,08), disusul dengan Kecamatan Karanganyar (1,06), dan Kecamatan Rembang (1,06) (DISPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga; per 31 Desember 2021). Kondisi ini ditampilkan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No	Kecamatan	Jenis Kelamin					
		Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah	Rasio
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kemangkon	32.725	50,20	32.466	49,80	65.191	1,01
2	Bukateja	40.456	50,47	39.698	49,53	80.154	1,02
3	Kejobong	26.447	50,37	26.056	49,63	52.503	1,02
4	Kaligondang	34.031	50,45	33.429	49,55	67.460	1,02

5	Purbalingga	29.019	49,58	29.510	50,42	58.529	0,98
6	Kalimanah	28.928	50,37	28.499	49,63	57.427	1,02
7	Kutasari	34.020	50,91	32.801	49,09	66.821	1,04
8	Mrebet	40.754	50,94	39.257	49,06	80.011	1,04
9	Bobotsari	27.814	50,59	27.163	49,41	54.977	1,02
10	Karangreja	24.103	51,04	23.125	48,96	47.228	1,04
11	Karanganyar	21.592	51,49	20.339	48,51	41.931	1,06
12	Karangmoncol	30.822	51,32	29.242	48,68	60.064	1,05
13	Rembang	36.093	51,38	34.152	48,62	70.245	1,06
14	Bojongsari	32.721	50,98	31.468	49,02	64.189	1,04
15	Padamara	23.129	50,28	22.873	49,72	46.002	1,01
16	Pengadegan	21.137	50,29	20.892	49,71	42.029	1,01
17	Karangjambu	14.877	51,81	13.835	48,19	28.712	1,08
18	Kertanegara	19.625	51,04	18.822	48,96	38.447	1,04
Jumlah		518.293	518.293	50,72	503.627	49,28	1,03

Sumber : DISPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga 2021; per 31 Des 2021

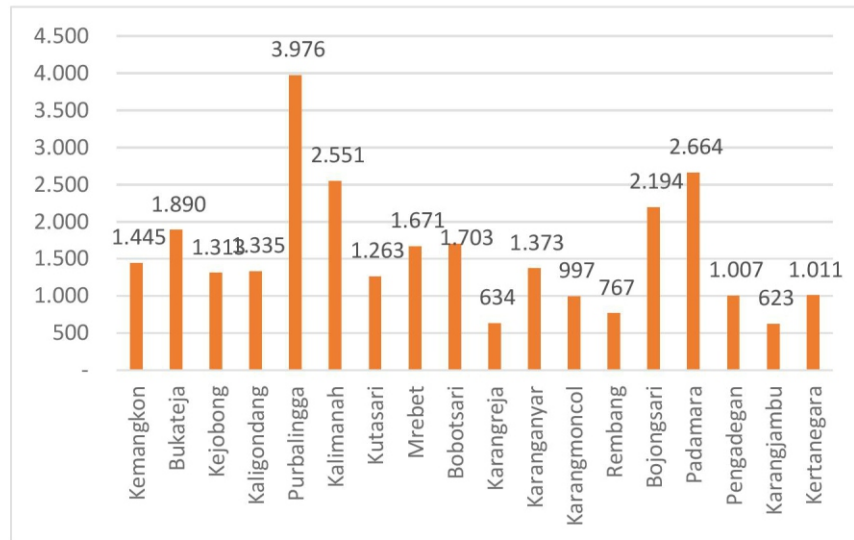
Kepadatan penduduk Kabupaten Purbalingga adalah sebesar 1.314 orang per kilometer persegi. Wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Purbalingga yakni sebesar 3.976 orang per kilometer persegi. Hal ini dimungkinkan karena kecamatan ini adalah ibu kota kabupaten dengan tingkat keramaian tinggi dan ketersediaan fasilitas yang lengkap. Wilayah padat lainnya adalah Kecamatan Padamara (2.664) dan Kalimanah (2.551). Adapun tingkat kepadatan terendah ada di Kecamatan Karangjambu (623) dan Karangreja (634). Hal ini dimungkinkan karena lokasinya yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten. Data tentang hal ini ditampilkan pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No	Kecamatan	JML Penduduk	Luas Wilayah (km)	Kepadatan Penduduk per km2
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kemangkon	65.191	45,13	1.445
2	Bukateja	80.154	42,4	1.890
3	Kejobong	52.503	39,98	1.313
4	Kaligondang	67.460	50,54	1.335
5	Purbalingga	58.529	14,72	3.976
6	Kalimanah	57.427	22,51	2.551
7	Kutasari	66.821	52,9	1.263
8	Mrebet	80.011	47,89	1.671
9	Bobotsari	54.977	32,28	1.703
10	Karangreja	47.228	74,49	634
11	Karanganyar	41.931	30,55	1.373
12	Karangmoncol	60.064	60,27	997
13	Rembang	70.245	91,59	767
14	Bojongsari	64.189	29,25	2.194
15	Padamara	46.002	17,27	2.664
16	Pengadegan	42.029	41,75	1.007
17	Karangjambu	28.712	46,09	623
18	Kertanegara	38.447	38,03	1.011
JUMLAH		1.021.920	777,64	1.314

Sumber: DISPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga 2021; per 31 Des 2021

Gambar 3.1 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Purbalingga Per Kecamatan Tahun 2021



3.2 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Dilihat dari kelompok umur, secara keseluruhan persentase terbanyak penduduk laki-laki dan perempuan untuk usia produktif adalah pada kelompok umur 10 - 14 tahun ke atas yakni sebesar 8,24 persen. Persentase terbanyak kedua adalah pada kelompok umur 5-9 tahun yakni 8,04 persen yang disusul dengan kelompok umur 35-39 tahun sebesar 7,91 persen. Adapun jumlah penduduk yang paling sedikit adalah pada kelompok umur 60-64 tahun yakni sebesar 4,32 persen.

Sementara itu, apabila dibandingkan jumlah laki-laki dan perempuan, hampir semua kelompok umur lebih banyak penduduk laki-laki meski perbedaannya tidak terlalu signifikan. Jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari perempuan hanya pada kelompok umur 50 tahun

ke atas. Adapun pada kelompok-kelompok umur lainnya, jumlah laki – laki lebih banyak dari pada perempuan.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No	Kelompok Umur	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	0-4	38.441	51,78	35.803	48,22	74.244	7,27
2	5-9	42.363	51,54	39.837	48,46	82.200	8,04
3	10-14	43.633	51,80	40.607	48,20	84.240	8,24
4	15-19	36.916	50,97	35.508	49,03	72.424	7,09
5	20-24	41.788	51,24	39.769	48,76	81.557	7,98
6	25-29	40.559	51,28	38.534	48,72	79.093	7,74
7	30-34	37.379	51,34	35.429	48,66	72.808	7,12
8	35-39	41.150	50,90	39.698	49,10	80.848	7,91
9	40-44	38.777	50,82	37.530	49,18	76.307	7,47
10	45-49	35.857	50,17	35.610	49,83	71.467	6,99
11	50-54	30.949	49,73	31.288	50,27	62.237	6,09
12	55-59	26.488	48,35	28.296	51,65	54.784	5,36
13	60-64	21.716	49,14	22.478	50,86	44.194	4,32
14	65 +	42.277	49,44	43.240	50,56	85.517	8,37
Jumlah		518.293	50,71	503.627	49,29	1.021.920	100,00

Sumber: DISPENDUKAPIL Kabupaten Purbalingga 2021; per 31 Des 2021

3.3 Rasio Ketergantungan Penduduk

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan ini dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan

ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Misal rasio ketergantungan adalah sebesar 54,7 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 55 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi (BPS, <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=95>).

Di Kabupaten Purbalingga, jumlah penduduk bukan angkatan kerja pada tahun 2021 adalah hampir sepertiga dari total penduduk (31,92 persen). Kebanyakan dari mereka adalah penduduk usia 0 -14 tahun yang jumlahnya sebesar 23,6 persen dan usia diatas 65 tahun sebanyak 8,4 persen dari total penduduk. Dengan demikian, rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Purbalingga secara keseluruhan adalah 46,88 yang artinya setiap 100 orang penduduk yang produktif (diasumsikan bekerja) mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang belum/tidak produktif. Apabila dikaji lebih jauh, di kalangan penduduk laki-laki rasio ketergantungannya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada laki-laki rasio ketergantungannya

adalah sebesar 47,42 yang berarti 100 orang penduduk laki-laki yang produktif harus menanggung 47 penduduk laki-laki yang belum/tidak produktif. Adapun pada penduduk perempuan lebih kecil yakni 46,34 yang artinya dari 100 orang penduduk perempuan yang produktif, menanggung 46 penduduk perempuan yang belum/tidak produktif.

Tabel 3.4 Penduduk Menurut Usia Angkatan Kerja di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

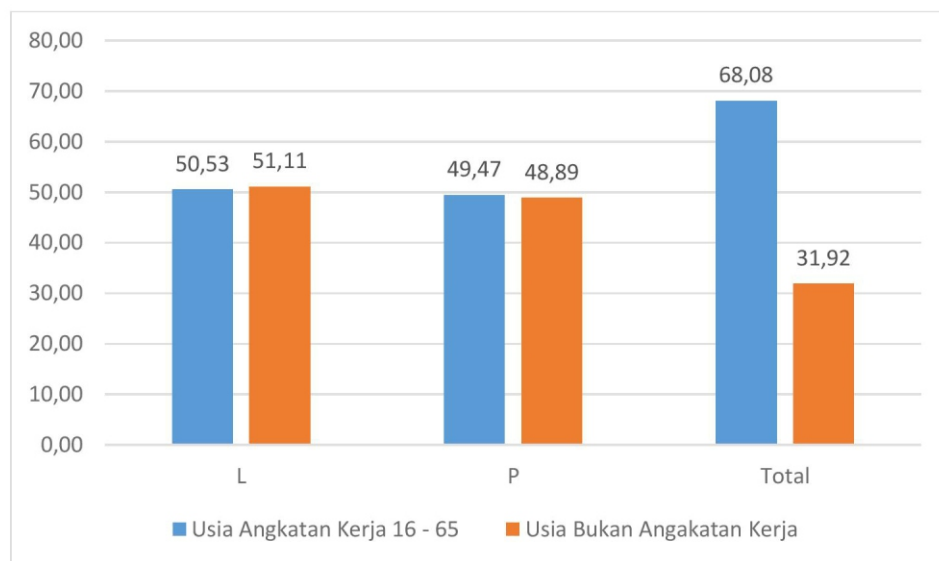
Usia	Jenis Kelamin				Jumlah	%
	Laki-laki	%	Peremp	%		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Angkatan Kerja 16 - 65	351.579	50,53	344.140	49,47	695.719	68,08
Bukan Angkatan Kerja	166.714	51,11	159.487	48,89	326.201	31,92
< 15	124.437		116.247		240.684	
65+	42.277		43.240		85.517	
Jumlah	518.293	50,72	503.627	49,28	1.021.920	100,00

Sumber : Data Olah; Dispendukcapil Kabupaten Purbalingga 2021

Dari uraian di atas dapat dirangkum bahwa penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2021 lebih banyak didominasi oleh kelompok usia produktif yaitu 68,08 persen dari jumlah penduduk. Dimana di usia produktif komposisi laki – laki dan perempuan hampir seimbang namun sedikit lebih banyak adalah laki laki 50,53 persen sedangkan perempuan 49,47 persen. Dominannya usia produktif ini menunjukkan bahwa saat ini Kabupaten Purbalingga sedang mengalami bonus demografi, yakni struktur penduduk yang jumlah usia produktifnya lebih banyak lebih banyak dibandingkan usia non-produktif, baik non-produktif muda (14 tahun ke bawah) maupun non-

produktif tua (65 tahun ke atas). Hal ini menjadi momen yang menguntungkan sepanjang dikelola melalui kebijakan, program dan kegiatan yang tepat, tidak hanya di bidang ketenagakerjaan, melainkan juga kesehatan, pendidikan serta pembinaan akhlak.

Gambar 3.2 Penduduk Menurut Usia Angkatan Kerja di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021



3.4 Struktur Penduduk Usia Anak

Yang dimaksud Anak dalam UU no 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan penduduk adalah orang yang tinggal di suatu wilayah dan secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut dengan kata lain mempunyai surat resmi untuk tinggal di daerah tersebut (<https://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk>). Untuk penduduk usia anak yaitu penduduk dengan rentang usia 0 – 18 tahun.

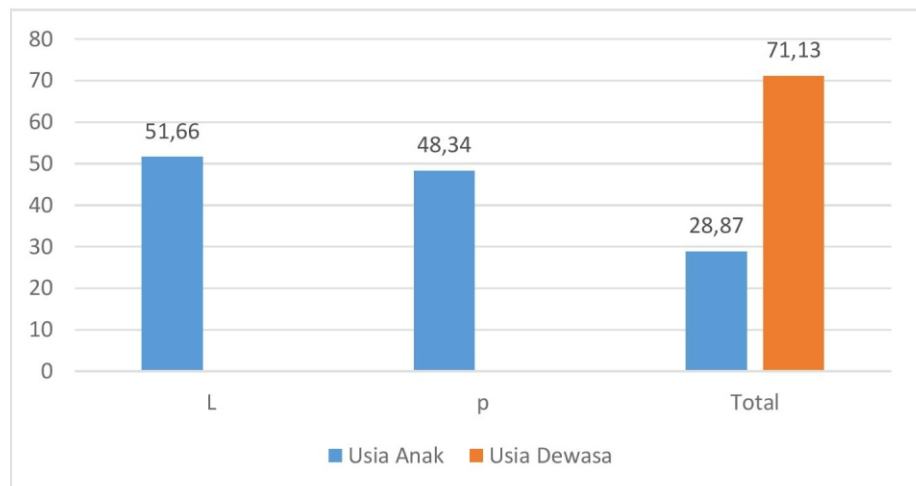
Adapun jumlah penduduk usia anak (0 -18 tahun) tahun 2021 adalah sebanyak 295.003 anak yang berarti sekitar seperempat lebih dari total penduduk (28,87 persen) hal ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga penduduk Indonesia merupakan usia anak. Jumlah ini terdiri dari 152.391 atau 51,66 persen anak laki-laki dan 142.612 anak perempuan atau 48,34 persen . Untuk penduduk usia anak komposisi laki – laki lebih tinggi dari perempuan.

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Usia Anak di Kabupaten Purbalingga tahun 2021

Usia	Jenis Kelamin				Jumlah	%
	Laki-laki	%	Perempuan	%		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Usia Anak	152.391	51,66	142.612	48,34	295.003	28,87
Usia Dewasa	365.902	50,34	361.015	49,66	726.917	71,13
Jumlah	518.293		503.627		1.021.920	

Sumber : Data Olah; Dispendukcapil Kabupaten Purbalingga 2021

Gambar 3.3 Struktur Penduduk Usia Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021



3.5 Kepemilikan Akta Kelahiran

Kepemilikan akta kelahiran bagi anak merupakan implementasi salah satu hak anak yaitu hak sipil. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 5, yaitu “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan” dan pasal 27 ayat 1 yaitu “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya,” ayat 2 identitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. Lebih lanjut akte kelahiran tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap warga negaranya. Peraturan ini selaras dengan pasal 9 konfensi PBB mengenai hak anak yang menetapkan bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan juga harus mempunyai nama serta kewarganegaraan

Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau membantu proses kelahiran. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orangtuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian. Berikut ini ditampilkan kata kepemilikan Akta Kelahiran tahun 2021 dan kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0 – 18 tahun.

Kepemilikan akta kelahiran pada usia anak sebesar 89,14 persen. Secara persebaran prosentase kepemilikan akta kelahiran

pada usia anak hampir merata di seluruh kecamatan. Kecamatan Kutasari menempati posisi tertinggi yakni 94,29 persen dari jumlah penduduk usia anak di Kecamatan Kutasari, dan terendah di Kecamatan Kertanegara sebesar 82,87 persen.

Tabel 3.6 Kepemilikan Akta Kelahiran pada Usia Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2021

Keterangan	JML Anak	JML Kepemilikan AKTA	Cakupan Kepemilikan (%)
-1	-2	-3	-4
Cakupan Kepemilikan Akta	295.003	262.952	89,14

Sumber : Data Olah; Dispendukcapil Kabupaten Purbalingga 2021

3.6 Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (KIA) digagas oleh Pemerintah pada tahun 2016, dan dilaksanakan secara bertahap. Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kartu identitas resmi anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Penerbitan KIA oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil. Setelah seorang anak dilahirkan selain harus mengurus akta kelahiran juga KIA. KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik. Ada dua jenis KIA, yaitu untuk usia anak 0 sampai 5 tahun dan kelompok usia 5 -17 tahun. Bedanya, untuk KIA 0 - 5 tahun tanpa menggunakan foto. Sementara KIA usia 5 -17 tahun kurang satu hari

memakai foto. Kegunaan Kartu Identitas Anak di antaranya untuk memenuhi hak anak, persyaratan mendaftar sekolah, bukti diri anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di bank, juga proses mendaftar BPJS Kesehatan.

(<https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/cara-membuat-ktp-anak-atau-kartu-identitas-anak-kia>)

Untuk cakupan kepemilikan KIA tahun 2021 sebesar 42,31 persen dari jumlah total anak. Dimana rasio kepemilikan KIA untuk anak perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki.

Tabel 3.7 Kepemilikan Kartu Identitas Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2021.

Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
-1	-2	-3	-5
Usia Anak	152.391	142.612	295.003
Jumlah Kepemilikan KIA	63.728	61.077	124.805
Cakupan KIA (%)	41,82	42,83	42,31

Sumber : Dispendukcapil Kab Purbalingga 2021

BAB IV

DATA GENDER DAN ANAK BIDANG KESEHATAN

Salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah tingkat kualitas kesehatan suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu daerah yang berdampak pada peningkatan produktivitas penduduk. Oleh karena itu, investasi sumber daya manusia bidang kesehatan perlu terus mendapat perhatian besar baik dari pemerintah dan masyarakat, dan usaha yang dilakukan harus berkesinambungan.

Mengkaji derajat kesehatan biasanya dimulai dengan melihat angka kesakitan, kematian, angka harapan hidup, dan sebagainya. Kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang kesehatan sangat terkait dengan terciptanya kesetaraan dalam bidang pelayanan kesehatan dan program kesehatan. Kondisi kesehatan perempuan penting untuk dikaji disebabkan oleh peran kodrati mereka yakni melahirkan dan menyusui yang akan menentukan kualitas generasi berikutnya. Bila ibu sehat, maka akan melahirkan bayi yang sehat pula. Kesehatan perempuan dapat diukur berdasarkan kualitas fisik perempuan melalui indikator kematian ibu melahirkan, penolong persalinan, kunjungan ibu hamil (K1/K4) ke sarana pelayanan kesehatan, imunisasi TT pada ibu hamil, ibu hamil yang mendapat tablet Zat Besi (Fe).

4.1 Data Kesehatan Ibu

4.1.1 Gambaran Kondisi Kehamilan

Kondisi pada saat hamil sangat mempengaruhi kualitas kesehatan bayi yang akan dilahirkan. Untuk itu banyak program program pemerintah di bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ibu hamil sehingga dapat menekan AKI dan AKB. Di tahun 2021 jumlah ibu hamil di Kabupaten Purbalingga sebanyak 14.596 orang, menurun dari tahun 2020 dimana pada tahun tersebut terdapat 15.914 ibu hamil. Dari jumlah 14.596 ibu hamil di tahun 2021, masih terdapat 2.919 atau 20 persen yang diperkirakan mengalami komplikasi atau Resiko Tinggi (Resti).

Ibu hamil resiko tinggi merupakan suatu masa dimana ibu tersebut dapat mengalami berbagai resiko ketika hamil yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor - faktor yang seringkali menjadi suatu penyebab utama resiko tinggi yang sering kita dengar dengan istilah 4 T yaitu usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua saat hamil, jarak kehamilan yang terlalu dekat dan kehamilan yang terlalu banyak (sering), faktor lainnya yaitu memiliki riwayat kelainan saat melakukan persalinan atau pada masa kehamilan dan juga kondisi kesehatan ibu. Pada masa kehamilan yang berhubungan dengan ibu hamil resiko tinggi tidak hanya berdampak buruk pada sang ibu saja, akan tetapi juga berdampak buruk bagi si calon bayi yang dikandungnya (Idtesis.com).

Agar proses kelahiran dapat berjalan lancar dan selamat baik bagi ibu maupun bayinya, maka keadaan kehamilan ibu harus selalu dipantau melalui pemeriksaan berkala minimal 4 kali dengan ketentuan:

- a. Satu kali kunjungan pada trimester pertama.
- b. Satu kali kunjungan pada trimester kedua.
- c. Dua kali kunjungan pada trimester ketiga.

Penetapan standar 10 T yaitu Timbang Berat Badan dan Ukur Tinggi Badan, Pemeriksaan Tekanan Darah, Pemeriksaan Tinggi Fundus Uteri (Puncak Uteri), Skrining Status Imunisasi Tetanus dan Pemberian Imunisasi Tetanus Toksoid (TT), Pemberian Tablet Zat Besi, Tetapkan Status Gizi, Tes Laboratorium (Rutin dan Khusus), Tentukan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ), Tatalaksana Kasus, Temu Wicara Persiapan Rujukan, harus dipenuhi dengan minimal 4 kali kunjungan masa kehamilan. Berdasarkan keteraturan kunjungan ibu hamil ini, cakupan pelayanan antenatal dapat dievaluasi yang dikenal dengan K1 dan K4. Dalam upaya menekan AKI dan AKB Dinas Kesehatan mengadakan Program Kelas Ibu Hamil di setiap Polindes yang diperuntukan ibu hamil dan pendamping (suami atau orang tua ibu hamil) dan diadakan secara berkala. Gambaran kehamilan di Kabupaten Purbalingga tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Kondisi Ibu Hamil di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No	Bidang/Indikator	Jumlah	%
1.	Jumlah Ibu Hamil	14.596	
2.	Jumlah Ibu Hamil Resiko Tinggi (RESTI)	2.919	20,00
3.	Presentase Ibu Hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah	13.540	92,77
4.	Presentase Ibu Hamil yang mendapat Imunisasi TT	8.487	58,15
5.	Jumlah Ibu Hamil melakukan K1	14.596	100,00
6.	Jumlah Ibu Hamil melakukan K4	13.814	94,64
7.	Angka Kematian Ibu (AKI)	191,60	
8.	Jumlah Kasus Kematian Ibu Hamil	18	0,12
9.	Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan	3	0,02
10.	Jumlah Kasus Kematian Ibu Nifas	6	0,04
11.	Jumlah Persalinan yang ditolong Nakes	14.058	99,73
12.	Jumlah Persalinan yang ditolong non Nakes	38	0,27

Sumber : Dinas Kesehatan Purbalingga 2021

4.1.2 Angka Kematian Ibu (AKI)

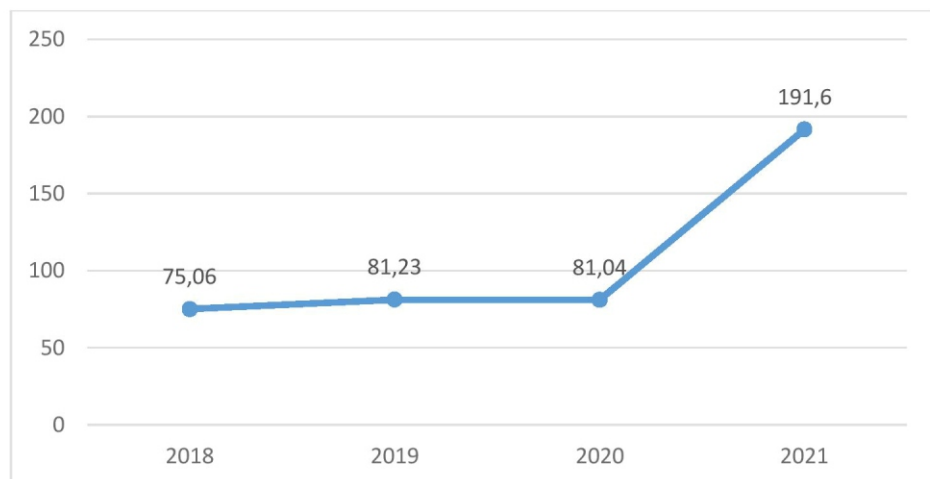
Angka Kematian Ibu tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga yaitu 191,60 per 100.000 kelahiran hidup dengan 27 kasus kematian ibu yang terinci di kematian ibu hamil ada 18 kasus, kematian ibu bersalin 3 kasus dan kematian ibu nifas 6 kasus. Adapun penyebab kematian ibu yaitu hipertensi masa kehamilan 3 orang dan 24 orang karena penyebab lain – lain seperti mengidap penyakit bawaan. Angka Kematian Ibu Tahun 2021 naik cukup signifikan dari tahun 2021 yaitu dari 81,04 ditahun 2020 menjadi 191,60 ditahun 2021 hal ini dikarenakan pandemic covid-19.

Tabel 4.2 Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Purbalingga dalam Empat Tahun Terakhir.

No	Keterangan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Kasus Kematian	11	12	12	27
	Ibu Hamil	2	4	6	18
	Ibu Melahirkan	5	4	4	3
	Ibu Nifas	4	4	2	6
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	75,06	81,23	81,04	191,60

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Purbalingga 2018, 2019, 2020 dan 2021

Gambar 4.1 Angka Kematian Ibu di Kabupaten dalam Empat Tahun Terakhir



4.1.3 Pelayanan Kesehatan Ibu

a. Pelayanan Antenatal

Pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan profesional (dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan, dokter umum, bidan dan perawat) kepada ibu hamil selama masa kehamilannya. K1 atau juga disebut akses pelayanan ibu hamil merupakan gambaran besaran ibu hamil

yang telah melakukan kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal. Sedangkan K4 adalah gambaran besaran ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar paling sedikit empat kali kunjungan (sekali pada trimester pertama, sekali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga). Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kualitas pelayanan ibu hamil. Berikut ini hasil pelayanan antenatal yang tergambar dalam cakupan pelayanan K1 dan K4 di Kabupaten Purbalingga dalam 4 tahun terakhir.

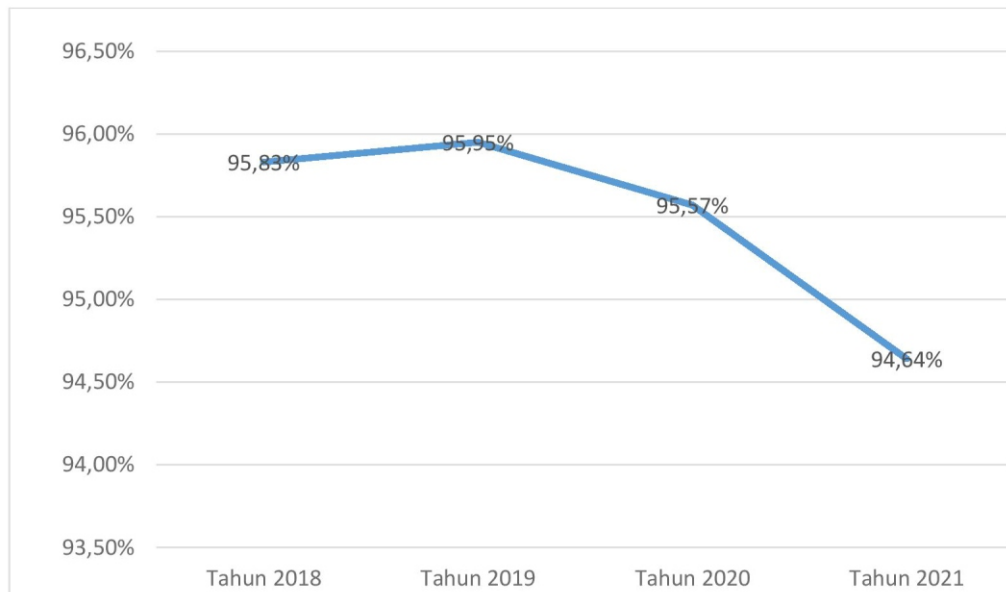
Tabel 4.3 Kunjungan Ibu Hamil Kabupaten Purbalingga Dalam Empat tahun Terakhir

TAHUN	JUMLAH IBU HAMIL				
	JUMLAH	K1		K4	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%
2018	16,224	16,224	100.00	15,547	95.83
2019	16,353	16,353	100.00	15,691	95.95
2020	15,914	15,914	100.00	15,209	95.57
2021	14,596	14,596	100.00	13,814	94.64

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Purbalingga 2018, 2019, 2020 dan 2021

Cakupan K1 ibu hamil di Kabupaten Purbalingga dalam 4 tahun terakhir sudah mencapai 100 persen. Sedangkan Cakupan K4 di Kabupaten Purbalingga dalam 4 tahun sedikit naik turun akan tetapi masih cenderung stabil dan di tahun 2021 menurun hal ini kemungkinan dikarenakan adanya pandemi dan PPKM.

Gambar 4.2. Cakupan Kunjungan K4 Ibu Hamil Empat Tahun Terakhir.



b. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dengan Kompetensi Kebidanan

Komplikasi dan kematian maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa di sekitar persalinan. Hal ini disebabkan pertolongan persalinan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan. Salah satu cara untuk menurunkan jumlah kematian ibu melahirkan adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal. Proses persalinan ini diyakini akan berpengaruh terhadap pengurangan kematian bayi dan kematian ibu yang sedang melahirkan, dimana pemerintah mengupayakan agar para ibu hamil dapat melahirkan dengan selamat, demikian pula bayi yang dilahirkan dapat terlahir dengan

sehat. Untuk itu pemerintah terus berupaya agar tenaga kesehatan tersebar sampai ke seluruh pelosok daerah. Berikut data pertolongan persalinan oleh nakes Kabupaten Purbalingga dalam 4 tahun terakhir.

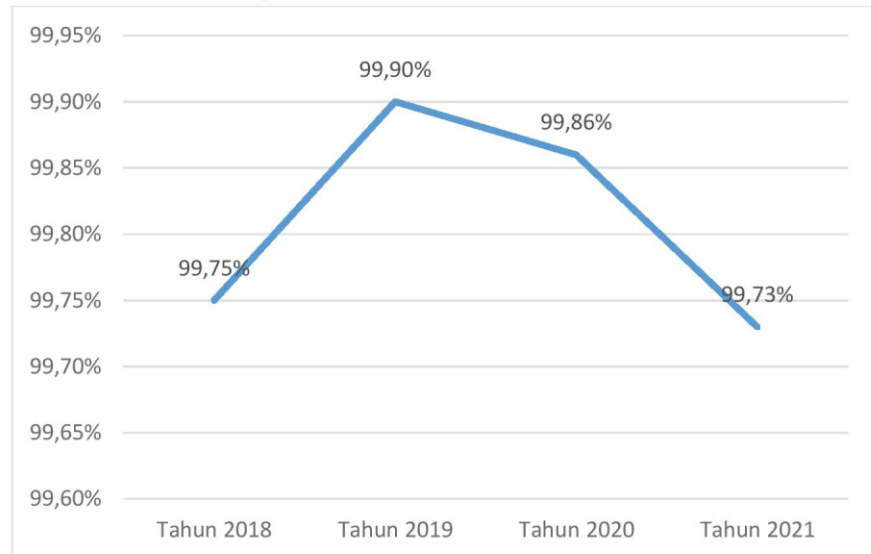
Tabel 4.4 Persalinan Ditolong oleh NAKES di Kabupaten Purbalingga Dalam Empat Tahun Terakhir

TAHUN	JUMLAH PERSALINAN	PERSALINAN DI TOLONG OLEH NAKES	
		JUMLAH	%
2018	14.670	14.633	99.75
2019	14.781	14.761	99.90
2020	14.805	14.785	99,86
2021	14,096	14.058	99,73

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Purbalingga 2018, 2020, 2021 dan 2021

Cakupan persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebanyak 99,73 persen mengalami sedikit penurunan dari tahun 2020 yaitu dari 99,86 persen menjadi 99.73 persen. Jika dilihat perwilayah untuk kecamatan dengan cakupan rendah merupakan wilayah dengan kondisi geografi pegunungan.

Gambar 4.3. Cakupan Persalinan dibantu Oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Purbalingga dalam Empat Tahun Terakhir



Untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan, dilaksanakan pelatihan untuk tenaga Bidan seperti: pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), Pelatihan Penanganan Gawat Darurat Obstetrik dan Neonatal (PPGDON), manajemen asfiksia bayi baru lahir, manajemen bayi dengan berat lahir rendah, dll.

c. Pelayanan Ibu Nifas

Kunjungan ibu nifas merupakan salah satu upaya menurunkan angka kematian ibu melahirkan, kunjungan ibu nifas atau yang sering disebut dengan istilah KF. Berdasarkan Frekuensi KF dibagi menjadi KF1 yaitu kunjungan 6 jam – 48 Jam, KF2 kunjungan 4 hari – 28 hari, dan KF 3 hari 29 hari – 42 hari. Tujuan dari kunjungan ibu nifas yaitu untuk memantau kesehatan ibu nifas dan memberi bimbingan konseling. Adapun gambaran

ibu nifas yang mendapatkan kunjungan sampai dengan KF3 sebagai berikut:

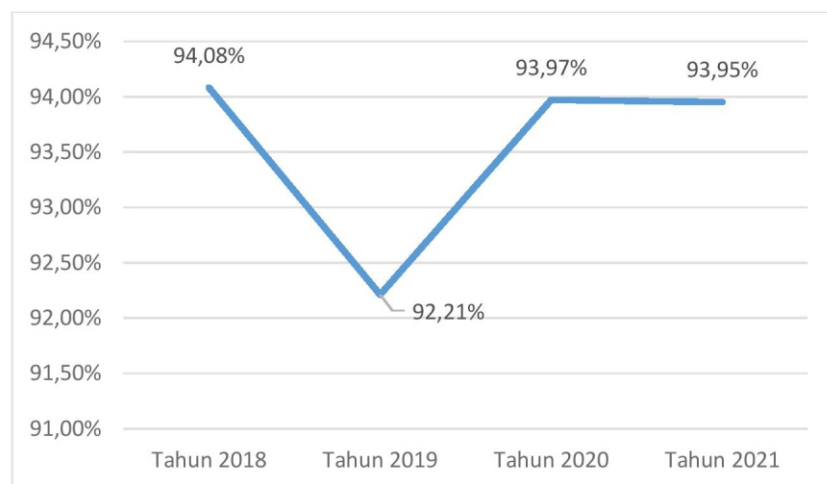
Tabel 4.5 Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten Purbalingga dalam Empat Tahun Terakhir

TAHUN	JUMLAH PERSALINAN	IBU NIFAS MENDAPATKAN PELAYANAN S/D KF3	
		JUMLAH	%
2018	14.670	13,802	94,08
2019	14.781	13.630	92,20
2020	14.805	13.912	93,97
2021	14,096	13.234	93,95

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten 2018, 2019, 2020, 2021

Tahun 2021 cakupan pelayanan ibu nifas Kabupaten Purbalingga sebesar 93,95 persen, hal ini cenderung stabil dibandingkan dari tahun sebelumnya.

Gambar 4.4 Pelayanan Ibu Nifas di Kab. Purbalingga dalam Empat Tahun Terakhir



d. Ibu Nifas Mendapat Vitamin A

Suplementasi vitamin A merupakan salah satu program pemberian kapsul vitamin A bagi usia 6 - 59 bulan dan ibu nifas.

Pemberian suplemen berupa vitamin A salah satu upaya untuk menekan AKI maupun AKB. Manfaat pemberian vitamin A untuk ibu nifas adalah selain mencegah kebutaan juga untuk mempercepat proses pemulihan saat melahirkan.

Tabel 4.6 Pemberian Vitamin A Pada Ibu Nifas di Kabupaten Purbalingga dalam Empat Tahun Terakhir.

TAHUN	JUMLAH PERSALINAN	IBU NIFAS MENDAPAT VIT A	
		JUMLAH	%
2018	14.670	14.413	98,25
2019	14.781	14.717	99,60
2020	14.805	14.627	98,80
2021	14.096	13.866	98,37

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten 2018, 2019, 2020, 2021

Cakupan ibu nifas yang mendapatkan vitamin A di Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebesar 98,37 persen. Cakupan ini walau mengalami sedikit penurunan namun masih bagus, dan dalam empat tahun terakhir pelayanan ibu nifas mendapat Vitamin A Kabupaten Purbalingga hamper mencapai 100 persen dan cenderung stabil.

Gambar 4.5. Cakupan Ibu Nifas Mendapat Vitamin A di Kabupaten Purbalingga dalam Empat Tahun Terakhir.



e. Penanganan Komplikasi Kebidanan

Dalam memberikan pelayanan khususnya oleh bidan di desa dan puskesmas, beberapa ibu hamil diantaranya tergolong dalam kasus resiko tinggi (resti) atau mengalami komplikasi kebidanan dan memerlukan pelayanan kesehatan rujukan. Selain faktor umur ibu hamil juga faktor penyakit bawaan dari ibu hamil seperti darah tinggi dan lainnya. Gambaran ibu hamil dengan resiko tinggi di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

Tabel 4.7 Jumlah dan Persentase Penanganan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Purbalingga dalam Empat Tahun Terakhir

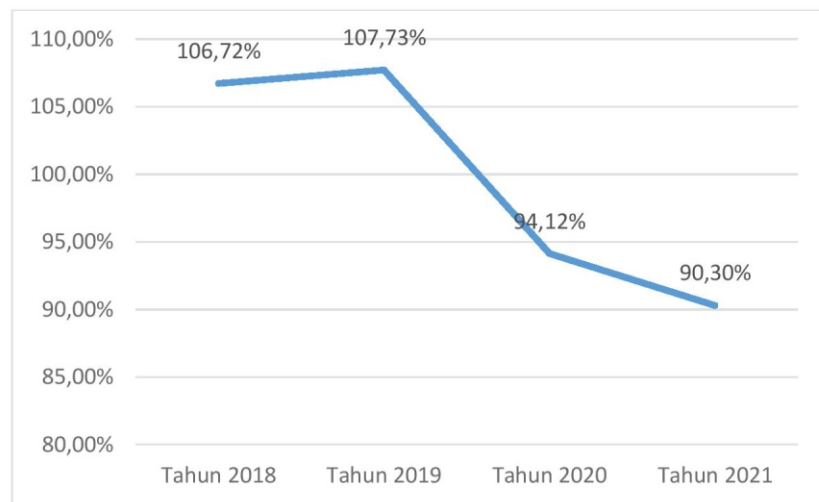
TAHUN	JUMLAH IBU HAMIL	PERKIRAAN BUMIL DENGAN KOMPLIKASI KEBIDANAN	PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN	
			JUMLAH	%
2018	16.224	3.245	3.463	106,72
2019	16.353	3.271	3.524	107,73
2020	15.914	3.182	2.995	94,12
2021	14.596	2.919	2.636	90,30

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten 2018, 2019, 2020, 2021

Perkiraan sasaran ibu hamil dengan komplikasi kebidanan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 sebanyak 2.919 kasus (20 persen dari jumlah ibu hamil), sedangkan cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang mendapatkan penanganan sebanyak 2.636 kasus (90,30 persen dari angka perkiraan). Untuk tahun ini secara prosentase penanganan komplikasi kebidanan mengalami penurunan hal ini dimungkinkan karena pandemic covid 19. Tapi pada dasarnya ibu hamil yang

mengalami komplikasi kebidanan telah mendapat penanganan semua.

Gambar 4.6. Cakupan Penanganan Komplikasi Kehamilan di Kabupaten Purbalingga dalam Empat Tahun Terakhir.



4.2 Data Kesehatan Anak

4.2.1 Gambaran Kesehatan Anak

Adapun Kesehatan anak dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya yaitu bayi yang lahir dengan berat badan rendah, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Anak (AKA) dan angka stunting anak. Untuk meningkatkan taraf kesehatan anak berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk menekan Angka Kematian Bayi yaitu dengan program pengadaan alat USG kehamilan di Puskesmas dan trainer dokter umum puskesmas untuk penggunaan dasar alat tersebut. Hal ini dikarenakan minimnya jumlah dokter spesialis kandungan di kabupaten Purbalingga dan untuk scraning

awal pada ibu hamil. Program ini dicanangkan sejak tahun 2019 dan ditahun 2021 sudah ada 4 puskesmas yang memiliki alat kesehatan USG.

a. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Berat Badan Lahir Rendah (Kurang dari 2500 gram) merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap kematian perinatal dan neonatal. BBLR dibedakan dalam 2 kategori yaitu BBLR karena premature atau BBLR karena Intrauterine Growth Retardation (IUGR), yaitu bayi lahir cukup bulan tetapi berat badanya kurang.

Bayi dengan berat badan lahir rendah di Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sejumlah 816 anak yang terdiri dari 419 bayi laki – laki dan 397 bayi perempuan, secara prosentase bayi BBLR sebesar 5,79 persen dari jumlah kelahiran hidup. Tahun 2021 BBLR mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari jumlah sebanyak 751 anak atau 5,07 persen. Seluruh kejadian BBLR yang ada ditangani 100 persen.

Tabel 4.8 Persentase Bayi BBLR di Kabupaten Purbalingga dalam Empat Tahun Terakhir

Tahun	Kelahiran hidup			BBRL					
	L	P	Total	L	%	P	%	Total	%
2018	7.549	7.107	14.656	362	4,80	401	5,64	763	5,21
2019	7.638	7.143	14.781	445	5,83	419	5,87	864	5,85
2020	7.701	7.107	14.808	392	5,09	359	5,05	751	5,07
2021	7.255	6.837	14.092	419	5,77	397	5,80	816	5,79

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021

b. Pemberian ASI Eksklusif

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan balita adalah makanan yang dikonsumsi sejak lahir. Makanan yang terbaik untuk bayi adalah Air Susu Ibu (ASI). Salah satu kandungan ASI yang paling fenomenal adalah kolostrum yang mengandung zat kekebalan (immunoglobulin), protein dan vitamin A yang tinggi. ASI memberikan manfaat bagi bayi, di antaranya adalah berupa nutrisi dan enzim dan zat-zat imun yang terbaik yang sangat dibutuhkan. Di samping itu juga perlindungan dan kehangatan melalui kontak dari kulit ke kulit dengan ibunya yang memberikan manfaat secara psikologis. Susu formula tidak akan bisa menyamai ASI dalam hal kandungan maupun manfaat bagi bayi (Yuliarti, 2010). Oleh karenanya, pemberian ASI pada bayi menjadi hal yang harus diperhatikan.

Begitu pentingnya ASI sehingga pemberian ASI yang tidak optimal pada bayi diperkirakan berkontribusi terhadap kematian bayi dan 10 persen kesakitan balita di seluruh dunia (WHA, 2009). Melalui Kepmenkes RI Nomor 450/Menkes/SK/IV/Tahun 2004 tentang pemberian ASI secara eksklusif, Pemerintah Indonesia menunjukkan perhatiannya dengan menargetkan penghentian ASI eksklusif selama enam bulan pertama dan cakupan ASI eksklusif sebesar 80 persen (KPPPA dan BPS, 2015).

Pada tahun 2021 cakupan pemberian ASI Eksklusif di Kabupaten Purbalingga untuk Inisiasi Menyusui Dini (IMD)

sebanyak 11.665 bayi dari 14.117 bayi atau 82,6 persen ini cukup bagus akan tetapi dalam pemberian ASI eksklusif hanya 7.032 bayi dari 10.253 bayi atau 68,6 persen untuk tahun ini mengalami penurunan dari tahun 2020 dimana untuk IMD ditahun 2020 sebesar 82,54 persen dan pemberian ASI eksklusif 81,25 persen.

Tabel 4.9 Cakupan Pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia < 6 Bulan di Kabupaten Purbalingga dalam Empat Tahun Terakhir.

Tahun	IMD			ASI EKSLUSIF < 6 Bulan		
	Jumlah Bayi Baru Lahir	Bayi Mendapatkan IMD	%	Jumlah Bayi	Bayi diberi ASI Eksklusif	%
2018				11.125	6.166	55,42
2019	14.776	12.048	81,54	8.448	5.775	68,36
2020	14.808	12.222	82,54	14.811	12.034	81,25
2021	14.117	11.665	82,63	10.253	7.032	68,58

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga 2018, 2019, 2020,

2021

c. Status Gizi Balita

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara penilaian status gizi balita adalah dengan pengukuran antropometri yang menggunakan indeks Berat Badan dan Tinggi Badan (BB/TB).

Untuk itu perlu upaya pemerintah untuk menyelamatkan (rescue) bangsa dari ancaman “loss generation” akibat terjadinya “Booming” balita gizi buruk. Upaya pemerintah tersebut dilakukan terutama melalui program perbaikan gizi masyarakat yang dibiayai APBD maupun APBN. Kegiatannya berupa pelacakan balita gizi

buruk, rujukan dan perawatan balita gizi buruk, pemberian paket makanan tambahan (PMT) Pemulihan kepada balita gizi buruk dan gizi kurang dari keluarga miskin, yang didukung pula oleh peningkatan penyuluhan gizi dan pemberdayaan Posyandu

Perkembangan keadaan gizi masyarakat yang dapat dipantau berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan (RR) program Perbaikan gizi masyarakat yang tercermin dalam hasil penimbangan balita setiap bulan di Posyandu. Data tahun 2021 jumlah balita sasaran posyandu sebanyak 70.828 balita dimana 36.367 merupakan balita laki – laki dan 34.461 balita perempuan. Dari jumlah balita sasaran posyandu yang datang dan ditimbang dan dilaporkan sebanyak 59.659 balita yang terdiri dari 30.572 balita laki – laki dan 29.081 balita perempuan secara prosentase hanya 84,2 persen balita yang aktif datang ke posyandu. Dari jumlah balita yang ditimbang ditahun 2021 sebanyak 3.230 anak atau (5,41 persen) mengalami gizi kurang. Jumlah balita yang diukur tahun 2021 sebanyak 59.659 anak dan sebanyak 5.208 anak atau (8.73 persen) merupakan balita pendek. Anak balita yang diukur dan ditimbang tahun 2021 sebanyak 1.672 anak atau (2,80 persen) merupakan balita kurus.

4.2.2 Pelayanan Kesehatan Anak

a. Penanganan Komplikasi Neonatal

Komplikasi Neonatal yaitu neonatal dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan dan kematian termasuk bayi BBLR (berat bayi < 2500 gr). Penanganan komplikasi neonatal yaitu neonatal dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan.

Cakupan komplikasi Neonatal yang ditangani Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebesar 62.73 persen dari perkiraan, tahun ini sedikit mengalami penurunan dari tahun 2020 yaitu dari 64,02 persen. Pada dasarnya semua komplikasi Neonatal sudah tertangani atau 100%.

Tabel 4.10 Perkiraan dan Penanganan Neonatal di Kabupaten Purbalingga dalam Empat Tahun Terakhir.

Tahun	Perkiraan Penanganan Neonatal			Penanganan Neonatal			
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	%
2018	1.132	1.066	2.198	823	765	1.588	72,25
2019	1.146	1.071	2.217	854	714	1.568	70,73
2020	1.155	1.066	2.221	770	652	1.422	64,03
2021	1.088	1.026	2.114	715	611	1.326	62,73

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga 2018, 2019, 2020, 2021

b. Pelayanan Imunisasi

Imunisasi merupakan upaya preventif seseorang dengan tujuan pengendalian penyakit dengan memasukkan vaksin ke

dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang berbahaya, Program imunisasi untuk anak merupakan upaya pemerintah dalam mencapai program SDGs, khususnya untuk menurunkan angka kematian anak.

Di Indonesia, imunisasi telah dimulai sejak tahun 1956 untuk membasmi penyakit cacar dan terus diperluas dengan Program Lima Imunisasi Dasar Lengkap (LIL). Program LIL tersebut mencakup Imunisasi Hepatitis B, BCG, Polio, DPT serta campak sebelum usia 1 tahun.

Pelayanan imunisasi bayi mencakup vaksinasi HB 0. BCG 1 kali, DPT+HB3/DPT-HB-Hib3 3 kali, Polio 4 kali, dan campak 1 kali, pelayanan dapat diperoleh di Posyandu dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Adapun cakupan imunisasi bayi di Kabupaten Purbalingga tahun 2021 Hb Hb 0<7 hr sebesar 91,50 persen, BCG sebesar 91,60 persen, DPT+HB3/DPT-HB-Hib3 sebesar 82,70 persen, Polio sebesar 82,00 persen, Campak/MR 87,40 persen, dan Imunisasi Dasar Lengkap sebesar 86,60 persen.

Tabel 4.11 Cakupan Imunisasi di Kabupaten Purbalingga dalam Empat Tahun Terakhir.

Tahun	Hb 0 < 24 jam	BCG	DPT-HB-Hib3	POLIO 4*	CAMPAK/MR	IMUNISASI DASAR LENGKAP
2018	100,73	103,08	101,7	101,53	103,17	103,08
2019	96,3	103,08	103,8	103,6	103,9	103,5
2020	96,00	100,00	98,9	99,77	99,87	99,15
2021	91,50	91,60	82,70	82,00	87,40	86,60

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga 2018, 2019, 2020 dan 2021

4.2.3 Angka Kematian Pada Anak

Salah satu risiko terberat kelahiran yang tidak ditolong tenaga kesehatan adalah kematian. Dalam hal ini indikator yang digunakan adalah Angka Kematian Neonatal, Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA). Adapun Angka Kematian Neonatal yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia sebelum 28 hari dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu, Angka Kematian Bayi (AKB) yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia sebelum 1 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu sedangkan Angka Kematian Balita yaitu Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). (BPS,

<http://sirusa.bps.go.id/index.php?r=sd/view&kd=3&th=2012>).

Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat,

karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat tinggal orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian, angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Sementara itu, Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll (Budi, 1985 dalam [sirusa.bps.go.id/index.php?r= indikator/view&id=80](http://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=80)). Adapun gambaran angka kematian di Kabupaten Purbalingga Sebagai berikut :

a. Angka Kematian Neonatal

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga tahun 2021 bahwa Kasus Kematian Neonatal sebanyak 82 kasus dan Angka Kematian Neonatal Kabupaten

Purbalingga tahun 2021 sebesar 5,82 per 1.000 kelahiran hidup. Dari 82 kasus kematian neonatal 57 merupakan kasus kematian neonatal laki – laki sementara kasus kematian neonatal perempuan sebanyak 25 kasus, dan Angka Kematian Neonatal Laki – Laki sebesar 7,86 per 1.000 kelahiran hidup bayi laki – laki sementara Angka Kematian Neonatal Perempuan 3,66 per 1.000 kelahiran hidup bayi perempuan. Secara keseluruhan kasus kematian neonatal tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun 2019 yaitu dari 61 kasus dengan angka kematian neonatal sebesar 4,13 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018 yaitu dari 76 kasus kematian neonatal dan Angka Kematian Neonatal 5,19 per 1.000 Kelahiran hidup. Berikut rincian Angka Kematian Neonatal dalam 3 tahun terakhir .

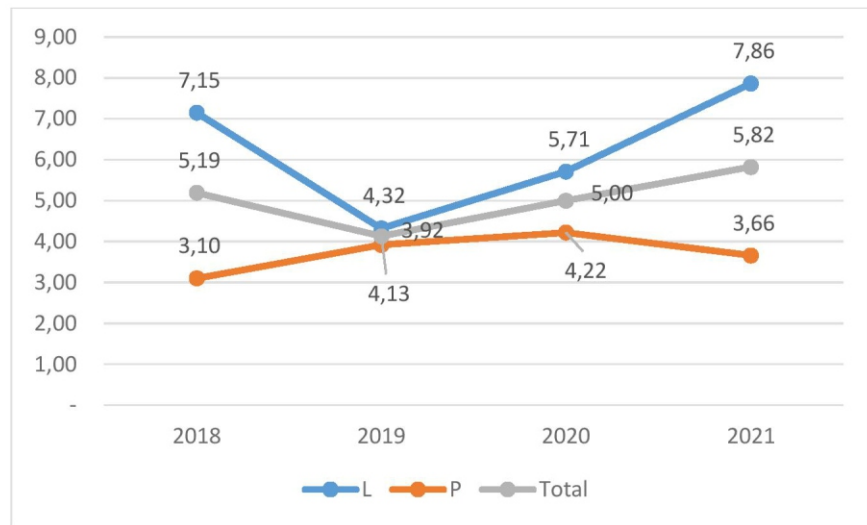
Tabel 4.12 Kasus Kematian Neonatal dan Angka Kematian Neonatal Kabupaten Purbalingga dalam Empat Tahun Terakhir.

Tahun	Kelahiran hidup			Kasus Kematian neonatal			Angka Kematian Neonatal		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
2018	7.549	7.107	14.656	54	22	76	7,15	3,10	5,19
2019	7.634	7.139	14.773	33	28	61	4,32	3,92	4,13
2020	7.701	7.107	14.808	44	30	74	5,71	4,22	5,00
2021	7.255	6.837	14.092	57	25	82	7,86	3,66	5,82

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, 2019,

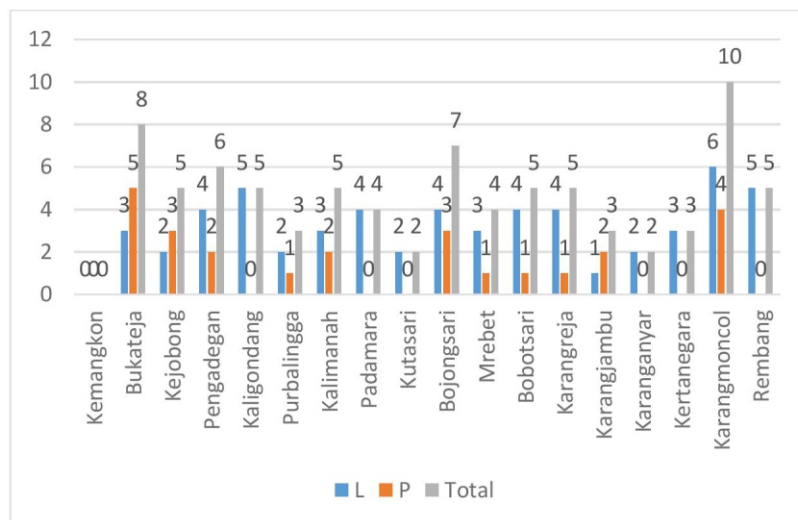
2020,2021

Gambar 4.7 Angka Kematian Neonatal Kabupaten Purbalingga dalam Empat Tahun terakhir.



Untuk persebaran kasus kematian neonatal di Kabupaten Purbalingga tahun 2021 terbanyak di Kecamatan Karangmoncol sebanyak 10 kasus, Bukateja 8 kasus dan Bojongsari 7 kasus. Dan zero kasus kematian neonatal ada di wilayah Kecamatan Kemangkong.

Gambar 4.8 Persebaran Kasus Kematian Neonatal di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga 2021

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

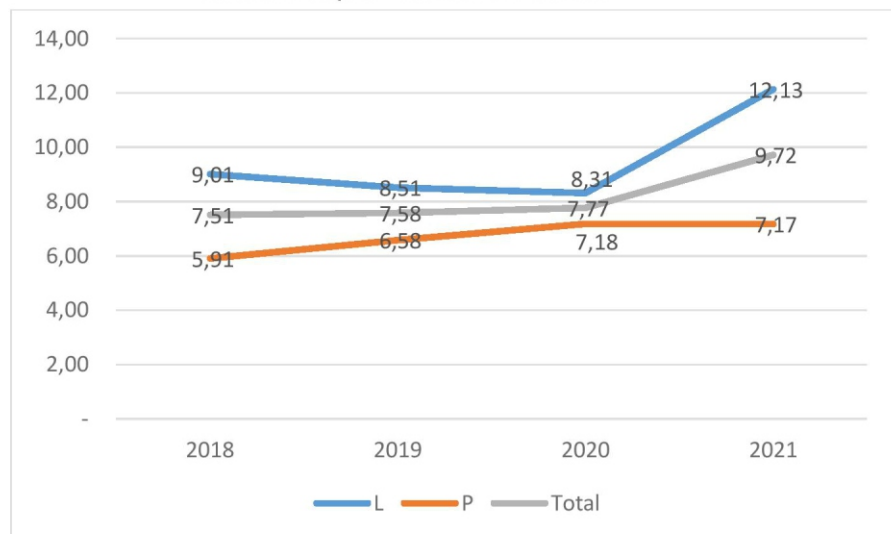
Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga tahun 2021 bahwa angka kematian Bayi (AKB) Kabupaten Purbalingga sebesar 9,72 per 1.000 kelahiran hidup dengan total kasus 137 kasus kematian bayi. Dari 137 kasus kematian bayi 88 merupakan kasus kematian bayi laki – laki dan 49 kasus kematian bayi perempuan sehingga angka kematian bayi laki – laki sebesar 12,13 per 1.000 kelahiran hidup bayi laki – laki dan angka kematian bayi perempuan 7,17 per 1.000 kelahiran hidup bayi perempuan. Angka Kematian Bayi secara total di Kabupaten Purbalingga tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun 2020 dimana Angka Kematian Bayi Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebesar 7,77 per 1.000 Kelahiran hidup dengan total kasus kematian bayi sebanyak 115 kasus. Hal ini dimungkinkan adanya pandemic covid 19. Berikut tabel jumlah kasus kematian bayi dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Purbalingga selama empat tahun terakhir.

Tabel 4.13 Kasus Kematian Bayi dan Angka Kematian Bayi Kabupaten Purbalingga dalam Empat Tahun Terakhir.

Tahun	Kelahiran hidup			Kasus Kematian Bayi			Angka Kematian Bayi		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
2018	7.549	7.107	14.656	68	42	110	9,01	5,91	7,51
2019	7.634	7.139	14.773	65	47	112	8,51	6,58	7,58
2020	7.701	7.107	14.808	64	51	115	8,31	7,18	7,77
2021	7.255	6.837	14.092	88	49	137	12,13	7,17	9,72

Sumber : Dinas Kesehatan Purbalingga Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021.

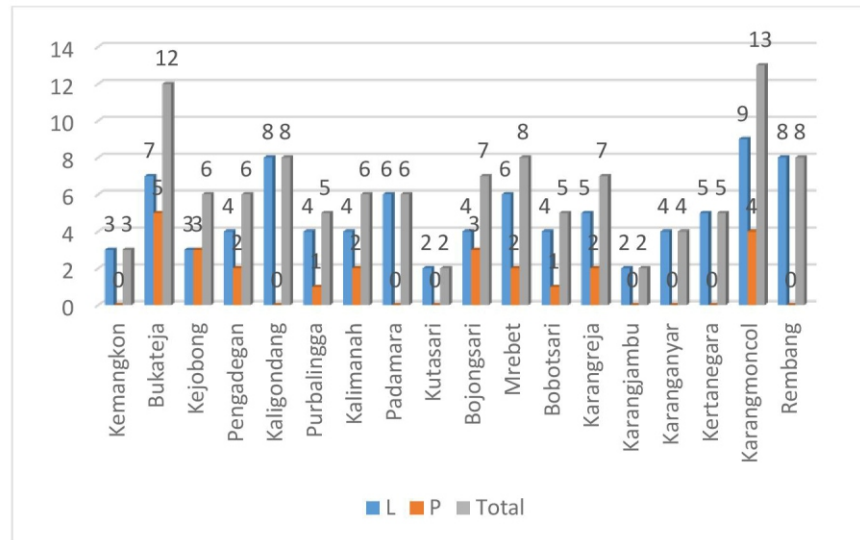
Gambar 4.9 Angka Kematian Bayi Kabupaten Purbalingga dalam Empat Tahun terakhir.



Untuk persebaran kasus kematian bayi per wilayah di Kabupaten Purbalingga tahun 2021 terbanyak di Kecamatan Karangmoncol dengan 13 kasus kematian bayi kemudian Kecamatan Bukateja sebanyak 12 kasus kematian bayi dan Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Mrebet dan Kecamatan Rembang dengan masing - masing 8 kasus

kematian bayi. Sedangkan untuk terendah di Kecamatan Mrebet dan Karangjambu.

Gambar 4.10 Persebaran Kasus Kematian Bayi Per Wilayah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021



c. Angka Kematian Anak Balita

Angka Kematian Anak Balita (AKABA) Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebesar 1,92 per 1.000 kelahiran hidup dengan total kasus kematian anak balita sebanyak 27 kasus yang dimana 19 merupakan kasus kematian anak balita laki – laki dan 8 kasus kematian anak balita perempuan sehingga untuk 2021 AKABA laki – laki 2,62 per 1.000 kelahiran hidup laki – laki dan AKABA perempuan 1,17 per 1.000 kelahiran hidup perempuan. AKABA secara keseluruhan di tahun 2021, turun secara dratis dari tahun 2020 yaitu dari 9,25 menjadi 2,62. Adapaun rincian jumlah

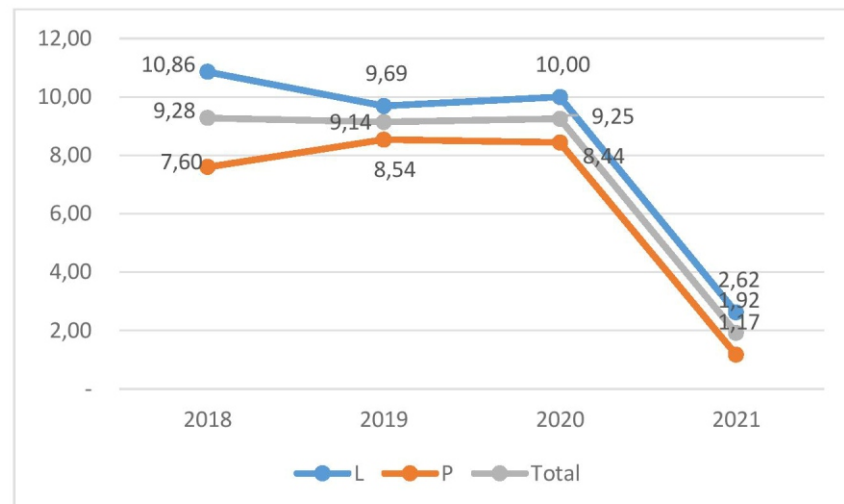
kasus kematian anak balita dan AKABA di Kabupaten Purbalingga dalam empat tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 4.14 Jumlah Kasus Kematian Anak Balita dan Angka Kematian Anak Balita di Kabupaten Purbalingga dalam Empat Tahun Terakhir

Tahun	Kelahiran hidup			Kasus Kematian Bayi			Angka Kematian Bayi		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
2018	7.549	7.107	14.656	82	54	136	10,86	7,60	9,28
2019	7.634	7.139	14.773	74	61	135	9,69	8,54	9,14
2020	7.701	7.107	14.808	77	60	137	10,00	8,44	9,25
2021	7.255	6.837	14.092	19	8	27	2,62	1,17	1,92

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021

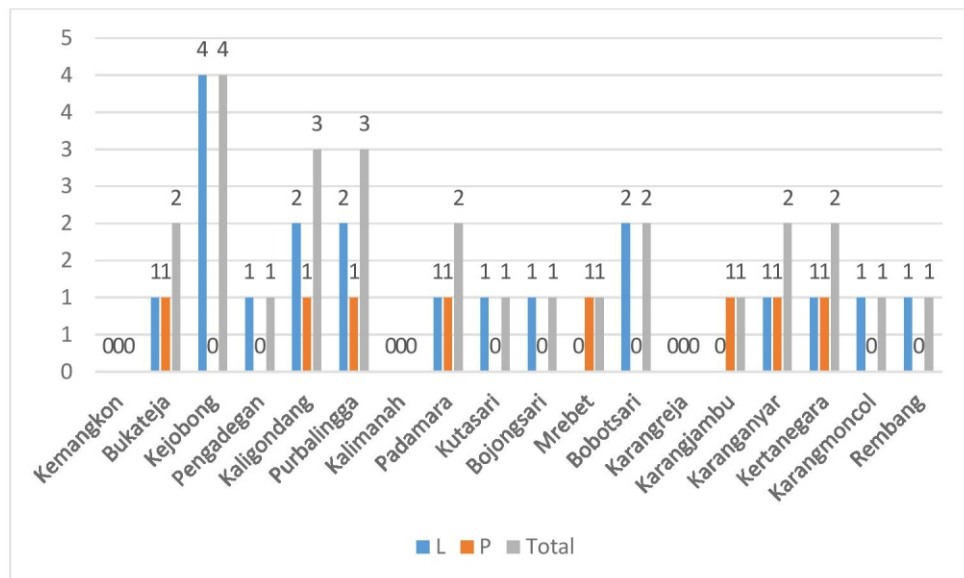
Gambar 4.11 Angka Kematian Anak Balita Kabupaten Purbalingga dalam Empat Tahun terakhir.



Persebaran kasus kematian anak balita per wilayah di Kabupaten Purbalingga tahun 2021 tertinggi di Kecamatan Kejobong dengan 4 kasus kematian anak balita kemudian disusul Kecamatan Purbalingga dan Kaligondang masing – masing dengan 3. Persebaran terendah dengan zero kasus

di Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Kemangkon dan Kecamatan Karangreja.

Gambar 4.12 Persebaran Kasus Kematian Anak Balita Per Wilayah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021



4.3 Persentase Penduduk dengan Keluhan Kesehatan dalam Satu Bulan Terakhir

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal atau hal lain (<http://sirusa.bps.go.id/sirusa2012/index.php?r=variabel/view&id=314>)

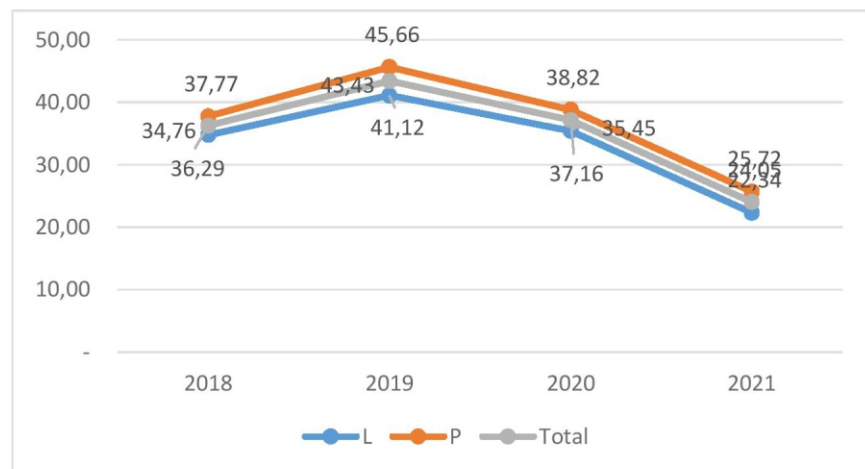
Tabel 4.15 Persentase Penduduk Dengan Keluhan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga dalam Empat Tahun Terakhir.

Tahun	Angka Keluhan Kesehatan		
	L	P	Total
2018	34,76	37,77	36,29
2019	41,12	45,66	43,43
2020	35,45	38,82	37,16
2021	22,34	25,72	24,05

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga 2018, 2019, 2020 dan 2021

Prosentase Keluhan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga ditahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2020 baik laki - laki maupun perempuan. Untuk Prosentase Keluhan Kesehatan pada perempuan lebih tinggi 3,38 persen dari laki laki.

Gambar 4.13 Persentase Penduduk Dengan Keluhan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga dalam Empat Tahun Terakhir.



4.4 Tenaga Kesehatan

Salah satu penunjang keberhasilan program kesehatan adalah tenaga kesehatan. Dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang dimaksud tenaga kesehatan adalah setiap orang yang

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan (www.hukumonline.com/pusatdata/.../lt5450b859e4e6).

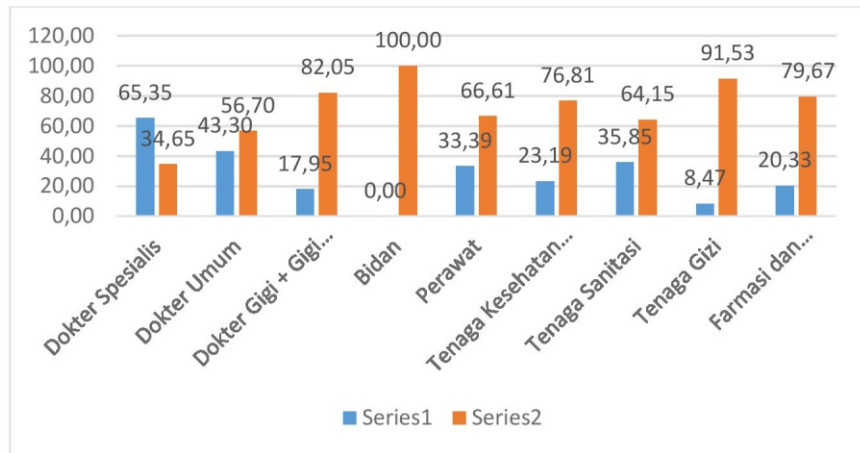
Tabel 4.16 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan				
		TOTAL	L	%	P	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Dokter Spesialis	101	66	65.35	35	34.65
2	Dokter Umum	194	84	43.30	110	56.70
3	Dokter Gigi + Gigi Spesialis	39	7	17.95	32	82.05
4	Bidan	712		0.00	712	100.00
5	Perawat	1243	415	33.39	828	66.61
6	Tenaga Kesehatan Masyarakat	69	16	23.19	53	76.81
7	Tenaga Sanitasi	53	19	35.85	34	64.15
8	Tenaga Gizi	59	5	8.47	54	91.53
9	Farmasi dan Apoteker	482	98	20.33	384	79.67
	JUMLAH	2952	710	24.05	2242	75.95

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga 2021

Untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Purbalingga secara total masih di dominasi perempuan. Dari 9 jenis Tenaga Kesehatan hanya satu jenis tenaga kesehatan yang secara prosentase laki - laki lebih besar dari perempuan yaitu tenaga kesehatan Dokter Spesialis sebesar 65,35 persen.

Gambar 4.14 Grafik Perbandingan Tenaga Kesehatan Per Jenis Tenaga Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021



BAB V

KONDISI KELUARGA DAN KELUARGA BERENCANA

Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berarti meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu keluarga adalah inti dari masyarakat, maka salah satu upaya peningkatan kualitas masyarakat adalah dengan mewujudkan keluarga berkualitas. Selain itu lingkungan keluarga merupakan salah satu aspek yang mampu mempengaruhi tumbuh-kembang anak. Keluarga yang berkualitas dan ideal adalah keluarga yang dapat memenuhi hak dan kebutuhan anak sesuai dengan usianya, diantaranya yaitu hak untuk mendapatkan pengasuhan agar dapat tumbuh dan berkembang secara normal. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga menyebutkan bahwa keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada bab ini digambarkan kondisi keluarga di Kabupaten Purbalingga tahun 2021 dilihat dari berbagai aspek (jenis kelamin, jenis pekerjaan, status perkawinan, tingkat

pendidikan, kesempatan memperoleh kredit mikro, jumlah jiwa dalam keluarga, kepersertaan Keluarga Berencana), dan pengasuhan alternatif bagi anak serta perkawinan anak.

5.1 Kondisi Keluarga

5.1.1 Jumlah Keluarga

Dalam buku ini merujuk pada pengertian Haviland (2003) yang menyatakan bahwa rumah tangga dapat terdiri dari keluarga tunggal atau sekelompok orang. Artinya, dalam satu rumah tangga dimungkinkan terdiri dari beberapa keluarga yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Keluarga (KK).

Pendataan keluarga oleh BKKBN melalui DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga yaitu pada tahun 2021 terdapat 297.387 keluarga. Dari 297.387 keluarga terdapat 263.206 atau 88,51 persen kepala keluarga laki – laki sedangkan kepala keluarga perempuan sebanyak 34.181 atau 11,49 persen kepala keluarga perempuan. Dengan demikian, rasio rata rata KK perempuan dibanding laki-laki adalah 1 : 7. Adanya KK perempuan ini dimungkinkan terkait dengan status perkawinan mereka.

Tabel 5.1 Keluarga dan Kepala Keluarga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No.	Bidang/ Indikator	L	%	P	%	Jumlah	% dr jml KK
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Keluarga					297.387	
2	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	263.206	88,51	34.181	11,49	297.387	
3	KK menurut status perkawinan:						
	a. Belum Kawin					2.767	0,93
	b. Kawin					249.921	84,04
	c. Cerai Hidup					12.986	4,37
	d. Cerai Mati					31.713	10,66

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2021

5.1.2 Jumlah Anggota Keluarga

Dari sejumlah anggota keluarga yang ada termasuk Kepala Keluarga, penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan yaitu 50,92 persen sedang perempuan 49,08 persen. Dalam satu keluarga rata-rata terdiri dari 3,26 jiwa. Dengan asumsi bahwa satu keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak, maka dapat diperkirakan bahwa rata-rata keluarga mempunyai satu anak. Hal ini didukung data bahwa rata-rata balita dalam satu keluarga adalah 0,23 anak. Apabila diperbandingkan dengan jumlah PUS yang ada, maka rata-rata balita terhadap jumlah PUS adalah sebesar 0,41 anak.

Dilihat dari komposisi umur, sejumlah anggota keluarga yang ada (termasuk KK), 56,01 persen termasuk kategori umur produktif (20-59 tahun). Kelompok terbanyak berikutnya adalah penduduk usia sekolah yakni 10 – 14 tahun sebesar 8,19 persen.

**Tabel 5.2 Jumlah Jiwa dalam Keluarga di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2021**

No.	Bidang/ Indikator	L	%	P	%	Jumlah	% dr jml KK
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah jiwa dlm kelg (termasuk KK):	493.511	50,92	475.647	49,08	969.158	
2	Rata-rata jiwa dalam keluarga					3,26	
3	Rata-rata balita dalam keluarga					0,23	
4	Rata-rata balita thdp PUS					0,41	
5	Jumlah anggota keluarga:						
	a. 0 - 1 tahun					10.520	1,09
	b. 1 - 4 tahun					59.369	6,13
	c. 5 - 9 tahun					78.170	8,07
	d. 10 - 14 tahun					79.352	8,19
	e. 15 - 19 tahun					76.733	7,92
	f. 20 - 59 tahun					542.850	56,01
	g. 60+ tahun					122.164	12,61

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2021

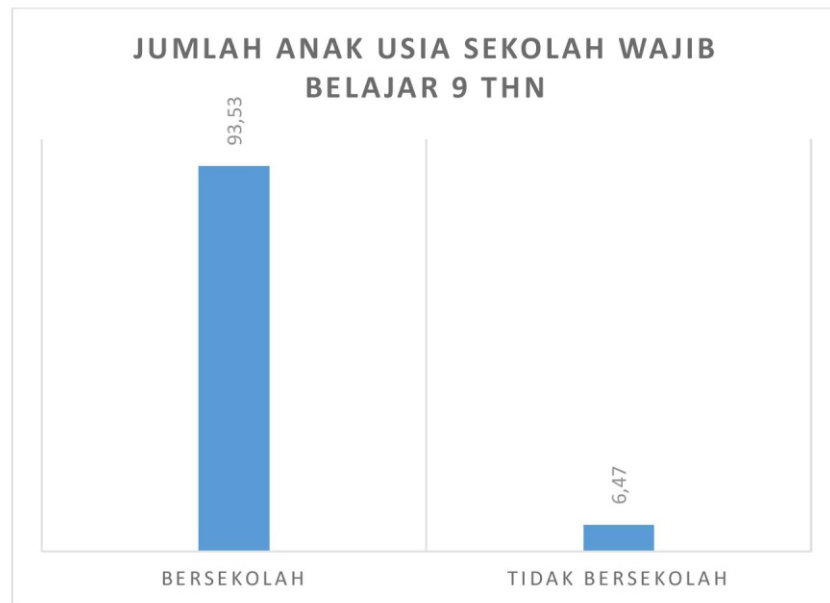
Jumlah penduduk dengan usia wajib belajar 9 tahun (7 - 15 tahun) yaitu 137.978 terdiri dari 129.047 (93,53persen) anak sekolah dan 8.931 (6,47 persen) anak tidak sekolah. Dari 137.978 anak sekolah sebanyak 71.690 (51,96 persen) anak laki – laki dan 66.288 (48,04 persen) anak perempuan. Sementara dari jumlah 8.931 anak tidak sekolah sebanyak 5.107 (57,18 persen) anak laki – laki dan 3.824 (42,82 persen) anak perempuan.

**Tabel 5.3 Jumlah Jiwa usia sekolah wajib belajar 9 tahun di
Kabupaten Purbalingga tahun 2021**

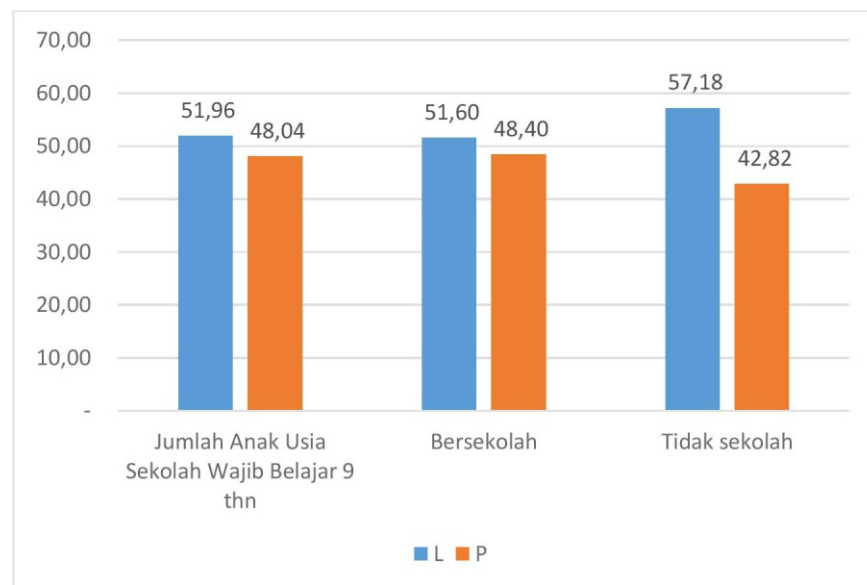
No	Keterangan	Total	%	Laki - Laki	%	Perempuan	%
1	Jumlah Anak Usia Wajib Belajar 9 Tahun (usia 7 -15 tahun)	137.978		71.690	51,96	66.288	48,04
2	- Anak usia wajib belajar 9 thn yang bersekolah	129.047	93,53	66.583	51,60	62.464	48,40
3	- Anak usia wajib belajar 9 thn tidak bersekolah	8.931	6,47	5.107	57,18	3.824	42,82

Sumber : DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga 2021

Gambar 5.1 Jumlah Anak Usia Sekolah Wajib Belajar 9 tahun yang Bersekolah dan Tidak Bersekolah.



Gambar 5.2 Jumlah Laki – Laki dan Perempuan Anak Usia Sekolah Wajib Belajar 9 tahun yang Bersekolah dan Tidak Bersekolah.



5.1.3 Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan

Tingkat pendidikan Kepala Keluarga di Kabupaten Purbalingga tahun 2021 pada umumnya masih rendah. Kebanyakan

dari mereka hanya tamat SD dan SLTP (68,74 persen). Bahkan 8,80 persennya tidak tamat SD. Hanya 17,19 persen saja yang tamat SLTA dan 5,27 persen yang tamat Akademik/Perguruan Tinggi. Jadi rata – rata mereka hanya menyelesaikan wajib belajar 9 tahun. Kondisi ini dimungkinkan menjadi salah satu penyebab tidak semua Kepala Keluarga mempunyai pekerjaan. Tidak dapat dipungkiri pendidikan/ijazah dan juga ketrampilan yang didapat dijenjang Pendidikan Atas menjadi syarat mutlak untuk masuk dalam dunia kerja formal. Dari 297.387 KK, 91,57 Kepala Keluarga bekerja dan terdapat 8,43 persen Kepala Keluarga yang tidak bekerja. Adapun yang bekerja baik sebagai pekerja formal maupun informal seperti petani, dagang maupun pekerja lepas.

Tabel 5.4 Kondisi Kepala Keluarga Menurut Status Pendidikan dan Pekerjaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No.	Bidang/ Indikator	Jumlah	% dr jml KK
	(1)	(2)	(3)
1	Tingkat pendidikan:		
	a. tidak tamat SD	26.171	8,80
	b. tamat SD & SLTP	204.415	68,74
	c. tamat SLTA	51.132	17,19
	d. tamat Akademi/ PT	15.669	5,27
2	KK menurut status pekerjaan:		
	a. bekerja	272.316	91,57
	b. tidak bekerja	25.065	8,43

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2021

Adanya hubungan yang erat antara tingkat pendidikan dan pekerjaan tersebut dapat tergambar dari kondisi keluarga dilihat dari

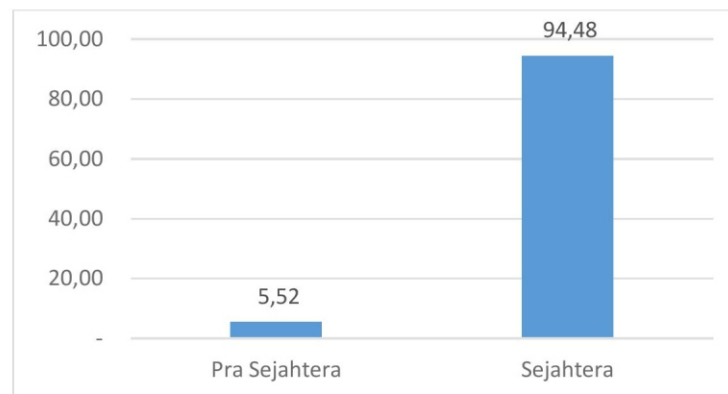
tahapan kesejahteraannya. Pada Pendataan Keluarga (PK) tahun 2021 tahapan kesejahteraan keluarga hanya di bagi menjadi 2 kelompok yaitu Keluarga Sejahtera dan Keluarga pra Sejahtera. Adapun indikator keluarga pra sejahtera yaitu adanya anak umur 7 - 15 tahun dalam satu keluarga yang tidak sekolah, tidak ada anggota keluarga yang memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, lantai rumah tempat tinggal masih tanah dan tidak setiap anggota keluarga makan “makanan beragam”. Berdasarkan hasil PK 2021 di Kabupaten Purbalingga dari 297.387 keluarga setidaknya masih ada 16.416 keluarga atau 5,52 persen masuk dalam tahapan keluarga pra sejahtera. Dan sebanyak 280.971 keluarga atau 94,48 persen masuk dalam keluarga sejahtera.

Tabel 5.5 Tahapan Keluarga di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2021

No.	Bidang/ Indikator	Jumlah	% dr jml KK
	(1)	(2)	(3)
1	a. Keluarga Pra Sejahtera	16.416	5,52
	b. Keluarga Sejahtera	280.971	94,48

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2021

Gambar 5.3 Gambar Tahapan Keluarga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.



5.2 Keluarga Berencana

Didesentralisasikannya program ini, maka menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan program ini di wilayah. Salah satu kegiatan Program Keluarga Berencana adalah meningkatkan jumlah akseptor KB. Akseptor atau peserta KB adalah pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi.

Metode penggunaan alat kontrasepsi ada dua yaitu Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan metode Non MKJP yaitu bukan Jangka Panjang. Alat kontrasepsi yang termasuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yaitu IUD, MOW, MOP dan Implan sedangkan Non MKJP yaitu pil, kondom, suntik dan MAL. Metode Amenore Laktasi (MAL) adalah metode kontrasepsi alami bersifat sementara yang dapat digunakan setelah persalinan. MAL memiliki cara kerja berupa penekanan ovulasi. Peningkatan hormon prolaktin (hormon pembentukan ASI) usai persalinan menyebabkan

penurunan hormon lain seperti LH dan estrogen yang yang diperlukan untuk pemeliharaan siklus menstruasi sehingga ovulasi (pematangan sel telur) tidak terjadi

Hampir semua peserta KB di Kabupaten Purbalingga adalah kaum perempuan dan hanya 2,83 persen yang laki-laki yaitu berupa kontrasepsi MOP dan kondom. Kebanyakan PUS ini (55,05 persen) memilih menggunakan alat kontrasepsi hormonal yang sifatnya jangka pendek berupa suntikan. Dan disusul terbanyak kedua penggunaan alat kontrasepsi oleh PUS adalah IUD dan sisanya adalah mereka yang menggunakan kontrasepsi berupa implant, pil, MOW, Kondom dan Mal. Data selengkapnya terlampir berikut ini.

Tabel 5.6 Jenis Alat Kontrasepsi yang Digunakan Peserta KB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Metode Kontrasepsi	Jenis Kelamin		Jumlah	% dr total peserta
	P	L		
-1	-2		-3	-4
1. MKJP	34.583	892	35.475	31,91
a. IUD	14.239		14.239	12,81
b. MOP		892	892	0,80
c. MOW	7.516		7.516	6,76
d. Implan	12.828		12.828	11,54
2. Non-MKJP	73.434	2.257	75.691	68,09
a. suntikan	61.192		61.192	55,05
b. pil	12.170		12.170	10,95
c. kondom		2.257	2.257	2,03
d. Mal	72		72	0,06
Jumlah=	108.017	3.149	111.166	100,00
%	97,17	2,83	100,00	

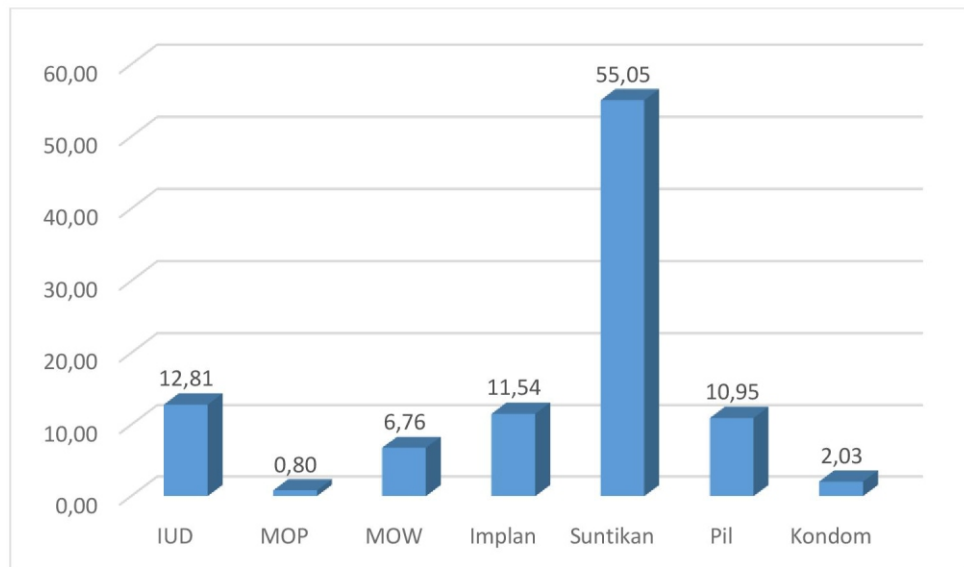
Sumber: DINSOSDALDUKKB3A Kab. Purbalingga, 2021

Keterangan:

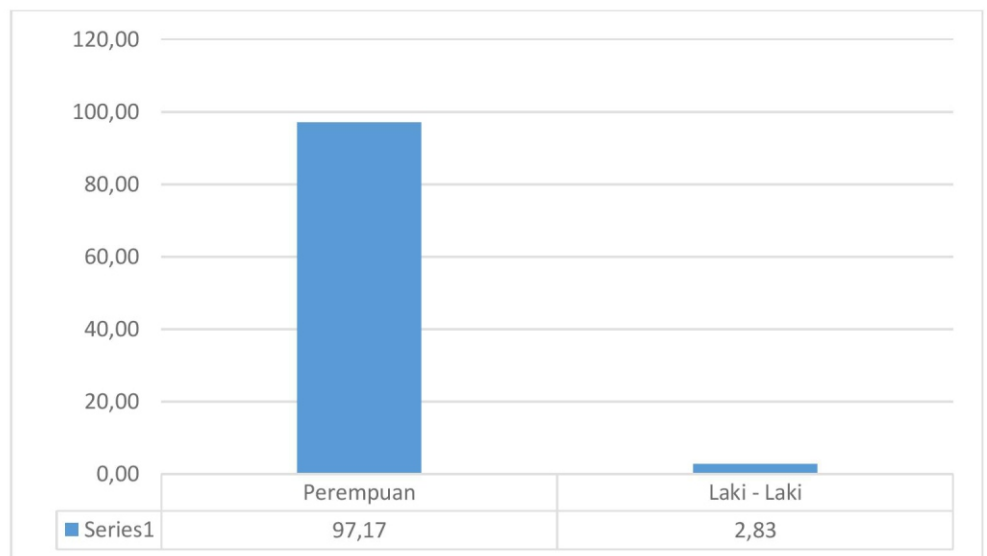
MKJP: Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

Non-MKJP: bukan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

Gambar 5.4 Jenis Alat Kontrasepsi yang Digunakan Peserta KB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021



Gambar 5.5 Kepesertaan KB Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021



BAB VI

LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Salah satu aspek yang mampu mempengaruhi tumbuh-kembang anak ialah lingkungan keluarga. Keluarga yang ideal adalah keluarga yang dapat memenuhi hak dan kebutuhan anak sesuai dengan usia. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pengasuhan agar dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Ketidakterpenuhan hal ini dapat menyebabkan penyimpangan perilaku yang antara lain tampak dari perilaku pergaulan bebas yang berdampak kehamilan yang pada akhir menyebabkan mereka terpaksa/dipaksa untuk menikah pada usia dini.

Faktor pengganggu tumbuh kembang anak lainnya adalah apabila anak berada dalam pengasuhan yang berisiko. Hal ini muncul apabila mereka diasuh oleh orangtua tunggal (ibu atau bapak saja) atau pihak lainnya, termasuk lembaga pengasuh pengganti berkelanjutan berupa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Untuk itulah, bab ini mencakup tiga sub-topik yakni: (1) Pengasuhan alternative, (2) Perkawinan Dini serta (3) Lembaga Pengasuhan Berkelanjutan.

6.1 Pengasuhan Alternatif

Mencetak generasi unggul di tengah persaingan global dapat dilakukan dengan jalan menyelenggarakan pendidikan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, bakat, minat dan

kesanggupan . Hal ini akan terwujud jika pendidikan dilakukan sejak anak usia dini. Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan fondasi bagi perkembangan kualitas sumberdaya manusia selanjutnya. Oleh karenanya, peningkatan penyelenggaraan PAUD sangat memegang peranan penting untuk Pendidikan di masa mendatang.

Keberadaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diatur oleh UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 mengenai Pendidikan Anak Usia Dini. Dinyatakan dalam peraturan tersebut, pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, atau informal. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal berbentuk TK (Taman Kanak-Kanak), RA (Raudhatul Athfal), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal berbentuk KB (Kelompok Bermain), TPA (Tempat Penitipan Anak), atau bentuk lain yang sederajat. Sementara itu, pendidikan usia dini jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan (KPPPAI dan BPS, 2015).

Jumlah Lembaga PAUD formal yang terdiri dari TK dan RA yang ada di Kabupaten Purbalingga tahun 2021 yang sebanyak 516 buah dengan murid sebanyak 16.739 anak yang jumlahnya hampir berimbang antara anak perempuan dan laki-laki.

Tabel. 6.1 - Data PAUD tahun 2021 Kabupaten Purbalingga

No	Kecamatan	Jumlah TK	Jumlah RA/BA	Total
1	Kemangkon	17	23	40
2	Bukateja	19	39	58
3	Kejobong	17	10	27
4	Pengadegan	12	13	25
5	Kaligondang	15	20	35
6	Purbalingga	20	16	36
7	Kalimanah	9	15	24
8	Padamara	14	3	17
9	Kutasari	10	15	25
10	Bojongsari	8	15	23
11	Mrebet	9	12	21
12	Bobotsari	11	12	23
13	Karangreja	17	3	20
14	Karangjambu	18	3	21
15	Karanganyar	17	12	29
16	Kertanegara	15	7	22
17	Karangmoncol	16	19	35
18	Rembang	24	11	35
Jumlah		268	248	516

Sumber : Purbalingga Dalam Angka 2022

Tabel. 6.2 - Data Murid TK dan RA Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No	Kecamatan	Murid TK	Murid RA/BA	Total
1	Kemangkon	442	664	1106
2	Bukateja	659	1541	2200
3	Kejobong	423	415	838
4	Pengadegan	348	331	679
5	Kaligondang	420	475	895
6	Purbalingga	1036	664	1700
7	Kalimanah	336	545	881
8	Padamara	424	94	518
9	Kutasari	302	480	782
10	Bojongsari	310	465	775
11	Mrebet	289	553	842
12	Bobotsari	315	401	716
13	Karangreja	602	120	722
14	Karangjambu	447	110	557
15	Karanganyar	349	259	608
16	Kertanegara	354	283	637
17	Karangmoncol	532	510	1042
18	Rembang	772	469	1241
Jumlah		8,360	8,379	16,739

Sumber : Purbalingga Dalam Angka 2022

Tabel. 6.3 - Data Guru TK dan RA kabupaten purbalingga Tahun 2021

No	Kecamatan	Guru TK	Guru RA/BA	Total
1	Kemangkon	37	48	85
2	Bukateja	42	110	152
3	Kejobong	44	32	76
4	Pengadegan	27	32	59
5	Kaligondang	35	47	82
6	Purbalingga	107	73	180
7	Kalimanah	25	41	66
8	Padamara	40	9	49
9	Kutasari	26	47	73
10	Bojongsari	31	38	69
11	Mrebet	25	38	63
12	Bobotsari	28	37	65
13	Karangreja	41	8	49
14	Karangjambu	43	8	51
15	Karanganyar	32	26	58
16	Kertanegara	28	21	49
17	Karangmoncol	47	48	95
18	Rembang	60	30	90
Jumlah		718	693	1,411

Sumber : Purbalingga Dalam Angka 2022

6.2 Perkawinan Anak

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam undang-undang ini, umur menjadi salah satu syarat dalam melaksanakan perkawinan. Dalam UU RI No 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7(1) menyebutkan Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (

sembilan belas) tahun, 7(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Kebijakan Pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini telah melalui berbagai proses dan pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua pihak baik laki-laki maupun perempuan telah benar-benar siap baik secara fisik, mental maupun psikis untuk dapat menjalankan peran sebagai suami dan istri dan orangtua bagi anak-anak mereka. Penekanan persyaratan usia minimal merupakan salah satu upaya menekan angka stunting dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia.

Upaya pencegahan perkawinan anak selain tertuang dalam UU perkawinan juga tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah ditegaskan dalam pasal 26 ayat 1 butir 3 bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Dari UU ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dianjurkan adalah usia minimal 18 tahun. Dalam publikasi ini, yang dimaksud perkawinan usia dini mengacu pada UU Perlindungan Anak yakni anak-anak usia di bawah 18 tahun yang sudah menikah,

anak perempuan usia 10-17 tahun yang berstatus kawin dan cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati (KPPPAI dan BPS, 2015).

Seorang wanita mulai memasuki usia produktif pada usia 21 tahun. Jika dilihat dari segi biologis, pada usia 21-35 tahun perempuan memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan sel telur yang diproduksi sangat berlimpah. Masa pertumbuhan manusia atau masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jadi apabila perempuan mengalami kehamilan di usia sebelum 21 tahun di prediksi akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya sehingga akan mempengaruhi kondisi fisik maupun psikologis anak. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia muda, sehingga berperan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan di usia dini juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran.

Perkawinan usia dini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari diri anak tersebut maupun dari luar diri anak tersebut. Faktor yang berasal dari dalam diri anak (faktor internal) pada umumnya adalah faktor rendahnya pendidikan ataupun karena telah melakukan hubungan biologis dengan pacar (baik yang menyebabkan kehamilan maupun

tidak). Adapun faktor yang berasal dari luar diri anak tersebut (faktor eksternal) antara lain adalah faktor pemahaman agama (kurangnya memahami tugas, fungsi, hak dan kewajiban dalam berkeluarga) serta faktor ekonomi dan sosial budaya.

Perkawinan dini juga dapat berdampak pada keharmonisan perkawinan itu sendiri karena tingkat kemandirian pasangan tersebut juga masih rendah, rawan dan belum stabil. Dengan masih mudanya umur mereka pada umumnya juga kondisi ekonominya juga masih lemah dan tidak tertutup kemungkinan pula bahkan masih bergantung kepada orangtua. Hal ini membuat pasangan ini rentan mengalami pertikaian/percekcokan yang dapat berlanjut dengan terjadinya kekerasan fisik dan yang lainnya. Pada akhirnya kondisi ini dapat berlanjut pada proses perceraian yang tidak sedikit pula masih diiringi dengan permasalahan perebutan hak perwalian anak. Oleh karena itulah hasil dari perkawinan usia dini akan sulit diperoleh keturunan yang berkualitas. Di samping itu, jika dilihat dari aspek kependudukan, perkawinan usia dini pada umumnya mempunyai tingkat fertilitas yang tinggi, sehingga kurang mendukung pembangunan bidang kependudukan.

Untuk tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga calon pengantin dengan usia kurang dari 19 tahun sebanyak 176. Terbanyak terdapat di Kecamatan Bojongsari yaitu sebanyak 42 orang sementara dan terendah di Kecamatan Kertanegara yaitu

hanya 1 orang. Sementara untuk usia calon pengantin dengan range 19 – 21 sebanyak 1.677 orang dimana terbanyak di Kecamatan Kutasari sebanyak 199 orang dan terendah di Kecamatan Purbalingga sebanyak 53 orang.

Tabel 6.4 – Data Jumlah Usia Calon Pengantin kurang dari 21 Tahun di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Kecamatan	Usia Calon Pengantin		Total
	<19	19 - 21	
Bobotsari	8	64	72
Bojongsari	42	96	138
Bukateja	6	147	153
Kaligondang	11	98	109
Kalimanah	21	72	93
Karanganyar	7	65	72
Karangjambu	9	59	68
Karangmoncol	5	129	134
Karangreja	4	82	86
Kejobong	17	97	114
Kemangkon	4	71	75
Kertanegara	1	67	68
Kutasari	19	199	218
Mrebet	3	114	117
Padamara	3	65	68
Pengadegan	6	60	66
Purbalingga	2	53	55
Rembang	8	139	147
Jumlah	176	1.677	1.853

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga 2021

Upaya menurunkan angka pernikahan dini dilakukan dengan kegiatan sosialisasi, memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat melalui lembaga – lembaga organisasi wanita seperti PKK, DWP, Aisysia, Fatayat NU. Di

samping itu juga melalui pendidikan pra-nikah (kursus calon pengantin/suscatin) oleh Penyuluh Agama Islam, para kyai/ustad dan penghulu/ Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan pada acara pemeriksaan kehendak nikah dan pada saat pelaksanaan akad nikah. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami dan menyadari syarat rukun nikah serta bekal yang harus disiapkan untuk berumah tangga, sehingga pernikahan tidak dilaksanakan ketika masih di bawah umur. Sasaran kegiatan lainnya adalah para orangtua dan remaja, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Dalam upaya mencegah semakin banyaknya kasus perkawinan usia dini, tersedia pula lembaga konsultasi bagi orangtua tentang pengasuhan dan perawatan anak dibawah DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga. Kelompok tersebut antara lain Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Terpadu Tim Harapan serta Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Sasaran utama BKB adalah keluarga yang memiliki anak balita, sedangkan sasaran utama BKR adalah keluarga yang memiliki anak usia remaja.

Untuk kelompok BKR, pada tahun 2021 terdapat 248 kelompok yang diikuti oleh 9.339 keluarga yang aktif mengikuti kegiatan ini. Adapun kelompok BKB yang aktif adalah sebanyak 259 kelompok yang melibatkan 10.278 keluarga yang aktif ikut

dalam pertemuan BKB (DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2021).

Upaya Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menurunkan angka perkawinan anak dengan menyelenggarakan:

1. Kegiatan Generasi Berencana (GENRE) yang berupa sosialisasi tentang pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi remaja dan narkoba yang sasarannya adalah para remaja yang dilakukan oleh OPD terkait antara lain DINSOSDALDUKKBP3A, Dinas Kesehatan dan PKK.
2. Kegiatan Pusat Informasi Konseling remaja (PIK-R) yang berupa sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dengan sasaran para remaja yang dilakukan oleh OPD terkait yaitu dalam hal ini DIONSOSDALDUKKBP3A.
3. Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang berupa sosialisasi tentang pola asuh remaja (pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi remaja dan narkoba) yang sasarannya adalah orang tua yang memiliki remaja yang dilakukan oleh OPD terkait dalam hal ini DINSOSDALDUKKBP3A.

Di samping menyasar kepada keluarga yang memiliki anak balita dan anak remaja, DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga juga mempunyai program yang menyasar langsung kepada para remaja. Program ini disebut

dengan Pusat Informasi dan Konseling Reproduksi Remaja (PIK RR). Pada tahun 2021, jumlahnya mencapai 49 kelompok yang ada di tiap kecamatan.

Tabel 6.5 Jumlah Kelompok Pembinaan Keluarga di Kabupaten Purbalingga tahun 2021

No	Kategori	Jumlah
1	Jumlah kelompok BKB Aktif	259
2	Jumlah keluarga aktif ikut pertemuan BKB	29.582
3	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja	248
4	Jumlah Kelompok BKR Aktif	29.629
5	Jumlah Kelompok PIK – R	49

Sumber : DINSOSDALDUKKBP3A Kab. Purbalingga, 2021

6.3 Lembaga Pengasuhan Berkelanjutan

Di samping anak yang dapat hidup dan berkembang secara normal di lingkungan keluarga yang utuh, terdapat juga anak-anak yang hidup dalam lingkungan berisiko. Mereka adalah anak yang diasuh oleh orangtua tunggal (salah satu orangtua/ayah saja atau ibu saja) yang hal ini antara lain disebabkan oleh: terjadinya perceraian orangtuanya, salah satu orangtua meninggal, orangtua tunggal tidak mengakui anaknya, orangtua yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di dalam dan di luar negeri, orang tua yang bekerja meninggalkan rumah pada kurun waktu tertentu atau salah satu orang tua berada dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga pengasuhan berkelanjutan adalah lembaga pengganti dari pengasuhan keluarga inti (ayah dan ibu kandung)

yang dapat dialihkan kepada kerabat yang masih memiliki pertalian darah hingga tiga (3) derajat ke atas dan tiga (3) derajat ke bawah (kakek, nenek, paman, bibi dan sebagainya). Penyebabnya adalah karena sesuatu hal seperti salah satu atau kedua orangtua meninggal.

Salah satu lembaga alternatif untuk pengasuhan berkelanjutan yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang menjalankan fungsi pengasuhan anak. LKSA dalam menjalankan fungsinya dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak-anak sebagai wakil orang tua dalam memenuhi kebutuhan mental dan sosial pada anak asuh yang berupa sandang, pangan dan papan, kesehatan maupun pendidikan yang mungkin kurang didapatkan dari lingkungan asalnya. Peruntukan perlindungan yaitu bagi anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, anak dari keluarga tidak mampu termasuk juga anak terlantar. Pengasuhan dapat berupa pengambilalihan pengasuhan anak secara penuh dari orang tua atau keluarga asal dan dapat juga dengan membantu atau memberikan kebutuhan anak secara kontinuitas akan tetapi pengasuhan anak masih dalam orang tua atau keluarga asal. Pada tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga terdapat 25 LKSA yang tersebar di wilayah Kabupaten Purbalingga dengan jumlah anak asuh sebanyak 1.304 anak. Dari jumlah anak asuh sebanyak 1.053

merupakan anak asuh dalam LKSA dan sebanyak 251 merupakan anak asuh luar atau masih dalam pengasuhan keluarga.

Tabel. 6.6 - Data LKSA di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

NO.	NAMA LKS	ALAMAT	PM DALAM LKS		DALAM KELUARGA	
			L	P	L	P
1	LKSA Muhammadiyah Bobotsari	Jl. Kenduruan No 39, Bobotsari	14	31	6	9
2	LKSA Griya Al Falah	Ds. Pengadegan, Kec. Pengadegan Km 12	19	20	0	0
3	LKSA Siti Djamilah	Jl. Letkol Isdiman RT 004/001 Kel Purbalingga,	0	19	0	0
4	LKSA Nurul Istiqomah	Desa Babakan RT 14/04 Kec. Kalimanah	11	18	0	0
5	LKSA Muhammadiyah Kertanegara	Desa Kertanegara RT 01/01 Kec. Kertanegara,	17	32	11	7
6	LKSA Iklil Mahya Insani	Desa Dagan RT 03/08 Kec. Bobotsari	0	0	16	15
7	LKSA Muhammadiyah Bukateja	Jl. Argandaru No. 73 Bukateja	30	0	0	0
8	LKSA Yusufiyah	Jl. Al-Ikhlas No. 1 RT 02/05 Desa Cipawon, Kec. Bukateja	25	25	0	0
9	LKSA Darul Hadlonah	Jl. MT Haryono Karangsantul, Kec. Padamara	19	24	37	34
10	LKSA Al-Khoerot	Majasari, RT 04/04 Kec. Bukateja	45	37	0	0
11	LKSA Nurul Barokah	Desa Beji RT 01/01 Kec. Bojongsari	25	35	0	0
12	LKSA Al Husna	Dukuh Manda Lksa, Desa Patemon RT 01/09 Kec. Bojongsari	0	105	0	0
13	LKSA Putri Al-Inayah	Dusun Pasren Desa Bajong RT 01/05 Kec. Bukateja	0	20	0	0
14	LKSA Al Mujahadah	Desa Pagerandong RT 03/05 Kec. Mrebet,	10	10	0	0
15	LKSA Nurussalam	Desa Pelumutan RT 09/03 Kec. Kemangkon,	26	29	0	0
16	LKSA Nurul Huda	Desa Karangreja RT 16/09 Kec. Kutasari	35	16	0	0

17	LKSA Mandanisiwi	Jl. Wiramenggala No. 176 Kel. Penambongan, Kec.	12	53	0	0
18	LKSPD Yayasan Dharma Asih Penyandang Disabilitas	Kembaran Kulon RT 06/01 Kec. Purbalingga,	9	10	0	0
19	LKSA Nadhief Senon	Desa Senon RT 08/03 Kec. Kemangkon	10	10	0	0
20	LKSA Ar-Rohman	Jl. Pulasari RT 06/02 Desa Kalikabong, Kec. Kalimanah,	43	33	0	0
21	LKSA Yayasan Boas Suwon Korea Selatan	Jl. Bungkarno RT 03/01 Desa Grecol, Kec. Kalimanah,	18	14	0	0
22	LKSA Mamba'ul Ihsan	Jl. Yudha Tama No.03 Karangpujung Rt.03/02 Kertanegara.	20	17	0	0
23	LKSA Syahri Al Hasyimi	Desa Bungkanel Rt.02/rw 02.Kec.Karanganyar	10	22	12	29
24	LKSA Baitul Qur'an As-Suyuthi	Ds. Maribaya RT 01/03 Kec. Karanganyar	35	40	0	0
25	LKSA Hilmi Mulya	Jl. Pemuda No. 1Desa Bakulan Kec. Kemangkon	0	0	32	43
JUMLAH			433	620	114	137

Sumber : DINSOSDALDUKKBP3A Kab Purbalingga 2021

Beberapa LKSA didirikan oleh Organisasi seperti Muhammadiyah dan NU, dan tidak sedikit pula LKSA yang didirikan oleh perorang atau pribadi. Adapun sumber pembiayaan LKSA yaitu dari para donator dan juga dana hibah Pemerintah baik Pemerintah pusat maupun Daerah melalui Kementerian Sosial dan Dinas Sosial.

BAB VII

PENDIDIKAN

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar pada semua tingkatan dan satuan pendidikan baik formal, informal dan non formal. Dalam skala makro, pendidikan merupakan indikator kualitas sumber daya manusia. Semakin baik pendidikan, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Terdapat tiga pilar untuk mengkaji pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan yaitu akses dan pemerataan, mutu dan relevansi, tata kelola dan pencitraan pendidik. Tolok ukur yang digunakan antara lain angka partisipasi sekolah di berbagai jenjang, angka putus sekolah/ angka buta huruf, guru dan kepala sekolah. Pendidikan merupakan tolok ukur pembangunan sumberdaya manusia, disamping kesehatan dan pendapatan (faktor ekonomi). Terpenuhinya pendidikan yang layak bagi setiap penduduk erat kaitannya dengan kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunan. Kualitas penduduk harus ditingkatkan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dalam dimensi Gender, perlu disajikan data terpilah berdasar jenis kelamin sehingga diketahui sejauh mana akses, peluang, kontrol,

dampak dan manfaat pendidikan bagi perempuan dan laki-laki serta bias Gender yang ditimbulkan.

Indikator pendidikan seperti Angka Melek Huruf (AMH), status pendidikan, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya bagi perempuan dan anak. Semakin tinggi pendidikan dan rata-rata lama sekolah bagi perempuan akan berdampak kepada pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan bangsa.

Pada tahun 2016 telah diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 tahun. Pada pasal 2 disebutkan bahwa PIP bertujuan untuk: (a) meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/ rintisan wajib belajar 12 tahun, (b) mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, dan/atau, (c) menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga

kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya atau balai latihan kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikaji sejauh mana kebijakan tersebut telah memberikan akses yang sama bagi penduduk laki-laki maupun perempuan. Bab berikut ini menampilkan profil penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2021 dari aspek: partisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang ditamatkan, partisipasi berdasarkan kelompok umur serta partisipasi dalam Program Kejar Paket.

7.1 Partisipasi Sekolah

Untuk mengukur partisipasi penduduk usia sekolah dalam mengikuti pendidikan berdasarkan jenjang dan umur dapat diketahui dari tiga indikator yakni Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Ketiganya dapat digunakan untuk semua jenjang pendidikan. Dalam hal ini ketiganya digunakan untuk melihat jenjang SD/MI/Paket A, jenjang SMP/MTs/Paket B serta jenjang SMA/SMK/Paket C.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS usia 7-12 tahun misalnya, berarti adalah jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikalikan 100 persen. APS yang

tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur (BPS, <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=10>).

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. APM SD misalnya, adalah jumlah murid SD/ sederajat usia 7-12 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 100%. Ukuran ini digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu (BPS, <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=9>).

APK adalah Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum

mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya (BPS, <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=8>).

Untuk tahun 2019, APS anak usia 7-12 tahun secara keseluruhan adalah sebesar 99,69 persen. Dengan persentase ini menunjukkan telah diperolehnya akses bagi penduduk umur 7-12 tahun untuk memperoleh pendidikan. Namun demikian, apabila datanya dipilah berdasarkan jenis kelamin, tampak ada perbedaan yang besar antar peluang mengakses di kalangan penduduk 7-12 tahun laki-laki dan perempuan karena peluang untuk penduduk laki-laki jauh lebih besar.

Dilihat dari data APK tampak bahwa APK untuk jenjang PAUD sudah mencapai 100 persen di mana komposisi antara APK PAUD anak laki-laki dan perempuan berimbang. Adapun untuk APK jenjang SD dan SMP secara keseluruhan telah melebihi 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Namun demikian, dilihat dari APK SMP jenis kelamin tampak masih ada kesenjangan gender di mana APK perempuan lebih tinggi dibanding laki – laki dengan range yang cukup signifikan.

Sementara itu, untuk data APM tampak bahwa secara keseluruhan, APM jenjang SD maupun SMP sudah mencapai 100 persen, dimana APM jenjang SD maupun SMP antara laki – laki dan

perempuan secara umum berimbang. Untuk APM SD laki – laki lebih tinggi sedangkan untuk APM SMP perempuan lebih tinggi.

Tabel 7.1 APK, APM dan APS di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Indikator/ Bidang	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Partisipasi Kasar (APK) :			
SD / MI	*	*	108,46
SMP / MTs	*	*	92,96
SMK/ SMA / MA*	*	*	69,89
Angka Partisipasi Murni (APM) :			
SD/ MI	*	*	96,30
SMP / MTs	*	*	80,96
SMK/ SMA / MA	*	*	56,50
Angka Partisipasi Sekolah (APS) :			
7 thn s.d 12 thn	99,68	100,00	99,84
13 thn s.d 15 thn	96,99	94,58	95,83
16 thn s.d 18 thn	56,06	63,78	60,31

* Data tidak diperoleh

Sumber: <https://jateng.bps.go.id>

Kualitas pendidikan seseorang dapat dilihat dari jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan. Data ini juga bermanfaat sebagai analisis pasar kerja. Secara keseluruhan, di kalangan penduduk usia 10 tahun ke atas, persentase terbesar dari mereka adalah pada mereka yang berpendidikan rendah yakni mereka yang berpendidikan jenjang SD dan SMP. Bahkan masih ada yang tidak tamat SD dan tidak/belum. Secara keseluruhan terlihat pula bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah pula persentasenya. Fenomena ini terjadi baik di kalangan laki-laki maupun perempuan dengan angka yang berimbang.

Tabel 7.2 Persentase Penduduk Usia 10 tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		Rata - Rata
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/belum punya Ijazah sekolah Dasar	22,01	22,60	22,30
SD/ SDLB / MI	33,78	30,99	32,38
SMP / SMPLB/ MTs	21,25	25,64	23,46
SMA/ SMK/ SMLB/ MA	19,21	15,69	17,43
DI,DII, DIII/ Sarjana Muda	0,86	0,62	0,74
DIV/ S1 dan S2/S3	2,90	4,46	3,69
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2021

7.2 Partisipasi Sekolah Berdasarkan Kelompok Umur

Fenomena pendidikan juga dapat dilihat berdasarkan kelompok umur. Persentase terbesar adalah pada kelompok umur 7-12 tahun secara keseluruhan yang mencapai hampir 100 persen. Persentase terbesar berikutnya adalah pada kelompok umur 13 -15 tahun yang disusul umur 16-18 tahun. Kondisi ini tidak terlalu berbeda pada kelompok penduduk laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.3 Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Kelompok Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Rata - Rata
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
7 - 12	99,68	100,00	99,84
13 - 15	96,99	94,58	95,83
16 - 18	56,06	63,78	60,31
19 - 24	10,81	14,72	12,76

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2021

7.3 Partisipasi dalam Kejar Paket

Dalam rangka meningkatkan partisipasi sekolah, diselenggarakan pula pendidikan melalui jalur non-formal. Jalur ini meliputi Kelompok Belajar (Kejar) Program Paket A setara SD/MI, Program Paket B setara SMP/MTs dan Program Paket C setara SMA/MA. Kegiatannya dapat dilaksanakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan satuan sejenis lainnya.

Dilihat dari jenjangnya, jumlah peserta terbanyak adalah pada Program Paket C yang disusul dengan Program Paket B dan A. Untuk setiap Program paket jumlah peserta laki - laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Kesenjangan antara laki – laki dan perempuan pada setiap program kejar paket cukup signifikan. Hal ini dimungkinkan kurangnya perhatian perempuan untuk mengejar ketertinggalan pendidikan. Untuk tutor atau guru dalam Program Kejar Paket jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki – laki. Lebih

lengkapnya berikut data murid dan tutor kejar paket A, B dan C di kabupaten Purbalingga tahun 2020

Tabel 7.4 Partisipasi Peserta dan Tutor dalam Kejar Paket A, B dan C di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Bidang/ Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
	Laki-laki	%	Perempuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peserta didik:					
Kejar Paket A	78	54,93	64	45,07	142
Kejar Paket B	127	47,21	142	52,78	269
Kejar Paket C	1.993	55,62	1.590	44,38	3,583
Tutor :					
Kejar Paket A	12	57,14	9	42,86	21
Kejak Paket B	64	47,41	71	52,59	135
Kejar Paket C	51	38,64	81	61,36	132

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, 2021

Dari uraian di atas dapat dirangkum bahwa secara keseluruhan semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah pula persentase partisipasinya. Untuk tahun 2021 pendidikan formal di kabupaten purbalingga didominasi oleh perempuan sebaliknya pada jenjang pendidikan non-formal melalui jalur Program Paket, tampak bahwa jumlah peserta laki - laki lebih banyak dibandingkan perempuan.

BAB VIII

KETENAGAKERJAAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) telah menempuh berbagai kebijakan dan strategi guna mencapai tujuan pembangunan di bidang ekonomi sesuai dengan sumber daya yang ada. Hal yang penting dalam pembangunan ekonomi adalah masalah ketenagakerjaan, karena merupakan aspek yang mendasar berkaitan dengan kebutuhan akan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup. Bab ini mengungkapkan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Purbalingga dari perspektif gender dilihat dari: (1) penduduk usia kerja dan jenis kegiatannya, (2) status pekerjaan, (3) lapangan kerja serta (4) jumlah jam kerja). Di samping itu, ditampilkan pula kondisi kegiatan ekonomi di bidang perkoperasian dan pariwisata.

8.1 Penduduk Usia Kerja dan Jenis Kegiatan

Penduduk usia kerja (PUK) adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas. Golongan penduduk ini dapat dilihat berdasarkan jenis kegiatan utamanya, yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang berada pada pasar kerja yang dikategorikan sebagai penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan/usaha baru. Adapun bukan angkatan kerja adalah mereka yang melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya. Dua pertiga dari jumlah penduduk Kabupaten

Purbalingga merupakan penduduk usia kerja sebagian besar merupakan angkatan kerja. Angkatan Kerja di Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebesar 69,52 persen dari penduduk usia kerja. Adapun sisanya adalah mereka yang bukan angkatan kerja. Mayoritas angkatan kerja adalah mereka yang bekerja. Hal ini terjadi baik di kalangan laki-laki maupun perempuan.

Apabila dilihat dari jenis kelaminnya, maka persentase angkatan kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, yakni 59,39 persen, sedangkan perempuan 40,61 persen. Mayoritas angkatan kerja baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan adalah bekerja. Untuk mereka yang bekerja, sebagian dari mereka adalah laki-laki (58,99 persen).

Tahun 2021 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (tPAK) 69,52 tingkat pengangguran terbuka 6,05. Tingkat pengangguran terbuka laki-laki 6,69 persen dari total angkatan kerja lebih tinggi dibanding dengan tingkat pengangguran terbuka perempuan yakni 5,11.

Adapun pada kelompok bukan angkatan kerja, mayoritas dari mereka adalah kalangan perempuan (74,53 persen). Dikelompok bukan angkatan kerja kalangan laki-laki kebanyakan melakukan kegiatan sekolah dan sedangkan di kalangan perempuan kegiatan bukan angkatan kerjanya adalah sebagai ibu rumah tangga.

Tabel 8.1 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Kegiatan Utama		Jenis Kelamin				Jumlah	%
		Laki - Laki	%	Perempuan	%		
1.	Angkatan Kerja	299.139	59,39	204.543	40,61	503.682	69,52
	1.1 Bekerja	279.139	58,99	194.093	41,01	473.232	93,95
	1.2 Pengangguran Terbuka	20.000	65,68	10.450	34,32	30.450	6,05
2.	Bukan Angkatan Kerja	56.240	25,47	164.548	74,53	220.788	30,48
	JUMLAH	355.379	49,05	369.091	50,95	724.470	100,00
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	84,17		55,42		69,52	
	Tingkat Pengangguran	6,69		5,11		6,05	

Sumber: BPS Purbalingga Dalam Angka 2021

Dalam empat tahun terakhir tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Purbalingga secara total mengalami sedikit naik turun dan masih di dominasi oleh laki – laki, dimana kesenjangan antara tPAK laki – laki dan tPAK perempuan cukup signifikan. Demikian pula berbanding lurus dengan tPAK tingkat pengangguran di Kabupaten Purbalingga dalam empat tahun terakhir juga mengalami sedikit naik turun dan tingkat pengangguran laki – laki selama empat tahun terakhir juga masih diatas tingkat pengangguran perempuan akan tetapi angka tersebut masih berimbang, kesenjangan terjadi tidak terlalu signifikan.

Tabel 8.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran dalam Empat Tahun Terakhir.

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (tPAK)			Tingkat Pengangguran		
	L	P	Total	L	P	Total
2018	83,17	58,10	70,33	6,79	5,05	6,06
2019	81,67	54,74	67,88	5,07	4,37	4,78
2020	85,11	55,26	69,89	6,82	5,03	6,10
2021	84,17	55,42	69,52	6,69	5,11	6,05

Sumber : BPS Purbalingga Dalam Angka 2018, 2019, 2020 dan 2021

8.2 Status Pekerjaan

Di antara mereka yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, dapat dibedakan berdasarkan status pekerjaannya. Penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja di Purbalingga didominasi jenis kelamin laki laki yaitu 58,99 persen dan sisanya sebesar 41,01 persen adalah perempuan. Berdasarkan jenis pekerjaan penduduk bekerja di Kabupaten Purbalingga berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai (33,47 persen), disusul dengan berusaha sendiri (21,02 persen) dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar (18,10 persen).

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, tampak bahwa mayoritas dari kelompok angkatan kerja laki-laki maupun perempuan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai (37,83 persen) di mana persentase di kalangan laki - laki dan perempuan seimbang yakni 50,40 dan 49,60 persen. Kemudian terbanyak kedua adalah berusaha sendiri yakni 20,35 persen dimana prosentase laki laki 63,55 persen dan perempuan 36,45 persen. Disusul berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar sebanyak 16,76 persen dengan prosentase laki – laki 66,44 persen dan perempuan 33,56 persen. Untuk jenis status pekerjaan utama laki - laki secara prosentase diatas perempuan hanya pada status pekerjaan utama pekerja keluarga /tak berbayar dimana perempuan secara prosentase lebih tinggi dari laki – laki yaitu 67,47. Sehingga dapat disimpulkan perempuan banyak bekerja di keluarga.

Tabel 8.3 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Status pekerjaan utama	Jenis Kelamin				Jumlah	%
	Laki - Laki	%	Perempuan	%		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
- Berusaha sendiri	61.195	63,55	35.099	36,45	96.294	20,35
- Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	52.698	66,44	26.615	33,56	79.313	16,76
- Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	15.471	85,27	2.673	14,73	18.144	3,83
- Buruh/karyawan/pegawai	90.222	50,40	88.783	49,60	179.005	37,83
- Pekerja Bebas	43.841	84,03	8.334	15,97	52.175	11,03
- Pekerja keluarga / takdibayar	15.712	32,53	32.589	67,47	48.301	10,21
JUMLAH	279.139	58,99	194.093	41,01	473.232	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2021

8.3 Lapangan Usaha Utama

Lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/ perusahaan/kantor dimana seseorang bekerja. Lapangan pekerjaan utama di kelompokkan menjadi 3 yaitu pertanian, manufaktur dan jasa. Secara keseluruhan, sebagian besar pekerja bekerja di bidang jasa sebesar 41,42 persen, disusul dengan bidang manufaktur sebesar 35,20 persen, serta pertanian sebesar 23,39 persen.

Secara pilah gender laki – laki mendominasi diseluruh lapangan pekerjaan. Dominasi tertinggi di lapangan pekerjaan pertanian di mana laki – laki mendominasi sebanyak 76,28 persen sedangkan jenis lapangan kerja lainnya laki – laki mendominasi akan tetapi tidak terjauh kesenjanganannya.

Tabel 8.4 Jumlah Penduduk Umur 15 tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Jenis Lapangan Pekerjaan	Jenis Kelamin				Jumlah	%
	Laki - Laki	%	Perempuan	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Pertanian	84.433	76,28	26.251	23,72	110.684	23,39
- Manufaktur	85.593	51,39	80.964	48,61	166.557	35,20
- Jasa	109.113	55,67	86.878	44,33	195.991	41,42
JUMLAH	279.139	58,99	194.093	41,01	473.232	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2021

8.4 Pasar Tenaga kerja

Untuk jumlah kumulatif pencari kerja tahun 2021 sebanyak 163.057 orang dan didominasi oleh pencari kerja laki – laki sebanyak 74,22 persen. Untuk jumlah kumulatif permintaan tenaga kerja di pasaran sebanyak 19.877 ini hanya 12,19 persen dari penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja didominasi oleh permintaan tenaga kerja perempuan sebanyak 76,02 persen. Hal ini dimungkinkan adanya pembukaan perusahaan rambut yang di Purbalingga dimana perusahaan ini banyak menyerap tenaga perempuan. Permintaan tenaga kerja berbanding terbalik dengan komposisi pencari kerja dimana laki – laki lebih banyak. Dari permintaan tenaga kerja di pasar tidak semua terpenuhi oleh tenaga kerja yang ditawarkan, penempatan tenaga kerja hanya sebanyak 33,37 persen dari permintaan tenaga kerja.

Tabel 8.5 Jumlah Pencari Kerja, Permintaan Tenaga Kerja dan Pemenuhan Tenaga Kerja di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Jenis Lapangan Pekerjaan	Jenis Kelamin				Jumlah
	L	%	P	%	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
- Sisa pencari kerja tahun sebelumnya dan pendaftar pencari kerja tahun 2021	121.013	74,22	42.044	25,78	163.057
- Sisa permintaan tenaga kerja tahun sebelumnya dan permintaan tenaga kerja tahun 2021	4.766	23,98	15.111	76,02	19.877
- Penempatan Tenaga Kerja	520	7,84	6.112	92,16	6.632

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2021

8.5 AKAN, AKAD dan Pengangguran Terbuka

Untuk Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 sebanyak 51 jumlah ini menurun dari tahun 2020 yaitu dari 75 menjadi 51. AKAN dari tahun ke tahun masih didominasi oleh perempuan termasuk tahun 2021 yaitu sebesar 82,35 persen hal dimungkinkan para tenaga kerja rata rata bekerja di rumahan/rumah tangga. Dan untuk tenaga kerja migran, AKAD dan Data tenaga kerja non formal tahun 2021 informasi tidak didapat.

Tabel 8.6 Kondisi Ketenagakerjaan dilihat dari AKAN, AKAD dan Pengangguran Terbuka di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
	Laki-laki	%	Perempuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tenaga Kerja Migran*					
Tenaga Kerja di Sektor Formal	17.739	32,93	36.130	67,07	53.869
Tenaga Kerja di sektor Informal*					
Tenaga Kerja Antar Negara (AKAN)	9	17,65	42	82,35	51
Tenaga Kerja Antar Daerah (AKAD)*					

Keterangan: *: tidak ada datanya

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga, 2021

Di samping kondisi ketenagakerjaan secara umum, aktivitas perekonomian masyarakat juga dapat terlihat di berbagai bidang, antara lain bidang pertanian dan peternakan dan perkoperasian. Di bidang pertanian, keberadaan mereka tampak dari aktivitas dalam kelompok tani. Dalam hal ini, para petani perempuan terwadahi dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) yang berjumlah 150 kelompok. Adapun jumlah pengurusnya adalah sebanyak 450 orang dengan jumlah anggota sebanyak 4.500 orang.

Tabel 8.7 Aktivitas di Bidang Pertanian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Bidang/Indikator		Jenis Kelamin				Jumlah
		L	%	P	%	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kelompok Tani Sektor Pertanian					1.127
	Pengurus Kelompok Tani Sektor Pertanian	4.510	80,04	1.125	19,96	5.635
	Anggota Kelompok Tani Sektor Pertanian	55.204	75,76	17.663	24,24	72.867
	Kelompok Wanita Tani (KWT)			150	100,00	150
	Pengurus KWT			450	100,00	450
2	Anggota KWT			4.500	100,00	4.500
	Kelompok Tani Sektor Pekebunan					17
	Pengurus Kelompok Tani Sektor Pekebunan	75	88,24	10	11,76	85
	Anggota Kelompok Tani Sektor Pekebunan	1.383	88,60	178	11,40	1.561
3	Kelompok Tani Sektor Peternakan					271
	Pengurus Kelompok Tani Sektor Peternakan	1.084	80,00	271	20,00	1.355
	Anggota Kelompok Tani Sektor Peternakan	4.053	95,50	191	4,50	4.244

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, 2021

Adapun untuk kegiatan ekonomi di bidang perikanan, tampak bahwa bidang ini masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini tampak dari

sedikitnya jumlah perempuan pembudidaya ikan dan tidak adanya perempuan pembudidaya ikan yang menjadi percontohan budidaya minapadi maupun yang aktif dalam kegiatan minapolitan sebagaimana tampak dari tabel berikut ini.

Tabel 8.8 Aktivitas di Bidang Perikanan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No.	Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-laki	%	Perempuan	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembudidaya Ikan	10.243	98,00	209	2,00	10.452
2	Pembudidaya Ikan yang menjadi percontohan budidaya minapadi	75	100,00	0	0.00	75
3	Pembudidaya ikan yang menjadi percontohan budidaya UGADI*					
4	Pembudidaya ikan yang menjadi percontohan budidaya nila salin*					
5	Pembudidaya ikan yang aktif dalam temu lapang pakan ikan berbahan baku lokal dan pengembangan kawasan minapolitan*					

Keterangan:

*: tidak ada datanya

Sumber: DKPP Kabupaten Purbalingga, 2021

Koperasi dan UMKM sebagai gerakan ekonomi rakyat sangat mempengaruhi ekonomi kelas bawah. Untuk koperasi aktif di Kabupaten Purbalingga sebanyak 131 unit dan 6 diantaranya merupakan koperasi wanita. Adapun kategori koperasi aktif yaitu koperasi yang dalam 3 tahun berturut – turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melaksanakan kegiatan perkoperasian. Dari 131 koperasi aktif terdapat anggota koperasi sebanyak 41.582 orang dimana 24.426 orang atau 58,76 persen adalah laki – laki dan 17.156 orang atau 41,26 merupakan anggota perempuan. Manager koperasi

sebanyak 34 orang, untuk manager laki - laki sebanyak 24 orang atau 70,59 persen dan sebanyak 10 orang atau 29,41 persen merupakan manager perempuan. Jumlah penyerapan tenaga kerja dibidang perkoperasian sebanyak 447 orang, dan sebanyak 280 orang atau 62,64 persen adalah laki – laki dan sebanyak 167 orang atau 27,36 persen adalah perempuan. Untuk usahan mikro, kecil dan menengah (UMKM) dikabupaten purbalingga mendapat perhatian yang besar hal ini dikarenakan peran UMKM yang cukup besar dalam menyumbang pertumbuhan perekonomian dan juga penyerapan tenaga kerja yang tinggi yang dapat menjadi solusi pengangguran di Kabupaten Purbalingga. Ditahun 2021 UMKM merupakan usaha yang mampu bertahan dimasa pandemi covid 19. Pelaku UMKM tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga sebanyak 97.537 orang yang menjadi binaan DINKOPUMKM Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebanyak 2.278. Adapun binaan tersebut berupa pendampingan, pemberian bantuan permodalan, pelatihan dan pemasaran kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Tabel 8.9 Kegiatan di Bidang Perkoperasian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
	Laki-laki	%	Peremp	%	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Jumlah Koperasi Aktif					131
Jumlah Anggota Koperasi Aktif	24.426	58,74	17.156	41,26	41.582
Jumlah Koperasi Wanita/Perempuan			-	6	6
Jumlah Anggota Koperasi Wanita	27	2,82	929	97,18	956
Jumlah Manager Koperasi	24	70,59	10	29,41	34
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Koperasi	280	62,64	167	37,36	447
Jumlah Pelaku (Pemilik) UMKM Binaan					2.278
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja UMKM*					

Sumber: Dinas Koperasi Kabupaten Purbalingga, 2021

Sektor lain yang menggiatkan usaha di Purbalingga adalah dari bidang pariwisata. Di Purbalingga, saat ini terdapat 29 desa wisata. Dari sektor pariwisata masih didominasi oleh laki – laki baik itu dari kepemilikan hotel, tenaga kerja pengelola desa wisata, penyerapan tenaga kerja di bidang pariwisata maupun pramuwisata. Perempuan hanya didominasi di kepemilikan warung makan dan penyerapan tenaga kerja di warung makan. Adapun jumlah warung makan merupakan usaha warung makan yang telah memiliki/mengurus perizinan usaha warung makan. Gambaran kepemilikan dan ketenagakerjaan sector hiburan dan pariwisata sebagai berikut.

Tabel 8.10 Kegiatan Usaha Desa Wisata, Warung Makan, Perhotelan, Tempat Hiburan Malam dan Obyek Wisata di kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No.	Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-laki	%	Perempuan	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Desa Wisata					29
2	Pemilik Hotel	11	84,62	2	15,38	13
3	Pemilik Warung Makan	12	28,57	30	71,43	42
4	Pengelola Desa Wisata	136	72,73	51	27,27	187
5	Tenaga Kerja di Warung Makan	50	31,25	110	68,75	160
6	Tenaga Kerja di Obyek Wisata	318	75,71	102	24,29	420
7	Pramuwisata	46	75,41	15	24,59	61

Sumber: Dinporapar Kabupaten Purbalingga, 2021

Dari gambaran di atas tampak bahwa di sektor usaha perempuan cukup banyak terlibat di bidang perdagangan kecil dan terutama sebagai buruh perusahaan. Hal ini menguatkan dugaan dominannya perempuan di perusahaan-perusahaan rambut (bulu mata dan rambut palsu) yang banyak berdiri di Purbalingga. Keberadaan perempuan juga cukup terlihat pada kegiatan UMKM dan pertanian, akan tetapi kurang terlihat di sektor perikanan dan pariwisata.

BAB IX

POLITIK DAN SEKTOR PUBLIK

Kondisi penduduk di bidang politik dan sektor publik menjadi salah satu bidang yang dijadikan indikator tingkat keberdayaan perempuan yang dikenal dengan indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Untuk bab ini ditampilkan data yang terkait dengan fenomena kondisi gender di DPRD yang dilihat dari asal partai dan komisi serta umurnya serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun 2020. Ditampilkan pula fenomena gender di berbagai organisasi publik baik di lingkungan Pemkab Purbalingga sampai dengan pemerintahan di tingkat pedesaan maupun organisasi-organisasi vertikal yang ada di Purbalingga.

9.1 Politik dan Legislatif

Untuk keanggotaan di lembaga DPRD Kabupaten Purbalingga, dari sejumlah 45 orang anggota, sebanyak 22,22 persen (10 orang) diantaranya perempuan. Pada periode 2019 – 2024 jumlah perempuan yang duduk di Legislatif menurun dibandingkan periode sebelumnya 2014 – 2019 yaitu 31,11 persen atau (14 orang) dari total jumlah Legislatif. Kebanyakan dari mereka berasal dari partai PDIP sebanyak 3 orang disusul PKS 2 orang dengan masing-masing 1 orang yaitu PPP, PAN, partai Gerinda, Partai Golkar dan Partai nasdem. Berikut ini ditampilkan tabelnya.

Tabel 9.1 Jumlah Anggota DPRD di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No.	Partai Politik	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Partai Persatuan Pembangunan	1	50,00	1	50,00	2	4,44
2	Partai Demokrat	2	100,00	0	0,00	2	4,44
3	Partai Amanat Nasional	3	75,00	1	25,00	4	8,89
4	Partai Kebangkitan Bangsa	9	100,00	0	0,00	9	20,00
5	Partai Keadilan Sejahtera	2	50,00	2	50,00	4	8,89
6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7	70,00	3	30,00	10	22,22
7	Partai Gerindra	5	83,33	1	16,67	6	13,33
8	Partai Hanura						
9	Partai Golongan Karya	6	85,71	1	14,29	7	15,56
10	Partai Nasdem	0	0,00	1	100,00	1	2,22
11	Partai Perindo						
Jumlah		35	77,78	10	22,22	45	100,00

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga 2021

Sementara itu, komposisi pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga yaitu 3 laki-laki dan 1 perempuan. Apabila dilihat dari sebaran anggota dalam Komisi, maka Komisi III memiliki jumlah anggota perempuan terbanyak, sedangkan Komisi IV memiliki jumlah anggota perempuan paling sedikit.

Tabel 9.2 Jumlah Anggota DPRD Menurut Komisi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Bidang/Indikator	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Komisi I	8	2	10
2. Komisi II	9	2	11
3. Komisi III	6	4	10
4. Komisi IV	9	1	10
Jumlah	32	9	41

Sumber: Sekretariat DPRD Purbalingga, 2021

Secara keseluruhan, sebagian besar anggota DPRD Purbalingga adalah mereka yang berumur sedang yakni 41-50 tahun.

Hal ini terutama terjadi dikalangan anggota laki-laki, meskipun ada juga yang berumur tua (61-70 tahun). Adapun di kalangan anggota perempuan, kebanyakan berusia lebih muda (31-40 tahun). Terdapat juga anggota perempuan 41-60 tahun, namun tidak ada yang berusia tua (21-30 tahun) dan usia (61-70 tahun).

Tabel 9.3 Umur Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No.	Umur Anggota DPRD	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-laki	%	Perempuan	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	21 - 30 Tahun	1	100,00	0	0	1
2	31 - 40 Tahun	3	42,86	4	57,14	7
3	41 - 50 Tahun	15	75,00	5	25,00	20
4	51 - 60 Tahun	10	90,91	1	9,09	11
5	61 - 70 Tahun	6	100,00	0	0	6
	Jumlah	35	77,78	10	22,22	45

Sumber: Sekretariat DPRD Purbalingga, 2021

Keberadaan keanggotaan DPRD tersebut tidak terlepas dari proses Pemilihan Umum yang berlangsung sebelumnya. Dalam proses tersebut, terdapat 491 calon anggota legislatif yang sebagian besarnya (59,06 persen) adalah laki-laki dan 40,94 persen calon legislatif perempuan. Mereka berasal dari berbagai partai politik yang kebanyakan dipimpin oleh laki-laki dari 15 partai politik 13 diantaranya (86,67 persen) dipimpin oleh laki – laki dan 2 partai politik (13,33 persen) dipimpin oleh perempuan. Adapun jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih adalah sebanyak 737.595 orang di mana persentase antara laki – laki dan perempuan berimbang yaitu 50,26

persen laki – laki dan 49,74 persen perempuan. Namun demikian, persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki (53,06 persen).

Tabel 9.4 Jumlah Calon Anggota Legislatif dan Pemilih di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No.	Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-laki	%	Perempuan	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Calon Legislatif (Caleg)	290	59,06	201	40,94	491
2	Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Pilih	378.042	50,26	374.169	49,74	752.211
3	Jumlah Penduduk yang Gunakan Hak Pilih	277.214	46,94	313.340	53,06	590.554
4	Jumlah Pimpinan Partai Politik	13	86,67	2	13,33	15
5	Jumlah Kepengurusan Partai Politik	319	70,73	132	29,27	451

Sumber: KPUD Kabupaten Purbalingga, 2021

9.2 Pemerintahan Kabupaten

Pada tahun 2021 Kabupaten masih dipimpin oleh Bupati seorang perempuan dengan wakil seorang laki – laki. Dalam menjalankan roda pemerintahan Bupati dibantu oleh sejumlah pejabat eselon II, III dan IV serta sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Lainnya. Di tingkat kecamatan, Bupati dibantu oleh 18 Camat yang terdiri dari 17 camat laki – laki dan 1 orang camat perempuan.

Jumlah ASN di Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebanyak 6.526 orang di mana jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki yaitu 3.573 orang atau 54,75 persen dan laki – laki sebanyak 2.953 orang atau 45,25 persen. Dilihat dari jenjang eselon, tampak bahwa laki-laki mendominasi semua eselon, terutama eselon tertinggi yakni eselon II. Pada eselon II, dari 31 pejabat, hanya terdapat 2

pejabat perempuan atau 6,45 persen. Untuk pejabat eselon III dari 147 pejabat, perempuan hanya 38 orang atau 25,85 persen. Dan untuk eselon IV dari 252 pejabat untuk perempuan hanya 96 orang atau 38,10 persen.

Tabel 9.5 Jabatan dan Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Golongan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No.	Jabatan	Jenis Kelamin				Jumlah
		L	%	P	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Jumlah Bupati			1	100,00	1
2	Jumlah Wakil Bupati	1	100,00		0,00	1
3	Jumlah Camat	17	94,44	1	5,56	18
4	Jumlah Pejabat Eselon II	29	93,55	2	6,45	31
5	Jumlah Pejabat Eselon III	109	74,15	38	25,85	147
6	Jumlah Pejabat Eselon IV	156	61,90	96	38,10	252
7	Jumlah PNS	2.953	45,25	3.573	54,75	6.526
8	Jumlah PNS Gol IV	776	48,23	833	51,77	1.609
9	Jumlah PNS Gol III	1.503	38,81	2.370	61,19	3.873
10	Jumlah PNS Gol II	590	62,11	360	37,89	950
11	Jumlah PNS Gol I	84	89,36	10	10,64	94

Sumber: BKPPD Kabupaten Purbalingga, 2021

Ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten adalah para ASN yang tersebar di berbagai unit kerja di lingkungan Pemkab Purbalingga. Persebaran ASN yang di berbagai unit kerja didominasi oleh laki – laki. Prosentase ASN perempuan hanya dominasi di unit kerja bidang kesehatan dan pendidikan. Untuk Dinas kesehatan ASN perempuan sangat dominan hal dikarenakan adanya profesi tertentu yang dikhususkan untuk perempuan yaitu bidan, dimana profesi ini wajib ada di setiap desa yang sering disebut bidan desa. Dominasi ASN perempuan setelah Dinas Kesehatan yaitu pada Dinas Pendidikan dimana ASN pada Dinas Pendidikan

didominasi oleh profesi guru, walaupun profesi guru merupakan profesi umum yang tidak terkait dengan jenis kelamin akan tetapi profesi ini didominasi oleh perempuan hal ini dimungkinkan adanya persepsi bahwa profesi guru lebih cocok dengan perempuan karena terkait dengan anak – anak.

Tabel 9.6 Jumlah PNS dan CPNS Daerah Otonomi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin				
		L	%	P	%	Jumlah
	-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Sekretariat Daerah	94	71,76	37	28,24	131
2	Sekretariat DPRD	12	63,16	7	36,84	19
3	Inspektorat Daerah	25	56,82	19	43,18	44
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian & Pengembangan Daerah	19	70,37	8	29,63	27
5	Badan Keuangan Daerah	37	56,92	28	43,08	65
6	Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan Daerah	17	47,22	19	52,78	36
7	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	1.780	41,33	2.527	58,67	4.307
8	Dinas Kesehatan	352	27,52	927	72,48	1.279
9	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	73	97,33	2	2,67	75
10	Dinas Perumahan & Pemukiman	18	75,00	6	25,00	24
11	Dinsos Dalduk KB P3A	18	54,55	15	45,45	33
12	Dinas Tenaga Kerja	26	81,25	6	18,75	32
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	25	71,43	10	28,57	35
14	Dinas Pertanian	78	53,06	69	46,94	147
15	Dinas Lingkungan Hidup	85	88,54	11	11,46	96
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11	50,00	11	50,00	22
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15	62,50	9	37,50	24
18	Dinas Perhubungan	31	83,78	6	16,22	37
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	14	53,85	12	46,15	26
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	10	52,63	9	47,37	19
21	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	57,14	9	42,86	21
22	Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata	18	66,67	9	33,33	27
23	Dinas Kearsipan & Perpustakaan	12	63,16	7	36,84	19
24	Dinas Perindustrian & Perdagangan	46	77,97	13	22,03	59

25	Satuan Polisi Pamong Praja	43	86,00	7	14,00	50
26	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	9	75,00	3	25,00	12
27	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	100,00	0	0,00	12
30	Kantor Kecamatan	154	73,68	55	26,32	209
31	Kantor Kelurahan	68	62,96	40	37,04	108
	Jumlah	3.114	44,52	3.881	55,48	6.995

Sumber: BKPPD Kabupaten Purbalingga 2021

Di samping para ASN yang merupakan pegawai di lingkungan

Pemkab Purbalingga, terdapat pula sejumlah ASN yang berasal dari lembaga-lembaga publik di luar lingkungan Pemkab Purbalingga, Jumlah mereka adalah sebanyak 1,470 orang di mana lebih dari separuhnya (51,56 persen) adalah perempuan, Mereka tersebar di lembaga - lembaga Pemerintah yang merupakan instansi vertikal, Instansi dengan jumlah ASN terbanyak yaitu pada Kementerian Agama yakni sebanyak 1,044 ASN dari 1,470 ASN diseluruh instansi vertikal yang ada di Kabupaten Purbalingga, ASN pada Kementrian Agama didominasi oleh ASN Perempuan yaitu sebanyak 604 orang atau 58,14 persen dan sisanya adalah laki – laki, Jenis profesi ASN di Kemenag mayoritas sebagai guru atau pendidik di tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah,

Tabel 9.7 Banyaknya PNS dan CPNS di Luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin				
		Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengadilan Negeri Purbalingga	15	51,72	14	48,28	29
2	Pengadilan Agama Purbalingga	18	85,71	3	14,29	21
3	Rumah Tahanan Negara Purbalingga	45	81,82	10	18,18	55
4	Kantor Pertanahan Purbalingga	22	66,67	11	33,33	33
5	Polres Purbalingga	18	47,37	20	52,63	38

6	Kodim 0702 Purbalingga	13	68,42	6	31,58	19
7	Kejaksaan Negeri Purbalingga	22	55,00	18	45,00	40
8	Kantor Kementerian Agama Purbalingga	437	41,86	607	58,14	1.044
9	Badan Pusat Statistik Purbalingga	23	67,65	11	32,35	34
10	RUPBASAN Purbalingga	12	66,67	6	33,33	18
11	Pangkalan TNI AU Jenderal Besar Soedirman	9	45,00	11	55,00	20
12	KPP Pratama Purbalingga	65	70,65	27	29,35	92
13	Badan Narkotika Nasional Purbalingga	4	33,33	8	66,67	12
14	Komisi Pemilihan Umum Purbalingga	9	60,00	6	40,00	15
JUMLAH		712	48,44	758	51,56	1,470

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2021

9.3 Pemerintahan Desa

Menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini akan ditampilkan kondisi Pemerintahan Desa di Kabupaten Purbalingga tahun 2021, Data per Desember 2021 untuk Kepala Desa se Kabupaten Purbalingga sejumlah 222 Kepala Desa, Kepala Desa di Kabupaten Purbalingga masih didominasi oleh laki – laki yaitu sebanyak 194 orang atau 87,39 persen dari 224 Kepala Desa Se kabupaten Purbalingga sedangkan selebihnya sebanyak 28 orang atau 12,50 persen adalah

Perempuan, Dalam menjalankan tugasnya, para kepala desa dibantu oleh perangkat desa, Jumlah mereka adalah sebanyak 2,311 orang dimana perangkat desa laki - laki sebanyak 1,867 orang atau 80,79 persen dan sebanyak 444 orang atau 19,21 persen adalah perangkat desa perempuan, Untuk lembaga lain di tingkat pemerintahan Desa/Kelurahan seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) berdasarkan data yang telah terhimpun terdapat 1,534 anggota BPD/LMK dimana sebanyak 1,163 orang atau 75,81 persen adalah laki – laki sedangkan sebanyak 371 orang atau 24,19 persen adalah perempuan, Dalam tata tertib pembentukan BPD harus memperhatikan keterwakilan perempuan, hal ini yang mendasari jumlah anggota BPD/LMK perempuan mencapai lebih dari 20 persen, Untuk Ketua RW dan RT se Kabupaten Purbalingga masih sangat didominasi oleh laki – laki, untuk Ketua RW Perempuan se Kabupaten Purbalingga hanya 0,90 persen sedangkan untuk ketua RT 1,95 Persen,

Tabel 9,8 Kondisi Kepemerintahan di Desa/Kelurahan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
	Laki-laki	%	Perempuan	%	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1, Kepala Desa Se Kabupaten Purbalingga	196	87,50	28	12,50	224
2, Perangkat Desa	1.867	80,79	444	19,21	2.311
3, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Sebutan Lainnya	1.163	75,81	371	24,19	1.534
4, Ketua RW se Kabupaten Purbalingga	1.540	99,10	14	0,90	1.554
5, Ketua RT se Kabupaten Purbalingga	5.022	98,05	100	1,95	5.122

Sumber : Dinpermasdes Kab Purbalingga 2021

9.4 Kepolisian

Kepolisian Resor (Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota, Polres membawahi sejumlah wilayah Kepolisian Sektor (Polsek) di tingkat kecamatan, Jabatan di bidang kepolisian ini merupakan salah satu wujud organisasi publik yang untuk itu perlu diketahui gambarannya dari perspektif gender,

Wilayah Kabupaten Purbalingga terbagi menjadi 16 Polsek di tingkat kecamatan, Saat ini Polres Purbalingga dipimpin oleh seorang laki-laki, Dan untuk tahun 2021 dari 16 Polsek se Kabupaten Purbalingga dipimpin oleh Kapolsek yang semuanya laki – laki, Sementara jumlah polisi wanita di wilayah Resort Purbalingga sebanyak 58 orang atau 7,39 persen dari total jumlah polisi di wilayah Resort Purbalingga, Walaupun secara prosentase Polisi Wanita masih kecil namun sudah dapat mewakili keterwakilan perempuan untuk posisi jabatan publik di Kepolisian Resort Purbalingga,

Tabel 9.9 Pejabat dan Pegawai di Kepolisian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
	L	%	P	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepala Polres/Polrestabes (Kepolisian)	1	100,00	0	0,00	1
Kepala Polisi Sektor (Kapolsek)	16	100,00	0	0,00	16
Pejabat Polisi di Wilayah Polres	250	96,53	9	3,47	259
Polisi di Polres	727	92,61	58	7,39	785

Sumber: Polres Kabupaten Purbalingga 2021

9.5 Yudikatif

Di lembaga yudikatif khususnya Kejaksaan, terdapat 40 orang PNS dimana 45,00 persen merupakan wanita, Untuk pejabat di kejaksaan Purbalingga ada 15 orang, dan 11 orang atau 84,62 persen merupakan laki – laki sedangkan selebihnya 2 orang atau 15,38 persen, Untuk jumlah jaksa di Kejaksaan Purbalingga terdapat 15 orang Jaksa dengan 11 orang atau 73,33 persen merupakan jaksa laki – laki sedangkan 4 orang atau 26,67 persen merupakan jaksa perempuan.

Tabel 9.10 Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Tahun 2021

No,	Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-laki	%	Perempuan	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Pegawai di Kejaksaan Purbalingga	22	55,00	18	45,00	40
2	Pejabat di Kejaksaan	11	84,62	2	15,38	13
3	Jaksa di Kejaksaan	11	73,33	4	26,67	15

Sumber: Kejaksaan Negeri Purbalingga 2021

Pada lembaga Pengadilan Negeri (PN), pada per Desember Tahun 2021 terdapat terdapat 28 PNS dimana 46,43 persen adalah perempuan dan selebihnya 53,17 persen adalah laki – laki, Sementara dari 8 pejabat di Pengadilan Negeri komposisi antara pejabat laki – laki sebesar 62,50 persen dan perempuan 37,50 persen, Untuk hakim di PN Purbalingga dari 5 hakim yang ada 2 diantaranya merupakan hakim perempuan,

Tabel 9.11 Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No,	Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
		L	%	P	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PNS di PN Menurut Golongan	15	53,57	13	46,43	28
2	Pejabat di PN	5	62,50	3	37,50	8
3	Hakim di PN	3	60,00	2	40,00	5

Sumber: Pengadilan Negeri Purbalingga, 2021

Sementara itu, di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga, data tahun 2021 menunjukkan bahwa dari 21 orang pegawai yang ada, terdapat 19,05 persen pegawai perempuan dan 80,95 persen pegawai laki - laki, Dan untuk 4 orang pejabat 1 orang laki – laki dan 3 orang perempuan, Dan untuk hakim sejumlah 5 orang yang semuanya juga laki - laki,

Tabel 9.12 Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Agama di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No,	Bidang/Indikator	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-laki	%	Perempuan	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah PNS di PA Purbalingga	17	80,95	4	19,05	21
2	Jumlah Pejabat di PA	1	91,67	3	8,33	4
3	Jumlah Hakim di PA	5	100,00	0	0,00	5

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga, 2021

Dari uraian tentang dunia politik dan publik di berbagai bidang tersebut dapat dirangkum beberapa hal, Pertama, di bidang politik tampak bahwa meskipun perempuan tidak dominan di dunia politik

(baik di tingkat partai maupun di Lembaga DPRD), namun tingkat partisipasi mereka untuk menggunakan hak pilih lebih tinggi dibandingkan laki-laki, Kedua, di bidang pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten, meskipun jumlah ASN perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki – laki namun yang menduduki jabatan strategis masih sangat sedikit, Di lingkungan pemerintahan desa masih banyak di dominasi laki – laki, Demikian pula dengan di lembaga-lembaga publik jenjang vertikal lainnya seperti kepolisian dan pengadilan,

BAB X

KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Fenomena kekerasan berbasis gender lebih spesifik dibandingkan dengan kekerasan pada umumnya, Menurut *Inter-Agency Standing Committee* (IASG), kekerasan berbasis gender (KBG) adalah: 'Terminologi payung untuk semua tindakan membahayakan yang dilakukan di luar kehendak orang tersebut yang didasarkan atas perbedaan peran laki-laki dan perempuan, Ada beberapa bentuk kekerasan berbasis gender, antara lain : (1) seksual (2) fisik; (3) Praktek tradisional yang membahayakan; (4) sosial ekonomi dan (5) emosional dan psikologis (<https://pkbi-diy.info/kekerasan-berbasis-gender-kbg/>),

Pengesahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah berlangsung selama 16 tahun, Adapun lingkup rumah tangga dalam UU tersebut meliputi: a) suami, istri, dan anak; b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, Dan korban KDRT kebanyakan adalah perempuan dan anak,

Regulasi perlindungan anak di Indonesia telah mengalami perubahan – perubahan seiring dengan perubahan situasi dan kondisi, UU

Nomor 23 tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan atau pembaruan sebanyak 2 kali yaitu di tahun 2014 dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, perubahan kedua di tahun 2016 dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang, Dalam UU Perlindungan Anak Pasal 1 point 1 yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan, Dan pasal 1 ponit 15a yang dimaksud Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, Dan setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (UU no 23 tahun 2002 pasal 16), Untuk ancaman hukuman pelaku kekerasan terhadap anak seiring perubahan undang – undang perlindungan anak maka ancaman hukuman semakin berat, hal ini menggambarkan perhatian pemerintah yang semakin besar terhadap perlindungan anak,

Dalam Undang – Undang Perlindungan Anak memandatkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta Pemerintah Daerah untuk

bertanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak yang diimplementasikan dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, penyelenggaraan lembaga pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pelatihan pelayanan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DINSOSDALDUKKBP3A yang merupakan kepanjangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga berkomitmen dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Untuk penanganan dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dibentuklah Pusat Pelayanan Terpadu Hapus Kekerasan pada Perempuan dan Anak (PPT-HARAPAN), Anggota Tim PPT Harapan merupakan lintas sektoral yaitu gabungan dari berbagai instansi yang terkait dengan proses penanganan kekerasan dan Lembaga Organisasi Masyarakat, Dengan tenaga terlatih yang jumlahnya terbatas, tim ini telah berusaha membantu para korban , Mereka terdiri dari 2 orang tenaga pengaduan, satu orang tenaga rehabilitasi sosial (rehabsos) dan 2 orang aparat penegak hukum,

Tabel 10.1 Tenaga Terlatih untuk Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

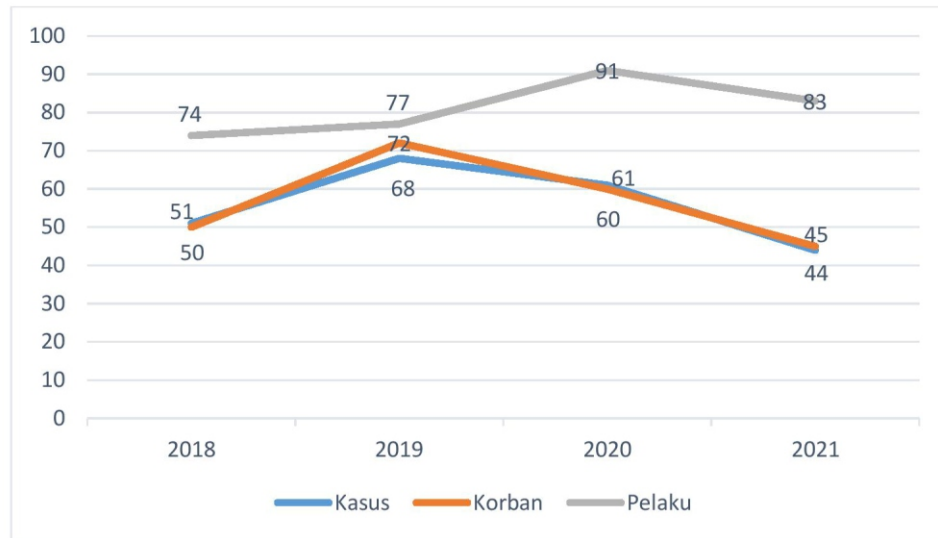
No,	Jenis tenaga terlatih untuk pelayanan perempuan & anak korban kekerasan	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-laki	%	Perempuan	%	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tenaga pengaduan	1		1		2
2	Tenaga rehabsos	0	0	1	100	1
3	Aparat penegak hukum	2	100	0	0	2
4	Tenaga reintegrasi	0		0		0

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2021

10.1 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Pada tahun 2021 PPT Harapan menangani kasus perempuan dan anak sebanyak 44 kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 83 orang, sedangkan korban kekerasan sebanyak 45 orang, Hal ini mengalami penurunan dari tahun 2020 baik dari jumlah kasus, pelaku kekerasan maupun korban kekerasan, Untuk kasus kekerasan turun sebanyak 27,87 persen yaitu dari 61 kasus menjadi 44 kasus, untuk jumlah pelaku turun dari 91 orang menjadi 83 orang atau 8,79 persen dan korban kekerasan turun dari 60 orang di tahun 2020 menjadi 45 orang di tahun 2021,

Gambar 10.1 Grafik Jumlah Kasus, Korban dan Pelaku Kekerasan Perempuan dan Anak yang ditangani PPT Harapan Empat Tahun Terakhir



Untuk jumlah pelaku kekerasan dari tahun ke tahun selalu jauh lebih banyak dari jumlah kasus maupun jumlah korban kekerasan hal ini menunjukkan masih banyak kasus kekerasan yang dilakukan secara kelompok atau lebih dari 1 orang pelaku dalam satu kasus dengan satu korban, Dan sebaliknya ada satu kasus dengan satu pelaku dan korban lebih dari 1 orang,

1. Kategori Jenis Kasus Kekerasan,

Dari 44 kasus yang ditangani dikategorikan menjadi beberapa jenis kasus yaitu seksual, fisik, psikis, penelantaran ekonomi, dan lainnya (pencurian, IT, narkoba dan lakalantas), Trend jenis kekerasan pada perempuan dan anak dari tahun ke tahun masih didominasi jenis kekerasan seksual, yaitu kasus kekerasan seksual dimana tahun 2021 sebanyak 26 kasus atau 59,09 persen dari total kasus, kemudian disusul kategori jenis

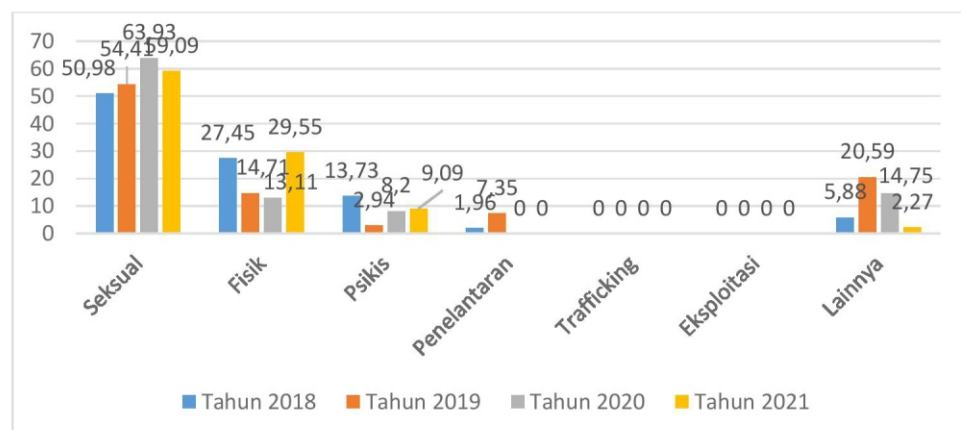
kekerasan fisik 13 kasus atau 29,55 persen dan kategori kekerasan psikis 4 kasus atau 9,09 persen dan kekerasan lainnya 1 kasus atau 2,27 persen, Untuk tahun 2021 tidak ada penanganan jenis kekerasan penelantaran dan dalam empat tahun terakhir tidak ada kasus trafficking dan eksploitasi yang masuk dalam penanganan PPT Harapan,

Tabel 10.2 Jenis Kasus yang Ditangani Tim Harapan dalam Empat Tahun Terakhir.

No,	Jenis Kekerasan	Jumlah Kasus Kekerasan							
		2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Seksual	26	50,98	37	54,41	39	63,94	26	59,09
2	Fisik	14	27,45	10	14,71	8	13,11	13	29,55
3	Psikis	7	13,73	2	2,94	5	8,2	4	9,09
4	Penelantaran	1	1,96	5	7,35	0	0	0	0,00
5	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	Eksplotasi	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7	Lainnya	3	5,88	14	20,59	9	14,75	1	2,27
	Jumlah =	51	100,00	68	100,00	61	100,00	44	100,00

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2020

Gambar 10.2 Jenis Kasus yang ditangani oleh Tim Harapan dalam Empat Tahun Terakhir



2. Kategori Usia Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Yang termasuk kategori usia anak yaitu usia dibawah 18 tahun dan usia dewasa yaitu usia diatas 18 tahun, Berdasarkan kategori usia pelaku kekerasan dari 83 orang sebanyak 64 orang atau 77,11 persen merupakan pelaku usia dewasa dan 19 orang atau 22,89 persen pelaku usia anak, Berdasarkan kategori usia dan jenis kelamin pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak dari 83 orang pelaku terdiri dari 62 orang atau 74,70 persen merupakan pelaku laki – laki dewasa, 2 orang atau 2,41 persen merupakan pelaku perempuan dewasa, 17 orang pelaku atau 20,48 persen merupakan pelaku laki – laki anak, 2 orang pelaku atau 2,41 persen merupakan pelaku perempuan anak,

Tabel 10.3 Kategori Usia Pelaku Kasus yang ditangani Tim Harapan 2021

Kategori Pelaku	Jenis Kelamin				Jumlah	%
	L	%	P	%		
Dewasa	62	74,70	2	2,41	64	77,11
Anak	17	20,48	2	2,41	19	22,89
Jumlah =	79	95,18	4	4,82	83	100,00

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2021

3. Kategori Usia Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Dilihat dari sisi korban dari 44 kasus terdapat 45 korban, hal ini dikarenakan adanya 1 kasus dengan korban lebih dari satu, Berdasarkan kategori usia korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dari 45 korban sebanyak 13 orang korban atau 28,89 persen merupakan korban usia dewasa dan 32 orang korban atau

71,11 persen merupakan korban usia anak, Berdasarkan kategori usia dan jenis kelamin dari 45 korban kekerasan 1 orang korban atau 2,22 persen merupakan korban laki – laki dewasa, 7 orang korban atau 15,56 persen merupakan korban perempuan dewasa, 12 orang korban atau 26,67 persen merupakan korban laki – laki anak dan 25 orang atau 55,56 persen merupakan korban perempuan anak,

Tabel 10.4 Kategori Usia Korban yang ditangani Tim Harapan Tahun 2021

Kategori Korban	Jenis Kelamin				Jumlah	%
	L	%	P	%		
Dewasa	1	2,22	12	26,67	13	28,89
Anak	7	15,56	25	55,56	32	71,11
Jumlah =	8	17,78	37	82,22	45	100,00

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2021

4. Kategori Korban Dewasa Berdasarkan Jenis Kekerasan

Dari kategori korban dewasa sejumlah 13 orang, jenis kekerasan terbanyak yang dialami korban yaitu kekerasan fisik sejumlah 7 orang korban atau 53,85 persen, kemudian kekerasan psikis sejumlah 3 orang korban atau 23,08 persen dan kekerasan seksual sebanyak 3 orang korban atau 23,08 persen, Untuk jenis kekerasan seksual, kekerasan psikis dan kekerasan fisik semua menimpa pada korban perempuan dewasa sedangkan untuk jenis kekerasan lainnya semua menimpa pada korban laki – laki dewasa, Tahun 2021 tidak ada jenis kekerasan penelantaran,

trafficking, eksploitasi dan jenis kekerasan lainnya yang menimpa ke korban dewasa,

Tabel 10.5 Jenis Kekerasan dengan Korban Dewasa yang Ditangani Tim Harapan Tahun 2021

No,	Jenis Kekerasan	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Fisik	1	7,69	6	46,15	7	53,85
2	Seksual	0	0,00	3	23,08	3	23,08
3	Penelantaran	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Psikis	0	0,00	3	23,08	3	23,08
5	Trafficking	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Eksplotasi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Lainnya	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Jumlah =	1	7,69	12	92,31	13	100

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2021

5. Kategori Korban Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan

Dari kategori korban anak sejumlah 32 korban kekerasan terhadap anak, jenis kekerasan terbanyak yaitu kekerasan seksual sejumlah 24 korban anak atau 75,00 persen, kemudian disusul dengan kekerasan fisik 6 korban anak atau 18,75 persen dan kekerasan psikis sebanyak 1 orang atau 3,13 persen, kekerasan lainnya 1 orang atau 3,13 persen, Dari 32 korban anak, korban jenis kelamin perempuan mendominasi yaitu sebanyak 25 orang atau 78,13 persen sedangkan laki – laki sebanyak 7 orang atau 21,88 persen, Berdasarkan kategori jenis kelamin dan jenis kekerasan yang menimpa korban anak maka korban perempuan anak dengan jenis kekerasan seksual mendominasi dengan jumlah

21 orang atau 65,63 persen dan korban laki - laki anak dengan jenis kekerasan seksual hanya 3 orang atau 12,50 persen, Untuk korban laki – laki dengan jenis kekerasan seksual merupakan korban seksual sesama jenis atau sodomi, Sementara untuk korban kekerasan anak dengan jenis kekerasan fisik jumlah korban laki-laki anak yaitu 4 orang atau 12,50 persen sedangkan korban perempuan anak dengan jenis kekerasan fisik sejumlah 2 orang atau 6,25 persen, Untuk jenis kekerasan psikis dan kekerasan lainnya hanya terdapat korban perempuan anak masing – masing sebanyak 1 orang atau 3,13 persen, Pada tahun 2021 tidak ada korban anak dengan jenis kekerasan penelantaran, trafficking dan eksploitasi,

Tabel 10.6 Jenis Kekerasan yang dialami Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No,	Jenis Kekerasan	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Fisik	4	12,50	2	6,25	6	18,75
2	Seksual	3	9,38	21	65,63	24	75,00
3	Penelantaran	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Psikis	0	0,00	1	3,13	1	3,13
5	<i>Trafficking</i>	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Eksplorasi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Lainnya	0	0,00	1	3,13	1	3,13
	Jumlah =	7	21,88	25	78,13	32	100,00

Sumber : DINSOSDALDUKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2021

6. Lingkup Tempat Kejadian Kasus Kekerasan yang Menimpa Korban Dewasa,

Pada kasus yang ditangani oleh PPT Harapan pada tahun 2021 dengan 13 korban dewasa dan dilihat dari tempat kejadian ada 9 korban atau 69,23 persen merupakan korban kekerasan rumah tangga atau KDRT, dimana korban KDRT dialami laki – laki dewasa sejumlah 1 orang dan dialami oleh perempuan dewasa sebanyak 8 orang, Sedangkan 4 korban atau 30,77 persen terjadi di tempat kejadian lainnya dimana korban semuanya merupakan korban perempuan dewasa, Di tahun 2021 tidak ada korban dengan tempat kejadian di tempat kerja,

Tabel 10.7 Tempat Kejadian Kekerasan dengan Korban Dewasa yang Ditangani Tim Harapan Tahun 2021

No,	Tempat kejadian	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		laki-laki	%	Perempuan	%		
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Rumah tangga/KDRT	1	7,69	8	61,54	9	69,23
2	Tempat kerja	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Lainnya	0	0,00	4	30,77	4	30,77
	Jumlah =	1	7,69	12	92,31	13	100,00

Sumber : DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2021

7. Lingkup Tempat Kejadian Kasus Kekerasan yang Menimpa Korban Anak,

Pada korban anak baik perempuan maupun laki-laki, tempat kejadian kekerasan didominasi ada di tempat “lainnya”, Dari 32 korban kekerasan anak sebanyak 29 anak atau 90,63

persen terjadi di tempat lainnya dan 3 korban anak atau 9,38 persen terjadi dalam lingkungan keluarga atau KDRT, Untuk korban anak dengan tempat kejadian dalam rumah tangga 3 anak 1 anak berjenis kelamin laki – laki dan 2 orang berjenis kelamin perempuan, Sementara untuk korban anak dengan tempat kejadian “Lainnya” sebanyak 23 korban merupakan korban perempuan anak atau 71,88 persen dari korban anak keseluruhan, dan 6 orang anak merupakan korban laki – laki anak atau 18,75 persen dari korban anak secara keseluruhan,

Tabel 10.8 Tempat Kejadian Kekerasan dengan Korban Anak yang Ditangani Tim Harapan Tahun 2021

No,	Tempat kejadian	Jenis Kelamin				Jml	%
		laki-laki	%	Perempuan	%		
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Rumah tangga/KDRT	1	3,13	2	6,25	3	9,38
2	Tempat kerja	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Lainnya	6	18,75	23	71,88	29	90,63
	Jumlah =	7	21,88	25	78,13	32	100,00

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2021

8. Rentang Umur Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak,

Dilihat dari sisi umur korban kekerasan terhadap perempuan dan anak terbanyak korban dengan rentang usia 13 - 18 tahun yaitu 24 orang atau 53,33 persen, Terbanyak kedua korban kekerasan dengan rentang usia 6 -12 tahun yaitu sebanyak 9 orang atau 20,00 persen, Kemudian disusul korban kekerasan dengan rentang usia 25 – 44 tahun sebanyak 6 orang atau 13,33

persen dan korban kekerasan dengan rentang usia 18 – 24 tahun sebanyak 5 orang atau 11,11 persen, korban dengan rentang umur 45 – 59 sebanyak 1 orang atau 2,22 persen dan ditahun 2011 tidak terdapat korban dengan rentan umur 0 – 5 tahun,

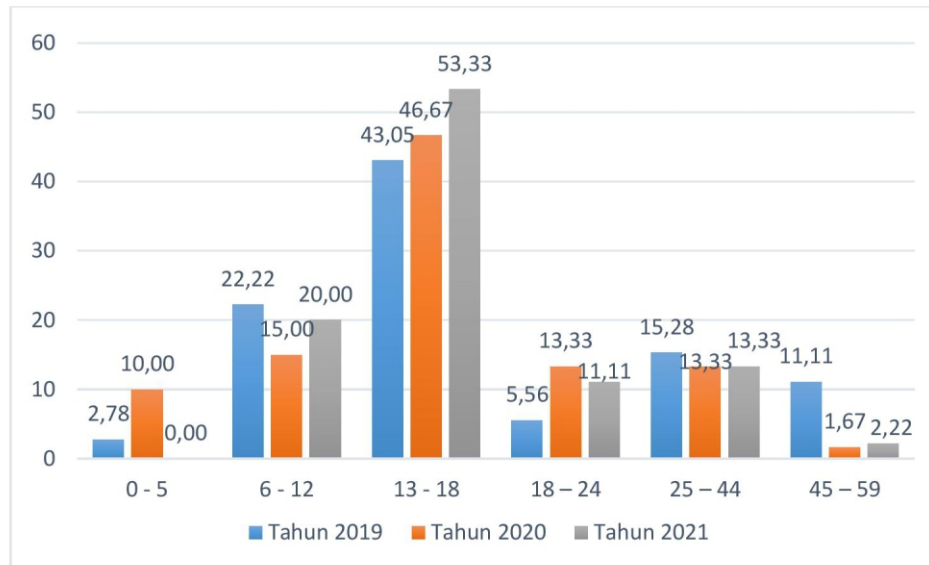
Tabel 10.9 Umur Korban Kekerasan yang Kasusnya Ditangani Tim Harapan Tahun 2021

No,	Umur Korban (tahun)	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		L	%	P	%		
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	0 - 5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	6 - 12	7	15,56	2	4,44	9	20,00
3	13 - 18	0	0,00	24	53,33	24	53,33
1	18 - 24	1	2,22	4	8,89	5	11,11
2	25 - 44	0	0,00	6	13,33	6	13,33
3	45 - 59	0	0,00	1	2,22	1	2,22
	Jumlah =	8	17,78	37	82,22	45	100,00

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2021

Dilihat dari rentang umur korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2019 sampai dengan 2021 masih memiliki trend yang hampir sama dimana korban terbanyak di rentang umur 13 – 18 tahun kemudian korban dengan rentang umur 6 – 12 tahun dan rentang umur 25 – 44 tahun,

Gambar 10.3 Perbandingan Umur Korban Kekerasan yang ditangani oleh Tim Harapan Tiga Tahun Terakhir,



9. Hubungan Antara Pelaku Kekerasan dengan Korban Dewasa

Jumlah pelaku kekerasan terhadap korban dewasa sebanyak 13 orang, Dilihat dari jenis kelamin pelaku kekerasan terhadap korban dewasa sebanyak 12 orang atau 92,31 persen adalah pelaku laki – laki dan 1 orang atau 7,69 persen pelaku perempuan, Dan hubungan antara pelaku dengan korban dewasa sebanyak 7 orang atau 53,85 persen adalah hubungan suami istri, 3 orang atau 23,08 persen adalah hubungan Lainnya dengan korban, 2 orang atau 15,38 persen hubungan pelaku dengan korban dewasa adalah orang tua dan 1 orang atau 7,69 persen hubungan pelaku dengan korban adalah hubungan keluarga,

Tabel 10.10 Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban Dewasa yang Ditangani Tim Harapan Tahun 2021

No,	Hubungan pelaku dengan Korban dewasa	Jenis Kelamin				Jml	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Orang tua	1	7,69	1	7,69	2	15,38
2	Suami/istri	7	53,85	0	0,00	7	53,85
3	Keluarga	1	7,69	0	0,00	1	7,69
4	Lainnya	3	23,08	0	0,00	3	23,08
	Jumlah =	12	92,31	1	7,69	13	100,00

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2021

10. Hubungan Antara Pelaku Kekerasan dengan Korban Anak

Jumlah pelaku kekerasan terhadap korban anak sebanyak 70 orang pelaku yang terdiri dari 67 orang atau 95,71 persen pelaku laki – laki dan 3 orang atau 4,29 persen merupakan pelaku perempuan, Dilihat dari hubungan pelaku dengan korban anak maka didominasi oleh kategori hubungan Lainnya yaitu sebanyak 64 orang atau 91,43 persen dimana dalam hubungan kategori lainnya hubungan korban dengan pelaku yaitu teman, pacar, tetangga, dan orang tidak dikenal, Sementara hubungan pelaku dengan kategori Keluarga terhadap korban anak sebanyak 3 orang atau 4,29 persen dan hubungan pelaku terhadap korban anak dengan kategori orang tua juga sebanyak 3 orang atau 4,29 persen, Sementara untuk hubungan pelaku

dengan kategori suami istri terhadap korban anak sebanyak 0 persen,

Tabel 10.11 Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban Anak yang Ditangani Tim Harapan Tahun 2021

No,	Hubungan pelaku dengan korban anak	Jenis Kelamian				Jml	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Orangtua	2	2,86	1	1,43	3	4,29
2	Suami/istri	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Keluarga	3	4,29	0	0,00	3	4,29
4	Lainnya	62	88,57	2	2,86	64	91,43
	Jumlah =	67	95,71	3	4,29	70	100,00

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2021

10.2 Perlindungan Khusus Anak

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Selanjutnya, pada ayat 15 disebutkan bahwa perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh-kembangnya,

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang tersebut mencakup

15 kategori, Dalam bab ini diuraikan kondisi anak di Kabupaten Purbalingga yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari 6 kategori yakni: (1) anak yang berhadapan dengan hukum, (2) anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, (3) anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, (4) anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dan (5) anak korban kejahatan seksual dan (6) Anak yang menyandang cacat,

1. Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

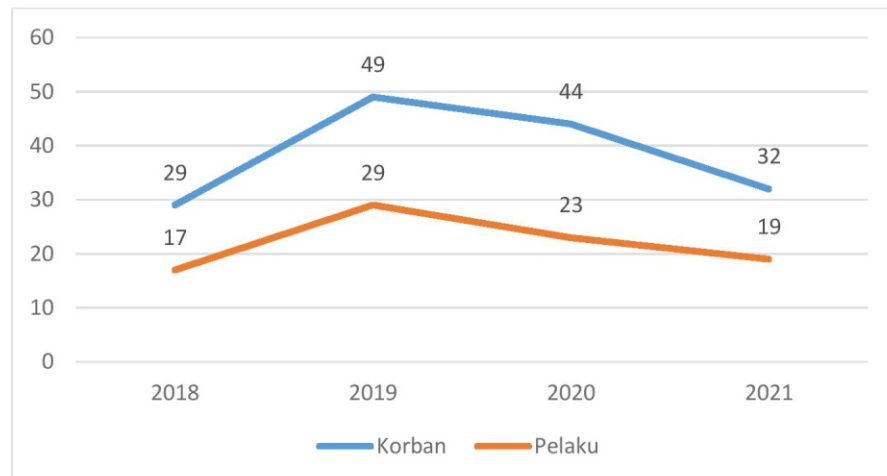
Dalam pasal 1 (2) UU No 11 tahun 2012 UU Sistem Peradilan Anak yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, terlibat dalam kasus kekerasan atau bersinggungan dengan hukum baik itu pelaku maupun korban, Dan yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum 18 tahun, Sementara anak yang dimaksud anak menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun, Dalam catatan penanganan kasus kekerasan oleh PPT Harapan, Anak yang Berhadapan dengan Hukum hanya mencakup korban dan pelaku, Untuk korban anak dari tahun ke tahun selalu lebih banyak dibandingkan dengan pelaku anak,

Tabel 10.12 Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditangani oleh Tim Harapan dalam Empat Tahun Terakhir.

No	ABH	2018			2019			2020			2021		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	Korban	8	21	29	10	39	49	4	40	44	7	25	32
2	Pelaku	17	0	17	29	0	29	22	1	23	17	2	19
Jumlah		25	21	46	39	39	78	26	41	67	24	27	51

Sumber: DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga, 2021

Gambar 10.4 Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditangani Tim Harapan dalam Empat Tahun Terakhir



2. Anak Korban Eksploitasi Ekonomi dan/atau Seksual

Anak korban eksploitasi ekonomi adalah anak yang pekerjaan secara paksa oleh orang tuanya atau pihak lain baik secara tenaga atau seksual, Untuk tahun 2021 dalam kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh PPT Harapan tidak di temukan adanya kasus eksplotasi ekonomi maupun seksual terhadap anak,

3. Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba

Tahun 2021 terdapat 3 anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan kesemuanya telah mendapatkan penanganan atau rehabilitasi,

Tabel 10.13 Jumlah Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021

No	Keterangan	Jenis Kelamin Korban		Total
		L	P	
1	Anak korban Penyalahgunaan Narkoba	3	0	3
2	Anak korban Penyalahgunaan Narkoba yang telah direhab	3	0	3

Sumber : BNN Purbalingga 2021

4. Anak Korban Kekerasan Fisik, Psikis dan seksual

Untuk anak korban kekerasan rata – rata didominasi jenis kelamin perempuan, Dan untuk jenis kekerasannya, setiap tahunnya didominasi oleh anak korban kekerasan seksual sementara untuk anak korban kekerasan fisik dan atau psikis relatif kecil,

Tabel 10.14 Jumlah Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Fisik dan Psikis yang ditangani PPT Harapan dalam Empat Tahun Terakhir

No	Jenis Kekerasan	2018			2019			2020			2021		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	Fisik	3	0	3	5	1	6	2	2	4	4	2	6
2	Psikis	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
3	Seksual	4	19	23	1	35	36	1	35	36	3	21	24
Jumlah		7	19	26	6	37	43	3	37	40	7	24	31

Sumber : DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga Tahun 2021,

5. Anak yang menyandang cacat,

Anak yang menyandang cacat atau anak dengan kedisabilitasan dalam hal ini adalah anak tuna daksa, tuna netra, tuna wicara, tuna grahita, tuna laras serta disabilitas ganda fisik dan mental,

Tabel 10.15 Jumlah Anak yang Menyandang Cacat di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No	Jenis Disabilitas	2021		
		L	P	Total
1	Disabilitas Fisik / Tuna Daksa	147	135	282
2	Disabilitas Mata / Tuna Netra	15	11	26
3	Disabilitas Bisu Tuli / Tuna Rungu Wicara	101	75	176
4	Disabilitas Mental Retardasi / Tuna Grahita	104	77	181
5	Disabilitas Mental Eks Psikotik / Tuna Laras	2	4	6
6	Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda)	55	62	117
	Jumlah	425	364	788

Sumber : DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga Tahun

2021

BAB XI

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat dirangkum bahwa: **pertama**, penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2021 lebih banyak didominasi oleh kelompok usia produktif dimana jumlah laki – lakinya sedikit lebih banyak dibanding dengan perempuan. Dominannya usia produktif ini menunjukkan bahwa saat ini Kabupaten Purbalingga sedang mengalami bonus demografi, yakni struktur penduduk yang jumlah usia produktifnya lebih banyak dibandingkan usia non-produktif, baik non-produktif muda (14 tahun ke bawah) maupun non-produktif tua (65 tahun ke atas), Hal ini menjadi momen yang menguntungkan sepanjang dikelola melalui kebijakan, program dan kegiatan yang tepat, tidak hanya di bidang ketenagakerjaan, melainkan juga kesehatan, pendidikan serta pembinaan akhlak,

Kedua, kondisi kesehatan ibu hamil di Purbalingga masih belum optimal disebabkan masih adanya kasus ibu berstatus resti dan menderita kekurangan energi kronis, Hal ini dimungkinkan terkait dengan tingkat kunjungan K4 ibu hamil yang belum 100 persen, **Ketiga**, tingkat pendidikan keluarga di Kabupaten Purbalingga pada umumnya masih rendah, Hal ini dimungkinkan menjadi salah satu penyebab masih adanya KK yang tidak mempunyai pekerjaan, Akibatnya, banyak keluarga yang masih termasuk kategori Pra Sejahtera, Sementara itu, partisipasi KB mereka belum mencapai 100 persen, Di antara mereka yang ber-KB, sebagian besar menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang yakni suntikan dan pil,

Kelima, secara keseluruhan semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah pula persentase partisipasinya, Fenomena ini terutama terjadi di kalangan perempuan, Pada jenjang pendidikan non-formal melalui jalur Program Paket, tampak bahwa jumlah peserta laki – laki lebih banyak dibandingkan perempuan, Hal ini dimungkinkan sebagai salah satu upaya mengejar ketertinggalan pendidikan di kalangan perempuan, **Keenam**, di sektor usaha perempuan cukup banyak terlibat di bidang perdagangan kecil dan terutama sebagai buruh perusahaan, Hal ini menguatkan dugaan dominannya perempuan di perusahaan-perusahaan rambut (bulu mata dan rambut palsu) yang banyak berdiri di Purbalingga, Keberadaan perempuan juga cukup terlihat pada kegiatan UMKM dan pertanian, akan tetapi kurang terlihat di sektor perikanan dan pariwisata,

Ketujuh, di bidang politik tampak bahwa meskipun perempuan tidak dominan di dunia politik (baik di tingkat partai maupun di Lembaga DPRD), namun tingkat partisipasi mereka untuk menggunakan hak pilih lebih tinggi dibandingkan laki-laki, Sementara itu, di bidang pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten, meskipun jumlah ASN perempuan sedikit lebih banyak, akan tetapi jumlah mereka yang menduduki jabatan strategis masih sangat sedikit, Demikian pula dengan di lembaga-lembaga publik lainnya seperti kepolisian dan pengadilan, **Kedelapan**, kasus kekerasan yang ditangani Tim Harapan Kabupaten Purbalingga cukup beragam, Kasusnya menimpa baik orang dewasa maupun anak-anak dan kebanyakan adalah perempuan, Pada korban perempuan, bentuk kekerasannya lebih beragam baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual,

penelantaran maupun kekerasan lainnya, Akan tetapi untuk korban perempuan didominasi dengan kasus kekerasan seksual, Adapun pada korban laki-laki di dominasi kasus kekerasan fisik, Pada anak-anak (baik perempuan maupun laki-laki), kekerasannya lebih banyak terjadi di dalam rumah tangga maupun “lainnya”, Pada perempuan dewasa, kekerasan lebih banyak dialami oleh mereka yang lebih muda dibandingkan dengan umur korban laki-laki,

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga, 2022, *Purbalingga dalam Angka 2022*, Purbalingga: Bappeda Kabupaten Purbalingga,
- BPS, *Istilah Kependudukan*, www.bps.go.id/menutahb.php?tab=4&tabel=1&kat=1&id_subyek=12&12t=1&var, [Akses: 11 Desember 2014],
- Depkes RI, 1996, *Pedoman Penanggulangan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Kesehatan Masyarakat,
- Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, 2022, *Profil Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021*, Purbalingga: Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga,
- Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB PP PA Kabupaten Purbalingga, 2021,
- BKKBN <https://portalpk21.bkkbn.go.id/laporan/tabulasi>
- Fakih, Mansour, 1996, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Juliaan, Flourisa, 2009, *Analisis Lanjutan SDKI Tahun 2007, Unmet need dan Kebutuhan Pelayanan di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN,
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <http://www.kemenpppa.go.id/v3/index.php/glosari/gender> , [Akses: 15 Desember 2014],
- Kementerian PP & Perlindungan Anak, *Visi Misi dan Tujuan*, <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/tentangkami/visimisidantujuan> [Akses: 15 Desember 2015],
- Kementerian PP & Perlindungan Anak, *Press Release Kampanye “He for She” Dorong Keterlibatan Laki-laki dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender*, Siaran Pers Nomor: 159/Humas KPP-PA/12/2015, <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/publikasi/siaran-pers/8-perempuan/868-hm>,
- Koalisi Perempuan, <http://www.koalisiperempuan.or.id/kesenjangan-gender>, [Akses: 16 Desember 2014],

Umar, H, Nasaruddin, 2009, *Bias Gender dalam Penafsiran Kitab Suci*, Jakarta: Fikahati Aneska,

VISI, MISI, DAN TUJUAN RPJMD 2021 - 2026,
(http://sipd.bangda.kemendagri.go.id/dokumen/uploads/visimisi_229_2016.pdf),

